



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024



Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2025



www.kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

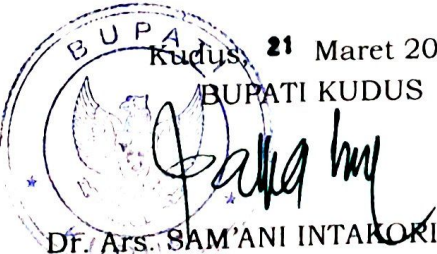
Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Akhir Tahun 2024 dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana diketahui bahwa LKPJ disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sebagai petunjuk teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Di dalam ketentuan tersebut diamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki setidaknya 3 (tiga) kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran, yaitu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah (Kemendagri), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD, dan memberikan informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LKPJ sendiri merupakan laporan dengan substansi pokok hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun anggaran. Tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Muatan dalam LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan yang baik ini, diucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Kudus atas keharmonisan yang terbina selama ini. Disampaikan juga apresiasi untuk jajaran Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus, serta penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Kudus atas partisipasi dan peran serta dalam pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 21 Maret 2025
BUPATI KUDUS

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 VISI DAN MISI	3
1.3 DATA UMUM DAERAH	11
1. Data Geografis Wilayah.....	11
2. Jumlah Penduduk.....	13
3. Pertumbuhan Penduduk.....	16
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	16
5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	19
6. Realisasi belanja menurut Jenis Belanja	21
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	22
BAB II	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	24
2.1 KEBIJAKAN UMUM	24
2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	25
2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN.....	26
2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	27
2.5 PENDAPATAN TRANSFER.....	32
2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	33
2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN	33
2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN.....	35
BAB III	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	37
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	37
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	39
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	86
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	126
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.....	138
3.1.5 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150
3.1.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	279
3.1.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	286
3.1.8 Unsur Kewilayahan	289
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	322
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	339

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN..... 373
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN 373
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN..... 374

BAB V.....
PENUTUP 375

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Penyampaian LKPJ hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2024, merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Penyusunan LKPJ dilaksanakan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Obyek laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan koridor yang diatur dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah No 248);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah No 249);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 20).

1.2 VISI DAN MISI

Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 merupakan masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Kudus, dan pada tahun 2024 lalu telah dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Selama periode tersebut Pemerintahan di Kabupaten Kudus dipimpin oleh Penjabat Bupati yang sesuai dengan ketentuan memiliki tugas menyukseskan transisi kepemimpinan mulai dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah hingga menjaga situasi kondusif wilayah, tetapi tidak melaksanakan visi dan misi secara umum. Dengan demikian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang dilaksanakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026 tidak memuat Visi dan Misi.

Penyusunan RPD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Perbedaan signifikan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan, karena Pj Kepala Daerah tidak menyusun visi dan misi. Dengan demikian substansi RPD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penjabaran rencana arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang telah disusun, diprioritaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal 3. Peningkatan Literasi Masyarakat 4. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	1. Pendidikan 2. Perpustakaan 3. Kepemudaan dan Olah Raga
		Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	1. Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah 2. Pelestarian nilai dan warisan budaya	Kebudayaan
		Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1 Peningkatan kualitas kesehatan ibu 2 Peningkatan kualitas kesehatan bayi 3 Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting 4 Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular 5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi 6 Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			7 Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	
		Peningkatan Ketahanan Pangan yang berkualitas	1. Peningkatan pemanfaatan pangan 2. Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan	Pangan
		Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Sosial
		Peningkatan perlindungan sosial	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Sosial
		Peningkatan Kesetaraan Gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan permukiman layak huni	1. Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. 2. Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	- Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi	
	Menurunnya Pengangguran	Peningkatan penempatan tenaga kerja	1. Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja 2. Peningkatan mutu tenaga kerja 3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	Tenaga Kerja
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 2. Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	- Pertanian - Kelautan dan Perikanan
		2. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah 2. Membangun Industri Pariwisata 3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		3. Peningkatan Volume Perdagangan	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus 3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Perdagangan
		4. Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan tanpa IHT	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		5. Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		6. Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan daya tarik investasi	1. Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha 2. Meningkatkan dukungan kemudahan investasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal 4. Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	Penanaman Modal
		2. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	1. Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi 2. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum 3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi 4. Meningkatkan kualitas jaringan drainase	- Perhubungan - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Ruang	Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Meningkatkan kapabilitas pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Perencanaan dan Semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan kinerja daerah	Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
			Penguatan sistem merit manajemen ASN	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta semua Perangkat Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan sumber pendapatan daerah	Keuangan dan Perangkat Daerah berpendapatan
			Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	Setda, Keuangan, Sekretariat DPRD dan semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan efektifitas penganggaran	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
			Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
		Transformasi Pelayanan Publik	Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	Setda, Penelitian dan Pengembangan, Semua Perangkat Daerah
			Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Semua Perangkat Daerah
Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa 2. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		2. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	1. Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan 2. Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	
		3. Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	1. Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan 2. Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan 3. Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa 4. Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 5. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kewilayahan
	Meningkatnya kekondusifan wilayah	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kewilayahan	1. Penegakan perda secara konsisten dan persuasif 2. Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat
		2. Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	1. Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik 2. Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Peningkatan ketahanan terhadap bencana	1. Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			2. Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti 2. Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup 3. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup
		2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	
		3. Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

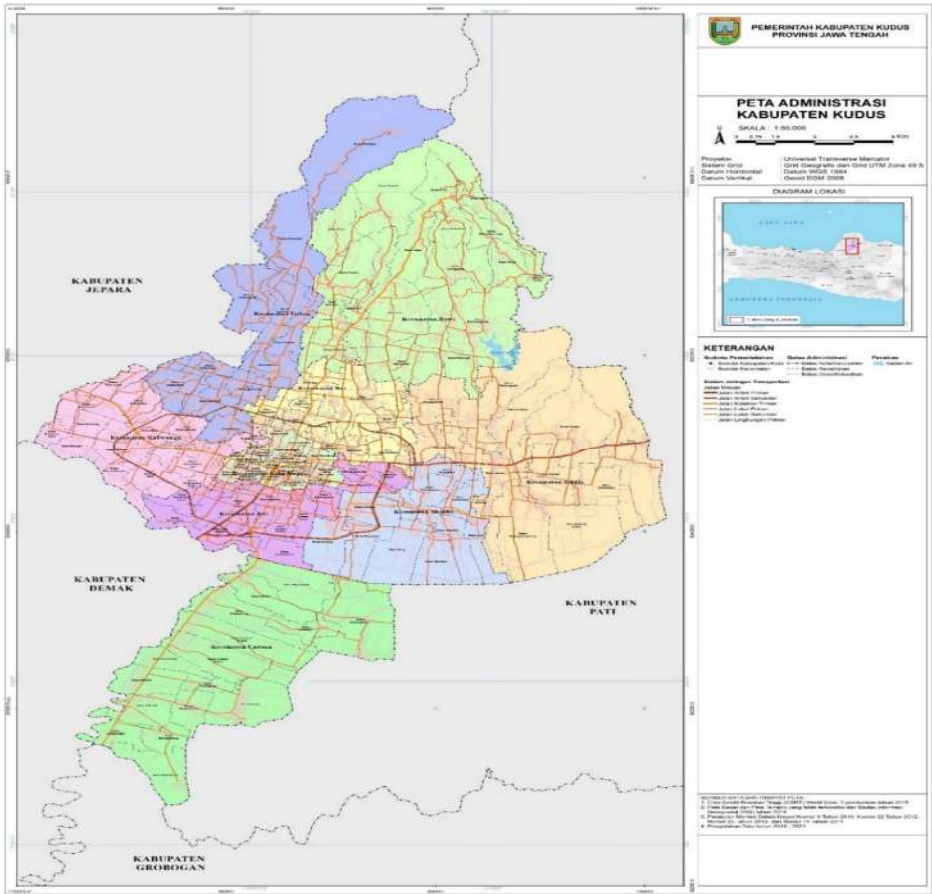
Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur : Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan dan 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Adapun data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi
Kabupaten Kudus 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.419,01	15	0	48	67	444
2	Kota	1.141,50	16	9	34	110	498
3	Jati	2.732,57	14	0	52	79	388
4	Undaan	7.456,67	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.736,65	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.710,76	12	0	45	85	445
7	Bae	2.406,56	10	0	38	51	287
8	Gebog	6.038,18	11	0	80	82	435
9	Dawe	9.102,59	18	0	71	110	583
Jumlah		44.744,50	123	9	434	716	3.778

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (diolah)

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.778 RT.

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 436.585 orang atau 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 atau sekitar 50,01%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak 877.821 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 438.626 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 439.195 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431
2024	438.626	49,97	439.195	50,03	877.821

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada suatu daerah yang dapat berdampak pada Dependency Ratio (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus Data komposisi penduduk dapat dilihat sesuai tabel-tabel berikut ini :

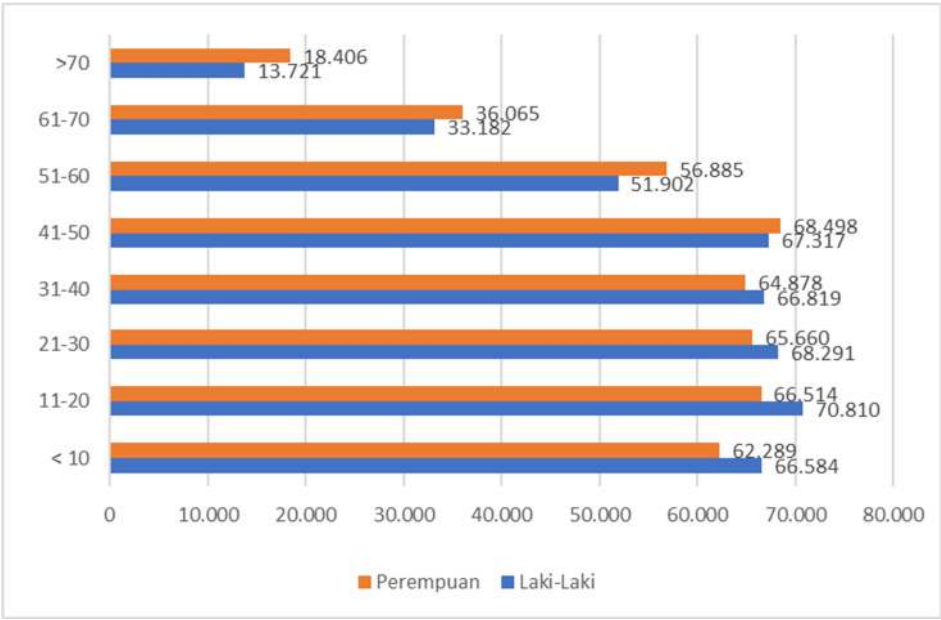
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	66.584	62.289	128.873
11-20	70.810	66.514	137.324
21-30	68.291	65.660	133.951
31-40	66.819	64.878	131.697

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
41-50	67.317	68.498	135.815
51-60	51.902	56.885	108.787
61-70	33.182	36.065	69.247
> 70	13.721	18.406	32.127
Jumlah	438.626	439.195	877.821

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2024



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 11-20 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 137.324 jiwa terdiri perempuan 66.514 dan laki-laki 70.810 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 41-50 tahun sebesar 135.815 jiwa terdiri dari perempuan 68.498 dan laki-laki 67.317.

Table 1.5
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2024

Tahun	≤14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15
2024	186.406	621.783	69.632	877.821	41,18

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (dependency ratio). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 41,18.

Sedangkan untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus
Tahun 2020-2024

Tingkat pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Sekolah	215.520	225.946	235.344	242.423	246.338
Belum Tamat SD/ Sederajat	64.338	62.373	59.661	57.637	55.276
Tamat SD/ sederajat	236.051	229.125	219.953	214.236	208.611
SLTP/ sederajat	146.140	144.005	140.876	139.680	139.283
SLTA/ sederajat	157.367	157.921	161.995	167.016	173.288
Akademi / Sarjana	46.553	47.835	50.250	52.439	55.025
Jumlah Penduduk	865.969	867.205	868.079	873.431	877.821

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 246.338 penduduk. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 2.586 orang atau naik 4,49 % dibandingkan tahun 2023.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,10 % sampai dengan 1,17 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2020	865.969	0,69
2021	867.205	0,14
2022	868.079	0,10
2023	873.431	0,61
2024	877.821	0,50

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023.

4. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.543, naik dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2023 sebesar 6.484 orang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian rasio antara Aparatus Sipil Negara dan jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebesar 0,75 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah Kerja.

Tabel 1.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	18	29	54
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	11	4	7	22
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Trantibum Linmas	13	2	6	21
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	18	12	32	62
5	Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	5	22	6	33
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	2
6	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	16	42	68	126
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	2	9	4	15
		Urusan Perpustakaan	2	4	4	10
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	3	5	12	20
		Urusan Pariwisata	3	2	11	16
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	9	6	22
10	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	9	733	54	796
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	6	12	5	23
		Urusan Statistik	0	0	2	2
		Urusan Persandian	0	0	3	3
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	9	45	64
		Urusan Pertanahan	1	0	15	16
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan bidang PMD	12	6	11	29
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	4	8	13	25

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pendidikan	9	3686	163	3858
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1	0	18	19
16	Dinas Perdagangan	Urusan Perdagangan	6	9	92	107
17	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	11	7	58	76
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Urusan Pertanian	8	40	26	74
		Urusan Pangan	1	2	2	5
		Urusan Perikanan	1	1	5	7
		Urusan Kehutanan	0	0	0	0
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	4	6	11	21
		Urusan Lingkungan Hidup	3	9	101	113
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Urusan Sosial	3	5	8	16
		Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	6	8
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	6	8
21	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Tenaga Kerja	7	18	4	29
		Urusan Perindustrian	1	1	4	6
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	4	4	9
		Urusan Transmigrasi	0	0	0	0
22	Inspektorat	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	8	27	6	41
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	Urusan Kesehatan	12	384	102	498
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Trantibum Linmas	9	25	14	48
25	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	6	2	6	14
26	Kecamatan Bae	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	8	15
27	Kecamatan Dawe	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	13	20
28	Kecamatan Gebog	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	9	16
29	Kecamatan Jati	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	7	15
30	Kecamatan Jekulo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	8	17
31	Kecamatan Kaliwungu	Urusan Pemerintahan Umum	6	0	8	14

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
32	Kecamatan Kota Kudus	Urusan Pemerintahan Umum	47	0	40	87
33	Kecamatan Mejobo	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	11	19
34	Kecamatan Undaan	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	8	16
35	Staf Ahli Bupati	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	3	0	3	6
JUMLAH			333	5125	1085	6543

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kudus Tahun 2024

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut ditujukan agar kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kata lain, Pemda dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kemandirian fiskal daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin adanya sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan daerah.

UU HKPD memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Hal ini karena salah satu tujuan UU HKPD adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan dalam kebijakan opsen pajak yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD memberikan keleluasaan yang lebih tinggi kepada Pemda dalam hal pemungutan atas PDRD yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemda melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Pada tahun 2024, Pemkab Kudus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain:

1. Pemantapan dasar hukum pengelolaan PDRD dengan penyusunan peraturan pelaksanaan Perda 4/2023;
2. Sosialisasi dan edukasi PDRD;
3. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
4. Penyesuaian kompensasi untuk Pajak Air Tanah;
5. Pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan basis data pajak daerah;
6. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
7. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
8. Pengelolaan piutang pajak daerah;
9. Pembangunan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
10. Pemberian insentif dan penghargaan kepada wajib pajak; dan
11. Peningkatan kapasitas organisasi (SDM dan sarana prasarana).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait optimalisasi retribusi daerah adalah:

1. Penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Penyusunan kajian potensi bekerja sama dengan instansi lain;
4. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Pengelolaan piutang retribusi daerah;
7. Penertiban dan penegakan hukum;
8. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data; dan
9. Penerapan metode pembayaran nontunai, termasuk implementasi pembayaran QRIS pada beberapa objek retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun lain-Lain PAD yang sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan manajemen kas, dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan persyaratan penggunaan dana dan pelaporan secara tepat waktu.

Selain itu, dilakukan juga konsultansi dan audiensi terkait kebijakan TKD untuk memastikan kepatuhan atas peraturan yang telah ditentukan.

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Target PAD TA 2024 ditetapkan sebesar Rp. 507.396.689.623,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 546.739.719.398,00 atau 107,75%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen retribusi daerah (110,86%) memiliki capaian tertinggi, disusul kemudian pajak daerah (106,09%), hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (100,00%), serta terakhir lain-lain PAD yang sah 84,44%. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus TA 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.232.004.243.993	2.269.812.377.865	101,69
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	507.396.689.623	546.739.719.398	107,75
Pajak Daerah	187.898.112.000	199.346.476.225	106,09
Retribusi Daerah	287.334.726.000	318.546.358.315	110,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.768.000	10.840.770.453	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.323.083.623	18.006.114.405	84,44
Pendapatan Transfer	1.724.607.554.370	1.723.072.658.467	99,91
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.533.655.622.535	1.548.396.951.853	100,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.951.931.835	174.675.706.614	91,48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93
Belanja Operasi	1.863.911.478.118	1.738.294.737.500	93,26
Belanja Modal	335.853.434.506	315.397.080.530	93,91
Belanja Tak Terduga	7.992.644.465	1.731.817.300	21,67
Belanja Transfer	305.295.387.000	305.051.629.400	99,92
PEMBIAYAAN DAERAH	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
Penerimaan Pembiayaan	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
Pembiayaan Netto	281.048.700.096	281.048.700.096	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Kebijakan pelaksanaan belanja oleh Pemerintah Kabupaten Kudus disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.513.052.944.089,- dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.360.475.264.730,- atau mencapai 93,93%. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.11. berikut :

Tabel 1.11
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Operasi	1.863.911.478.118	1.738.294.737.500	93,26
2.	Belanja Modal	335.853.434.506	315.397.080.530	93,91
3.	Belanja Tak Terduga	7.992.644.465	1.731.817.300	21,67
4.	Belanja Transfer	305.295.387.000	305.051.629.400	99,92
Jumlah		2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

Dari perbandingan antara potensi kemampuan pendapatan sebesar Rp. 2.232.004.243.993 dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp. 2.513.052.944.089, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai (Rp.281.048.700.096). Keadaan defisit tersebut selanjutnya ditutup dari pembiayaan Pemerintah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	281.048.700.096	281.048.700.096	100
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	281.048.700.096	281.048.700.096	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	
	Pembiayaan Netto	281.048.700.096	281.048.700.096	100,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasinya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut diubah beberapa kali agar keuangan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 23 Februari 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penambahan anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, DAK Non Fisik BOKB, DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan pergeseran antar objek, rincian objek, dan sub rincian objek antar belanja;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Mei 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 yang telah disalurkan seluruhnya secara tunai ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2024 dan pergeseran antar objek, rincian objek, dan sub rincian objek antar belanja;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Juli 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus untuk penanganan pasca kebakaran Pasar Barang Bekas dan pergeseran antar objek, rincian objek, dan sub rincian objek antar belanja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Agustus 2024;
5. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 Agustus 2024;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pelaksanaan Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Provinsi Jateng, tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD), dan perubahan alokasi anggaran TMMD yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pergeseran antar sub rincian objek, antar rincian objek, dan antar objek dalam DPPA SKPD;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peraturan Bupati ini mengatur tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah Kabupaten Kudus, pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran kekurangan belanja gaji dan tunjangan SKPD dan pergeseran antar sub rincian objek, antar rincian objek, dan antar objek dalam DPPA SKPD.

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut ditujukan agar kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kata lain, Pemda dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kemandirian fiskal daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin adanya sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan daerah.

2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

UU HKPD memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Hal ini karena salah satu tujuan UU HKPD adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan dalam kebijakan opsen pajak yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD memberikan keleluasaan yang lebih tinggi kepada Pemda dalam hal pemungutan atas PDRD yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemda melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Pada tahun 2024, Pemkab Kudus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain:

1. Pemantapan dasar hukum pengelolaan PDRD dengan penyusunan peraturan pelaksanaan Perda 4/2023;
2. Sosialisasi dan edukasi PDRD;
3. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
4. Penyesuaian kompensasi untuk Pajak Air Tanah;
5. Pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan basis data pajak daerah;
6. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
7. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
8. Pengelolaan piutang pajak daerah;
9. Pembangunan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
10. Pemberian insentif dan penghargaan kepada wajib pajak; dan
11. Peningkatan kapasitas organisasi (SDM dan sarana prasarana).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait optimalisasi retribusi daerah adalah:

1. Penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Penyusunan kajian potensi bekerja sama dengan instansi lain;
4. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana;

6. Pengelolaan piutang retribusi daerah;
7. Penertiban dan penegakan hukum;
8. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data; dan
9. Penerapan metode pembayaran nontunai, termasuk implementasi pembayaran QRIS pada beberapa objek retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun lain-Lain PAD yang sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan manajemen kas, dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan persyaratan penggunaan dana dan pelaporan secara tepat waktu. Selain itu, dilakukan juga konsultansi dan audiensi terkait kebijakan TKD untuk memastikan kepatuhan atas peraturan yang telah ditentukan.

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa target PAD TA 2024 ditetapkan sebesar Rp507.396.689.623,00 dapat terealisasi sebesar Rp546.739.719.398,00 atau 107,75%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen retribusi daerah (110,86%) memiliki capaian tertinggi sebesar 110,86%, disusul kemudian pajak daerah (106,09%), hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (100,00%), dan terakhir lain-lain PAD yang sah 84,44%.

Adapun berdasarkan kontribusi masing-masing jenis PAD sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2023 didominasi oleh retribusi daerah (58,26%) disusul pajak daerah sebesar 36,46%, lain-lain PAD yang sah sebesar 3,29%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,98%.

Tabel 2.1
Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kab Kudus TA 2024

JENIS PENERIMAAN	REALISASI	% Kontribusi
Pajak Daerah	199.346.476.225	36,46
Retribusi Daerah	318.546.358.315	58,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.770.453	1,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.006.114.405	3,29
Jumlah PAD	546.739.719.398	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp199.346.476.225,00 memiliki kontribusi sebesar 36,46% dalam penerimaan PAD. Capaian realisasi pajak sendiri sudah melampaui target dengan capaian 106,09%. Secara umum sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2, kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada sektor Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Barang Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam rangka optimalisasi PAD, berbagai upaya yang dilakukan antara lain penyesuaian NJOP PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar, pemutakhiran sistem informasi pajak daerah, pemantauan transaksi pajak secara elektronik, penyesuaian kompensasi pajak air tanah, sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan.

Selain upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan, capaian realisasi pajak daerah juga didukung pertumbuhan ekonomi lokal dan secara khusus perkembangan bisnis kuliner. Berkembangnya berbagai outlet merek restoran global dan nasional menyumbang kenaikan yang signifikan pada PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat mendukung pertumbuhan pajak daerah yang berbasis konsumsi sebagaimana terjadi pada PBJT dan pajak air tanah. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong tingginya transaksi jual beli tanah yang menyumbang kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan pembebasan denda PBB-P2 juga turut mendukung tercapainya target tahun 2024. Namun demikian, sentimen global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah memberikan dampak yang signifikan terhadap PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Table 2.2
Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kab Kudus TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PBB-P2	3.568.838.000	48.312.377.395	107,36
BPHTB	15.527.742.000	42.951.040.634	106,05
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	833.549.000	99.417.925.582	105,55

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
- PBJT Makanan & Minuman	16.439.112.000	17.942.926.469	109,15
- PBJT Tenaga Listrik	72.500.000.000	76.022.310.062	104,86
- PBJT Jasa Perhotelan	4.000.000.000	4.098.162.329	102,45
- PBJT Jasa Parkir	500.000.000	635.521.940	127,10
- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	750.000.000	719.004.782	95,87
Pajak Reklame	3.500.000.000	3.731.504.746	106,61
Pajak Air Tanah	4.700.000.000	4.874.863.468	103,72
Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	-	51.000.000	n.a.
Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000	7.764.400	86,27
JUMLAH	187.898.112.000	199.346.476.225	106,09

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

b. Retribusi Daerah

Dari target Rp287.334.726.000,00, Retribusi Daerah tahun 2024 realisasinya mampu melebihi target sebesar Rp318.546.358.315,00 atau 110,86%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 2.3
Capaian Hasil Retribusi Daerah Kab. Kudus TA 2024

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Retribusi Jasa Umum	269.181.554.000	303.776.558.679	112,85
Retribusi Jasa Usaha	18.003.172.000	14.461.289.253	75,19
Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000	4.514.081.320	822,30
TOTAL	287.334.726.000	318.546.358.315	110,86

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

Untuk jenis Retribusi Jasa Umum dari target Rp269.181.554.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp303.776.558.679,00 atau sebesar 112,85% dari target. Dari 4 (empat) jenis retribusi jasa umum terdapat 2 (dua) yang tidak mencapai target, yaitu pelayanan kebersihan (74,84%) dan pelayanan parkir di tepi jalan umum (90,44%). Tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum dampak adanya perbaikan jalan pada beberapa kantong parkir tepi jalan.

Tabel 2.4
Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	259.521.936.000	295.124.633.491	113,72
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.846.176.000	2.878.336.323	74,84
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.166.750.000	1.055.172.504	90,44
Retribusi Pelayanan Pasar	4.646.692.000	4.718.416.361	101,54
JUMLAH	269.181.554.000	303.776.558.679	112,85

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

Sedangkan untuk rincian Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp18.003.172.000,00 hanya terealisasi 75,19% saja atau sebesar Rp13.536.352.556,00. Terdapat 2 (dua) jenis yang mencapai target yaitu retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa (103,27%) dan penjualan produksi usaha daerah (189,75%). Adapun retribusi lain yang tidak tercapai target disebabkan adanya permohonan keringanan pad retribusi pemanfaatan asset daerah di pasar yang dikelola Dinas Perdagangan, turunnya jumlah kunjungan wisata pada retribusi tempat khusus parkir dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan. Rincian retribusi jasa usaha sebagaimana pada Tabel 2.5.

Table 2.5
Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Terminal	-	702.500	n.a.
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.872.561.000	1.688.618.500	90,18
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	309.810.000	319.950.000	103,27
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.860.000	50.024.000	96,46
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.011.490.000	2.669.399.000	88,64
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	111.255.000	211.101.000	189,75
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	12.646.196.000	8.596.557.556	67,98
JUMLAH	18.003.172.000	13.536.352.556	75,19

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

Retribusi perizinan tertentu ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.233.447.080,00 atau sebesar 822,30% dari APBD yang telah ditetapkan. Tingginya capaian retribusi perizinan tertentu disebabkan adanya asumsi pesimistis yang ditetapkan mempertimbangkan masa transisi dimulainya penerapan Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024. Selain itu, terdapat penerimaan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hasil retribusi perizinan tertentu yang terinci sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kab. Kudus TA 2023

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000	1.175.343.080	783,56
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	58.104.000	n.a.
JUMLAH	150.000.000	1.233.447.080	822,30

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp10.840.770.453,00 dari target sebesar Rp10.840.768.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terinci sebagaimana Tabel 2.7.

Table 2.7
Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Kudus TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PT. BPR BKK Kudus (Perseroda)	813.273.000	813.273.982	100,00
PT. Bank Jateng	7.485.344.000	7.485.344.602	100,00
Perumda Tirta Muria	2.476.117.000	2.476.117.354	100,00
PD Percetakan	66.034.000	66.034.515	100,00
JUMLAH	10.840.768.000	10.840.770.453	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp21.323.083.623,00 dari target sebesar Rp18.006.114.405,00 atau sebesar 84,44% dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 2.8. Tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan dikarenakan perbaikan manajemen kas akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada turunnya simpanan Pemkab pada bank persepsi dan perbedaan nilai pengembalian kelebihan bayar belanja asset tetap TA 2023.

Tabel 2.8
Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	325.000.000	1.093.034.000	336,32
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	93.850.000	n.a.
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	45.000.000	29.116.000	64,70
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000	1.821.937.628	121,46
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.790.000.000	6.246.575.335	71,06
Pendapatan Denda Pajak Daerah	315.837.000	318.998.543	101,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	540.000	3.622.442	670,82
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.122.000	4.365.834	389,11
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	184.382.623	184.382.623	100,00
Hasil Sewa BMD	-	73.500.000	n.a.
Pendapatan dari Pengembalian	4.225.637.000	4.036.443.000	95,52

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	5.935.565.000	4.100.289.000	69,08
JUMLAH	21.323.083.623	18.006.114.405	84,44

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

2.5 PENDAPATAN TRANSFER

Pada TA 2024 target pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp1.724.607.554.370,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.723.072.658.467,00 atau sebesar 99,91%. Target penerimaan ini terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar Rp1.533.655.622.535,00 terealisasi sebesar Rp1.548.396.951.853,00 atau sebesar 100,96%. Adapun pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan sebesar Rp190.951.931.835,00 dapat terealisasi sebesar Rp174.675.706.614,00 atau sebesar 91,48%. Tidak tercapainya target tersebut sejalan dengan turunnya realisasi pemungutan pajak daerah di provinsi. pendapatan transfer antar daerah bersumber baik dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan yang tidak mencapai target.

Tabel 2.9
Capaian Pendapatan Transfer TA 2024

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.533.655.622.535</i>	<i>1.548.396.951.853</i>	<i>100,96</i>
Dana Bagi Hasil (DBH)	307.826.152.000	309.765.705.000	100,63
Dana Alokasi Umum (DAU)	812.911.805.000	831.900.130.163	102,34
Dana Alokasi Khusus (DAK)	254.409.787.535	248.223.238.690	97,57
Dana Desa	138.158.391.000	138.158.391.000	100,00
Insentif Fiskal	20.349.487.000	20.349.487.000	100,00
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>190.951.931.835</i>	<i>174.675.706.614</i>	<i>91,48</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.087.649.835	160.399.061.914	91,61
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.864.282.000	14.276.644.700	89,99
JUMLAH	1.724.607.554.370	1.723.072.658.467	99,91

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama ini, akun ini menampung pendapatan hibah daerah sebagaimana diatur dalam PP 2/2012 yang diperoleh sebagai bagian dari penguatan PDAM melalui insentif pemasangan sambungan rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Pendapatan ini selanjutnya diteruskan sebagai penanaman modal pemerintah daerah kepada PDAM. Tidak tercapainya target penerimaan ini karena pemasangan SR yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dianggarkan alokasi belanja bagi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 sebesar Rp2.513.052.944.089,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.360.475.264.730,00 atau mencapai 93,93%.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 tersebut tersebar untuk membiayai pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Urusan ditambah Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Terbagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 (Delapan) Urusan Pilihan, 2 (Dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5 (Lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Adapun komposisi realisasi belanja per urusan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.10
Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Urusan TA 2024

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1.493.938.932.548	1.401.387.257.704	93,35
	1	Pendidikan	622.800.991.599	583.937.865.326	93,76
	2	Kesehatan	614.051.334.902	570.858.536.798	92,97
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.020.148.200	130.613.567.941	96,03
	4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.778.716.020	23.455.027.273	94,66

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.694.191.810	26.132.026.022	94,36
	6	Sosial	68.593.550.017	66.390.234.344	96,79
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		215.349.973.803	205.047.657.599	95,22
	7	Tenaga Kerja	14.701.863.662	13.766.267.558	93,64
	8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	603.756.830	360.676.757	59,74
	9	Pangan	711.360.000	683.889.600	96,14
	10	Pertanahan	400.000.000	259.878.400	64,97
	11	Lingkungan Hidup	15.129.291.020	14.555.369.834	96,21
	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.890.246.000	8.360.195.185	94,04
	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.884.944.528	12.357.132.067	95,90
	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.139.201.000	5.737.295.592	80,36
	15	Perhubungan	79.968.701.165	78.382.659.141	98,02
	16	Komunikasi dan Informatika	25.274.976.678	24.221.983.668	95,83
	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	799.998.950	763.627.075	95,45
	18	Penanaman Modal	7.098.878.944	6.631.003.533	93,41
	19	Kepemudaan dan Olahraga	17.446.798.380	16.168.419.954	92,67
	20	Statistik	90.600.000	73.782.062	81,44
	21	Persandian	434.803.000	408.184.022	93,88
	22	Kebudayaan	16.378.215.766	15.651.752.156	95,56
	23	Perpustakaan	7.037.879.930	6.313.411.197	89,71
	24	Kearsipan	358.457.950	352.129.798	98,23
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		74.265.482.930	65.955.395.163	88,81
	25	Kelautan dan Perikanan	1.011.327.000	930.966.795	92,05
	26	Pariwisata	3.624.617.552	3.520.648.150	97,13
	27	Pertanian	23.030.030.000	21.431.312.773	93,06
	28	Kehutanan	20.000.000	18.313.000	91,57
	29	Perdagangan	32.813.692.178	29.076.267.380	88,61
	30	Perindustrian	13.765.816.200	10.977.887.065	79,75
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		241.433.897.006	218.474.015.471	90,49
	27	Sekretariat Daerah	143.979.040.006	136.909.366.544	95,09
	28	Sekretariat DPRD	97.454.857.000	81.564.648.927	83,69
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		372.952.363.360	360.033.068.436	96,54
	29	Perencanaan	12.569.260.830	11.523.671.993	91,68
	30	Keuangan	343.855.013.590	333.669.904.692	97,04

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	31	Kepegawaian	13.277.645.740	12.071.754.924	90,92
	32	Pendidikan dan Pelatihan	2.521.800.000	2.089.581.071	82,86
	33	Penelitian dan Pengembangan	728.643.200	678.155.756	93,07
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		12.111.402.000	10.718.481.546	88,50
	34	Inspektorat Daerah	12.111.402.000	10.718.481.546	88,50
7	Unsur Kewilayahan		63.585.544.529	59.972.249.662	94,32
	35	Kecamatan	63.585.544.529	59.972.249.662	94,32
8	Unsur Pemerintahan Umum		39.415.347.913	38.940.422.149	98,80
	36	Kesatuan Bangsa dan Politik	39.415.347.913	38.940.422.149	98,80
		Jumlah	2.513.052.944.089	2.360.475.264.730	93,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah TA 2024 di Kabupaten Kudus yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- 2) Tingginya selisih NJOP PBB-P2 dibandingkan dengan harga pasar;
- 3) Rendahnya tingkat literasi digital dalam pengelolaan PDRD;
- 4) Pengelolaan data dan sistem informasi PDRD yang kurang memadai;
- 5) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan PDRD kurang memadai;
- 6) Pengelolaan BUMD yang kurang optimal;
- 7) Pemanfaatan aset daerah kurang optimal; dan
- 8) Kapasitas sumber daya yang terbatas.

Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD;
- 2) Memantapkan dasar hukum pemungutan PDRD melalui penyusunan aturan pengelolaan sesuai kebutuhan.
- 3) Melakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 lebih mendekati harga pasar;
- 4) Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah;
- 5) Melakukan pemutakhiran data dan mengembangkan sistem informasi sebagai bagian sistem pendukung keputusan;

- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan transaksi perpajakan daerah;
- 7) Memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD;
- 8) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 9) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan; dan
- 10) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten

Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(*dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				165.058.628		159.243.225	165.058.628	96,48%		Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan Masih ada yang rendah dikarenakan pencairan pada digit belanja nara sumber Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. dan Subkegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/ lembaga Realisasi anggaran belum Final karena menunggu hasil Rekonsiliasi	untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan agar disusun sebaik mungkin di setiap Triwulan, supaya target keuangan dan capaian kinerja dapat tercapai	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		164.448.629		158.639.476		96,47%				
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	Persen		100		96		96,00%			
			Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (tercantum dalam SPM)	Persen		100		98,33		98,33%			
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	Persen		97,8		99,82		102,07%			
			Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	Angka		0,39		0,39		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		91.325.771		87.881.869		96,23%				
			Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A	Persen		83,73		83,73		100,00%			
			Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik	Persen		97,3		97,3		100,00%			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		533.261		529.246		99,25%				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		3		3		100,00%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.140.000		3.071.303		97,81%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		19		19		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.600.209		1.594.388		99,64%				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		8		8		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		500.000		496.057		99,21%				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		2		2		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		1.756.706		1.747.670		99,49%				
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		8		8		100,00%			
			Pengadaan Mebel Sekolah		462.371		426.650		92,27%				
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket		6		6		100,00%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		300.000		292.725		97,57%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		2		2		100,00%			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.098.801		959.891		87,36%				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		13482		13482		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		4.052.507		3.880.297		95,75%				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		4767		4767		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		49.296.584		46.751.542		94,84%				
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dan BOS	Satuan Pendidikan		425		425		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		8.844.160		8.745.166		98,88%				
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang		425		425		100,00%			
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		1.603.623		1.603.623		100,00%				
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang		5		5		100,00%			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50.000		46.400		92,80%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		180		180		100,00%			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		25.000		25.000		100,00%				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		5		5		100,00%			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		15.000		10.095		67,30%				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		180		180		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		215.578		125.766		58,34%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		424		424		100,00%			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		130.000		66.394		51,07%				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		5		5		100,00%			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		1.750.000		1.747.712		99,87%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		10		10		100,00%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.598.411		2.571.217		98,95%				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		17		17		100,00%			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		30.000		16.950		56,50%				
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		270		270		100,00%			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		200.000		149.223		74,61%				
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		425		425		100,00%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		13.123.559		13.024.553		99,25%				
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		105		105		100,00%			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		43.936.501		42.013.894		95,62%				
				Persentase Sekoah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A	Persen		76,92		76,92		100,00%			
				Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Perta	Persen		99,15		99,15		100,00%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.099.260		2.788.389		89,97%				
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		16		16		100,00%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		633.310		632.042		99,80%				
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		1		1		100,00%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		488.713		486.024		99,45%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		3		3		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		424.395		423.406		99,77%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		4		4		100,00%			
			Pengadaan Mebel Sekolah		164.074		145.828		88,88%				
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		360.000		166.800		46,33%				
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		600		278		46,33%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		498.475		472.006		94,69%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		8		8		100,00%			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		801.332		661.538		82,55%				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		1750		1750		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.217.950		1.124.492		92,33%				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		1987		1987		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		27.800.032		26.777.819		96,32%				
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		54		54		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		7.527.960		7.512.296		99,79%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		52		52		100,00%			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		20.000		20.000		100,00%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		52		52		100,00%			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		25.000		25.000		100,00%				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		5		5		100,00%			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		10.000		10.000		100,00%				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		52		52		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		100.000		80.827		80,83%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		52		52		100,00%			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		60.000		41.650		69,42%				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		52		52		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		75.000		58.366		77,82%				
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		52		52		100,00%			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		621.000		577.412		92,98%				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		2		2		100,00%			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk		10.000		10.000		100,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		52		52		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		24.832.477		24.543.088		98,83%				
			Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM)	Persen		66,22		66,22		100,00%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1.086.232		1.086.232		100,00%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		6		6		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		928.000		926.481		99,84%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		10		10		100,00%			
			Pengadaan Perlengkapan PAUD		130.000		124.635		95,87%				
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket		300		300		100,00%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		1.238.557		1.191.522		96,20%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket		22		22		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		114.985		106.725		92,82%				
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik		25841		25841		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		7.019.784		6.880.899		98,02%				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		545		545		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		445.000		404.876		90,98%				
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		452		452		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		13.819.920		13.794.539		99,82%				
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		440		440		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		50.000		27.180		54,36%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.353.880		4.200.624		96,48%				
			Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen		100		100		100,00%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		30.000		24.857		82,86%				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		18		18		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		4.198.880		4.061.290		96,72%				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		18		18		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		99.529		89.007		89,43%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		18		18		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		25.471		25.471		100,00%				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik		2774		2774		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		310.000		306.300		98,81%				
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	Angka		67,35		67,35		100,00%			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	Angka		57,67		57,67		100,00%			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	Angka		54,78		54,78		100,00%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		235.000		231.300		98,43%				
			Persentase mulok yg ditetapkan	Persen		60		60		100,00%			
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.000		15.000		100,00%				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		4		4		100,00%			
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		40.000		40.000		100,00%				
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku		104		104		100,00%			
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.000		15.000		100,00%				
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang		35		35		100,00%			
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		165.000		161.300		97,76%				
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		4		4		100,00%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		75.000		75.000		100,00%				
			Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non	Persen		60		60		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Formal/ Kesetaraan yang ditetapkan										
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		25.000		25.000		100,00%				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		25.000		25.000		100,00%				
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku		452		452		100,00%			
			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		25.000		25.000		100,00%				
			Jumlah Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		299.999		297.449		99,15%				
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	Persen		80,67		80,67		100,00%			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		299.999		297.449		99,15%				
			Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen		77,95		77,95		100,00%			
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		275.000		274.550		99,84%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		24.999		22.899		91,60%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan		4		4		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN				93.797.570		88.399.901	93.797.570	94,25%		Banyak Kegiatan yang menyesuaikan kondisi atau keadaan potensi penyakit yang dapat menimbulkan KLB atau Bencana sehingga tidak dapat diprediksi kapan muncul dan besarnya kegiatan beberapa kegiatan memerlukan Kesesuaian kebijakan standar gizi dalam indikator sekolah sehat.	Capaian tahun 2024 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2025, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		91.510.020		86.635.817		94,67%				
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		99,08		99,08%			
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen		100		95,93		95,93%			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		95,98		95,98%			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		99,86		99,86%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen		100		100		100,00%			
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk		1,46		1,06		72,60%			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		86,2		99,27		115,16%			
			Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		99,86		99,86%			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen		50		52,27		104,54%			
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen		100		99,62		99,62%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		20.004.279		18.051.146		90,24%				
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen		100		95		95,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Persen		100		100		100,00%			
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.246.168		965.687		77,49%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		1		1		100,00%			
			Pengembangan Puskesmas		6.986.037		6.892.000		98,65%				
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit		7		7		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		2.932.237		2.485.808		84,78%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit		6		5		83,33%			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		808.617		792.927		98,06%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		145.962		107.695		73,78%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		96		96		100,00%			
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		7.885.258		6.807.030		86,33%				
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		22		22		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		70.575.617		67.815.752		96,09%				
			Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Persen		100		100		100,00%			
			Cakupan balita ditimbang	Persen		100		100		100,00%			
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen		100		95		95,00%			
			Cakupan kunjungan bayi	Persen		100		95		95,00%			
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen		100		95		95,00%			
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Persen		95		102		107,37%			
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Persen		100		100		100,00%			
			Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persen		100		80		80,00%			
			Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen		98		99,05		101,07%			
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen		79		88,12		111,54%			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		159.800		134.663		84,27%				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		14172		11705		82,59%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		65.194		55.981		85,87%				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		13461		11214		83,31%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		297.707		287.996		96,74%				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		13267		13200		99,49%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		97.401		84.557		86,81%				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		62804		62800		99,99%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		93.000		68.867		74,05%				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		138475		138475		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		151.312		146.371		96,73%				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		283561		283561		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		20.000		19.857		99,29%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		67515		67000		99,24%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		7.687		7.687		100,00%				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		123318		123318		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		661.787		631.187		95,38%				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		16956		16956		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		23.793		23.793		100,00%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		1617		1617		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2.526.762		2.454.200		97,13%				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		10969		17339		158,07%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Risiko Terinfeksi HIV		483.060		464.921		96,25%				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		17800		12915		72,56%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		35.000		7.978		22,80%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen		52		52		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		7.250.425		7.012.148		96,71%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		187.985		160.304		85,28%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		800.929		766.498		95,70%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		31		31		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		468.391		398.393		85,06%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		195.930		154.040		78,62%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		109.217		106.106		97,15%				
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		100		100		100,00%			
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1.753.038		1.531.594		87,37%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		156		156		100,00%			
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		53.231.410		51.679.587		97,08%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional		222.975		119.638		53,66%				
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Paket		50		50		100,00%			
			Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat		66.621		54.081		81,18%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		9.064		4.182		46,14%				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		301.265		228.546		75,86%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit		32		32		100,00%			
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		599.500		549.635		91,68%				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		228		228		100,00%			
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		83.920		62.753		74,78%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen		52		52		100,00%			
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		447.224		394.167		88,14%				
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit		1		1		100,00%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		20.862		18.736		89,81%				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		818		2503		305,99%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		113.040		113.040		100,00%				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		1889		17162		908,52%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		3.206		1.855		57,86%				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang		3000		3000		100,00%			
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		88.112		72.392		82,16%				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		486.276		431.713		88,78%				
			Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Persen		100		75		75,00%			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		486.276		431.713		88,78%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		10		10		100,00%			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		443.848		337.206		75,97%				
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		400.470		296.508		74,04%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		39		39		100,00%			
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		43.378		40.697		93,82%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen		11		11		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		679.597		560.174		82,43%				
			Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen		100		80		80,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota		121.811		63.216		51,90%				
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		100		70		70,00%			
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		25.000		21.159		84,64%				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		40.000		13.791		34,48%				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		920		725		78,80%			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		56.811		28.267		49,76%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		12		10		83,33%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		557.786		496.958		89,09%				
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	persen		100		80		80,00%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		557.786		496.958		89,09%				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		160		157		98,13%			
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		694.286		454.297		65,43%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		391.121		225.210		57,58%				
			Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	persen		100		80		80,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		391.121		225.210		57,58%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		180		150		83,33%			
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72.969		68.955		94,50%				
			Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		72.969		68.955		94,50%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		49.682		46.127		92,84%				
			Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	persen		100		100		100,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		49.682		46.127		92,84%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		180.514		114.006		63,16%				
			Presentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan	Persen		100		80		80,00%			
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		180.514		114.006		63,16%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit		95		84		88,42%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		913.668		749.613		82,04%				
			Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen.		81,25		81,25		100,00%			
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		397.338		342.046		86,08%				
			Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		397.338		342.046		86,08%				
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		350.000		308.167		88,05%				
			Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen		80		80		100,00%			
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		350.000		308.167		88,05%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		166.330		99.400		59,76%				
			Persentase Posyandu aktif	persen		84		84		100,00%			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		166.330		99.400		59,76%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		12		12		100,00%			
	RSUD dr. LOEKMONO HADI				56.967.592		52.849.045	56.967.592	92,77%		Terdapat kesalahan penulisan target capaian realisasi dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan.	Capaian tahun 2024 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2025, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		56.967.592		52.849.045		92,77%				
			Prosentase Sarana Prasarana sesuai Standart	Persen		86,2		86,07		99,85%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		56.967.592		52.849.045		92,77%				
			Prosentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	persen		100		83,33		83,33%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		13.952.321		11.101.546		79,57%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RS	Unit		3		3		100,00%			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		41.015.271		40.086.879		97,74%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		63		50		79,37%			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.000.000		1.660.620		83,03%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		12		12		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				119.874.506		115.022.884	119.874.506	95,95%		Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala administrasi dan perbaikan standar	keterlambatan capaian realisasi kinerja maupun anggaran hingga di akhir TW IV utamanya pada	

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		14.097.303		13.696.473		97,16%		harga satuan barang dan jasa (SSH)	kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pelelangan perlu menjadi catatan penting bahan evaluasi agar pada TA 2025 kendala terkait administrasi dan standar harga satuan barang dan jasa tidak menjadi berlarut- larut yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan fisik yang berjalan hampir bersamaan mendekati akhir tahun dan sudah memasuki musim penghujan dapat menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang kurang optimal.	
			Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen		92,38		90,43		97,89%			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.575.000		2.527.580		98,16%				
			persentase Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persen		92		92		100,00%			
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		2.475.000		2.428.330		98,11%				
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		0,4		0,8		200,00%			
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100.000		99.250		99,25%				
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen		2		2		100,00%			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		11.522.303		11.168.893		96,93%				
			persentase jaringan irigasi yg dibangun dan direhabilitasi	Persen		92,75		92,75		100,00%			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		1.050.289		1.029.892		98,06%				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		0,5		0,5		100,00%			
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		9.919.514		9.608.298		96,86%				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0,5		3,5		700,00%			
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		275.000		264.385		96,14%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diooperasikan dan Dipelihara	KM		75		75		100,00%			
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		277.500		266.318		95,97%				
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		15		15		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		7.250.266		6.966.186		96,08%				
			Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	persen		100		24,4		24,40%			
			Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	Persen		40		37,5		93,75%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota		7.250.266		6.966.186		96,08%				
			persentase Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen		100		100		100,00%			
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		400.000		398.683		99,67%				
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang		200		929		464,50%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		300.000		296.899		98,97%				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen		4		4		100,00%			
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		6.450.266		6.171.258		95,67%				
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik		6		6		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa		100.000		99.346		99,35%				
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa		20		20		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		3.721.962		3.611.336		97,03%				
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	persen		99,2		100		100,81%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.721.962		3.611.336		97,03%				
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	Persen		99,2		100		100,81%			
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		3.600.000		3.505.817		97,38%				
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M3//hari		10		10		100,00%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		121.962		105.518		86,52%				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		17.722.824		17.121.954		96,61%				
			Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	persen		67		65,18		97,28%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		17.722.824		17.121.954		96,61%				
			persentase Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	Persen		67		100		149,25%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		13.349.250		13.004.812		97,42%				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan		29		29		100,00%			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		118.576		111.138		93,73%				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		4.254.998		4.006.004		94,15%				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan		25		25		100,00%			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		6.680.017		6.147.396		92,03%				
			Rasio bangunan berijin	persen		7		5,6		80,00%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		6.680.017		6.147.396		92,03%				
			persentase rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart	Persen		55		55		100,00%			
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		6.680.017		6.147.396		92,03%				
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi	Dokumen		3		6		200,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa										
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		69.834.223		66.947.869		95,87%				
			Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	persen		94,63		91,38		96,57%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		69.834.223		66.947.869		95,87%				
			Persentase alat berat dalam kondisi baik	Persen		95,75		95,45		99,69%			
			Persentase Penyelenggaraan Jalan dan jembatan Kabupaten/Kota	Persen		93,5		91,29		97,64%			
			Pembangunan Jalan		22.780.792		22.325.175		98,00%				
			Panjang Jalan yang Dibangun	KM		5		11,2		224,00%			
			Rehabilitasi Jembatan		1.746.000		1.285.539		73,63%				
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan		1		1		100,00%			
			Pembangunan Jembatan		2.901.500		2.755.463		94,97%				
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan		2		2		100,00%			
			Rehabilitasi Jalan		42.405.931		40.581.692		95,70%				
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		2		39,8		1990,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		37.910		31.108		82,06%				
			Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	persen		52		52		100,00%			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		37.910		31.108		82,06%				
			Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih	Persen		52		52		100,00%			
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		37.910		31.108		82,06%				
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang		60		60		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		530.000		500.563		94,45%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	persen		55		55		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		293.000		287.246		98,04%				
			Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang	Persen		16		16		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota		293.000		287.246		98,04%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		100.000		99.346		99,35%				
			Persentase ketersediaan dokumen SPPR Jangka Menengah dan Jangka Pendek	Persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		100.000		99.346		99,35%				
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		137.000		113.971		83,19%				
			persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen		97		97,04		100,04%			
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		137.000		113.971		83,19%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				3.906.420		3.463.439	3.906.420	88,66%		SDM tidak sesuai dengan kompetensi dan minim kuantitas SDM, minim kualitas dan kuantitas sarpras	Tingkatkan kompetensi SDM dan optimalkan sarpras pendukung sehingga mampu merumuskan strategi dan implementasi penanganan permasalahan sesuai urusan yang diampu OPD.	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.410.222		1.251.099		88,72%				
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kab/ kota yang memperoleh fasilitasi	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			penyediaan rumah yang layak huni (SPM)										
			Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	Persen		76,52		87,65		114,55%			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Persen		100		100		100,00%			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		40.000		33.229		83,07%				
			Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		40.000		33.229		83,07%				
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.280.222		1.148.516		89,71%				
			presentase okupansi hunian rusunawa	Persen		53,03		62,96		118,73%			
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.280.222		1.148.516		89,71%				
			Jml Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		90.000		69.354		77,06%				
			Persentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		85.000		69.159		81,36%				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		5.000		195		3,90%				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		686.207		453.924		66,15%				
			Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	Persen		18,91		64,59		341,57%			
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Persen		11,1		17,24		155,32%			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		686.207		453.924		66,15%				
			Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun	Persen		25,32		22,78		89,97%			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		530.000		313.641		59,18%				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah		23		23		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		156.207		140.283		89,81%				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1.809.991		1.758.416		97,15%				
			Presentase PSU dalam kondisi baik	Persen		25		75,22		300,88%			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.809.991		1.758.416		97,15%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase perbaikan PSU perumahan	Persen		33,33		66,67		200,03%			
				Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab	Persen		53,66		64,29		119,81%			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		1.809.991		1.758.416		97,15%				
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		4		4		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					7.870.174		7.397.087	7.870.174	93,99%		Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai.	Cermati dan perhitungkan dengan tepat terkait target program/kegiatan/su b kegiatan agar capaian kinerja maksimal. Maksimalkan seluruh kemampuan sumberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja kedepan. Perhatikan aktifitas walidata karena merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah agar isian yang masih kosong segera diisi,	
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.149.394		4.777.542		92,78%				
				Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	Persen		100		100		100,00%			
				Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan	Persen		82		100		121,95%			
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4.469.754		4.171.141		93,32%				
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota		65.598		58.602		89,34%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		2.117.779		1.873.761		88,48%				
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		11.000		10.974		99,76%				
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		850		850		100,00%			
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.000		974		97,40%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		1.000		939		93,90%				
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		9		9		100,00%			
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		2.159.655		2.133.053		98,77%				
			Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan		30		30		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		108.678		89.938		82,76%				
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan		20		20		100,00%			
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		1.945		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3.100		2.900		93,55%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		31		31		100,00%			
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		678.640		605.425		89,21%				
			Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	strategi		3		3		100,00%			
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3.000		2.968		98,93%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		658.640		585.677		88,92%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		95		95		100,00%			
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		17.000		16.780		98,71%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		5		5		100,00%			
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		1.000		975		97,50%				
			Jumlah Fasilitas Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	kali		1		1		100,00%			
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		1.000		975		97,50%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		2.720.779		2.619.545		96,28%				
			Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Persen		100		57		57,00%			
			Persentase ketercapaian SPM Damkar	Persen		100		57		57,00%			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		2.714.779		2.613.545		96,27%				
			Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	jenis		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen		100		99		99,00%			
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		908.459		907.275		99,87%				
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		5		6		120,00%			
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.806.320		1.706.270		94,46%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Laporan		73		100		136,99%			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		6.000		6.000		100,00%				
			Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	obyek		482		482		100,00%			
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		6.000		6.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun gan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		12		12		100,00%			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.322.341		4.080.890	4.322.341	94,41%		Perubahan iklim dan tidak mementunya cuaca, menjadi faktor penghambat dalam tercapainya tujuan organisasi	Perkuat kesiapsiagaan terhadap bencana agar selalu siap menghadapi iklim dan cuaca tak terduga	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		4.322.341		4.080.890		94,41%				
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase penanganan darurat kebencanaan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen		17,42		50		287,03%			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		250.000		245.770		98,31%				
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		105.000		104.331		99,36%				
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen		1		1		100,00%			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		145.000		141.438		97,54%				
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang		1000		1000		100,00%			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		3.269.691		3.084.075		94,32%				
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		140.000		137.890		98,49%				
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan		10		10		100,00%			
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		73.172		68.557		93,69%				
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		150		150		100,00%			
			Penyusunan Rencana Kontijensi		19.996		19.032		95,18%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		19.979		19.979		100,00%				
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		600		600		100,00%			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		3.000		3.000		100,00%				
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		2.282.809		2.122.405		92,97%				
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit		29		29		100,00%			
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		196.166		182.882		93,23%				
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan		3		3		100,00%			
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		534.569		530.331		99,21%				
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan		12		12		100,00%			
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		729.442		703.353		96,42%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		1.000		810		81,02%				
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan		1		1		100,00%			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		471.180		468.495		99,43%				
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		38.180		36.381		95,29%				
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		20		20		100,00%			
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		217.083		195.851		90,22%				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		100		100		100,00%			
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		1.000		816		81,62%				
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen		1		1		100,00%			
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		1.000		1.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			73.207		47.693		65,15%				
				Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabencana	Persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			53.287		33.112		62,14%				
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			19.920		14.581		73,20%				
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					60.564.456		59.331.528	60.564.456	97,96%		Kurangnya Komitmen terhadap Timeline yang telah disusun, sehingga serapan anggaran tertumpu di TW 4	Masih terdapat realisasi yang melebihi 100% dan dibawah 50% yang menunjukkan kurang optimalnya kesesuaian antara target dan komitmen. Diharapkan untuk periode berikutnya target kinerja lebih dioptimalkan sesuai dengan kondisi lapangan, untuk komitmen atas target kinerja juga lebih dikuatkan. Selain itu, dalam menyusun anggaran juga diharapkan sesuai target kinerja, sehingga penyerapan anggaran lebih optimal. Penyusunan target kinerja dan rencana anggaran membutuhkan komitmen kinerja yang besar agar,	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			306.050		269.844		88,17%				
				Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	persen		85		85		100,00%			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			306.050		269.844		88,17%				
				Jumlah PSKS yang aktif dalam Penanganan PSKS	Lembaga		9		9		100,00%			
				Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	persen		85		85		100,00%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			23.800		20.498		86,13%				
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Orang		24		24		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		258.750		233.767		90,34%			dapat memberikan hasil yang baik	
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kab/ Kota	OB		108		108		100,00%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		23.500		15.579		66,29%				
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kab/ Kota	Lembaga		2		2		100,00%			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		2.427.314		2.257.284		93,00%				
			Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	persen		100		100		100,00%			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		312.009		262.659		84,18%				
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, ank terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehanilitasi sosial dasar	Orang		376		376		100,00%			
			Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan Permakanan		75.000		71.940		95,92%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		120		120		100,00%			
			Penyediaan Sandang		35.000		32.794		93,70%				
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	Orang		100		100		100,00%			
			Penyediaan Alat Bantu		69.999		67.745		96,78%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kab/Kota	Orang		50		50		100,00%			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		32.900		18.177		55,25%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Orang		15		10		66,67%			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		28.280		18.449		65,24%				
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		16		16		100,00%			
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		6.750		5.594		82,87%				
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		15		15		100,00%			
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		2.000		1.185		59,25%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		2.000		1.960		98,00%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		8.398		6.069		72,27%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan		35.983		30.491		84,74%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		8.000		5.088		63,60%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Layanan Rujukan		7.700		3.167		41,13%				
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		2.115.304		1.994.625		94,29%				
			Jumlah PPKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial	Orang		4773		4773		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial	persen		75		75		100,00%			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		9.968		9.218		92,48%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		139		139		100,00%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan		152.636		134.529		88,14%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		500		500		100,00%			
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		20.450		18.868		92,26%				
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota		1.932.250		1.832.010		94,81%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen		160		160		100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		57.503.883		56.597.891		98,42%				
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	persen		89		89		100,00%			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		57.503.883		56.597.891		98,42%				
			Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi	persen		65		65		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial	persen		4,2		4,2		100,00%			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		144.000		137.494		95,48%				
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang Didata	Orang		312435		278000		88,98%			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		2.103.714		1.806.869		85,89%				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga		48014		48014		100,00%			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		55.256.169		54.653.528		98,91%				
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		173060		190004		109,79%			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		302.210		201.355		66,63%				
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	persen		100		100		100,00%			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		281.462		182.104		64,70%				
			Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM)	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Makanan		199.514		112.367		56,32%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1000		1000		100,00%			
			Penyediaan Sandang		48.000		45.149		94,06%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Orang		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		24.948		24.588		98,56%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100		100		100,00%			
			Pelayanan Dukungan Psikososial		9.000		0		0,00%				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kab/Kota	Orang		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		20.748		19.251		92,78%				
			Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana	persen		50		50		100,00%			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		20.748		19.251		92,78%				
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		25.000		5.155		20,62%				
			Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		25.000		5.155		20,62%				
			Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan Kabupaten/ Kota	Makam		53		53		100,00%			
			Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota	kali		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		25.000		5.155		20,62%				
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam		53		53		100,00%			

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.906.249		4.717.110	4.906.249	96,14%		Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan pembangunan SIHT masih belum terlaksana sepenuhnya, pekerjaan pengadaan Instalasi Listrik, Pembangunan dan Pemasangan LPJU tidak dapat dilaksanakan karena gedung produksi belum jadi sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang sesuai perencanaan yang nantinya akan disusun dalam Renstra dan Renja yang akan datang. Mengingat beberapa permasalahan yang ada di tahun 2024 ini, penting untuk membuat sebuah perencanaan yang berbasis pada manajemen risiko, sehingga risiko2 yang mungkin akan timbul dapat direduksi semaksimal mungkin.	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		20.000		19.536		97,68%				
			Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	persen		0,4		0,73		182,50%			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		20.000		19.536		97,68%				
			Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	persen		10		10		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		20.000		19.536		97,68%				
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang		3		3		100,00%			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		4.522.250		4.339.974		95,97%				
			Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	persen		35		75		214,29%			
			Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	persen		18		19		105,56%			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		4.508.250		4.327.618		95,99%				
			Persentase peserta pelatihan yang terampil	persen		85		100		117,65%			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		4.508.250		4.327.618		95,99%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		1264		1263		99,92%			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.000		12.356		88,26%				
			Presentase LPKS yang dibina	persen		60		66,67		111,12%			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.000		12.356		88,26%				
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		25		28		112,00%			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		259.999		253.878		97,65%				
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan	persen		50		75,85		151,70%			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		45.000		42.636		94,75%				
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD	persen		50		71,8		143,60%			
			Pelayanan antar Kerja		30.000		28.402		94,67%				
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang		2250		3978		176,80%			
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		15.000		14.234		94,89%				
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		150		150		100,00%			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		180.000		177.541		98,63%				
			presentase informasi pasar kerja yang tersedia	persen		65		81,95		126,08%			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		30.000		28.440		94,80%				
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		4500		5540		123,11%			
			Job Fair/Bursa Kerja		150.000		149.101		99,40%				
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		150		174		116,00%			
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		34.999		33.701		96,29%				
			Persentase perlindungan CPMI di Kabupaten	persen		90		100		111,11%			
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		34.999		33.701		96,29%				
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		150		205		136,67%			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		104.000		103.722		99,73%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen		17		17		100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		57.000		56.759		99,58%				
			Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / PKB	persen		17		17		100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		5.000		4.928		98,56%				
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		21		21		100,00%			
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		2.000		2.000		100,00 %				
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		11		11		100,00%			
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		50.000		49.831		99,66%				
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		2		2		100,00%			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		47.000		46.963		99,92%				
			Persentase Kasus yang terselesaikan	persen		100		100		100,00%			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		17.000		17.000		100,00 %				
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		5		5		100,00%			
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.000		1.963		98,15%				
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara		10		10		100,00%			
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		5.000		5.000		100,00 %				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		15.000		15.000		100,00 %				
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga		1		1		100,00%			
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		8.000		8.000		100,00 %				
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		70		70		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				603.757		360.677	603.757	59,74%		Kurangnya Komitmen terhadap Timeline yang telah disusun, sehingga serapan anggaran tertumpu di TW 4	Masih terdapat realisasi yang melebihi 100% dan dibawah 50% yang menunjukan kurang optimalnya kesesuaian antara target dan komitmen. Diharapkan untuk periode berikutnya target kinerja lebih dioptimalkan sesuai dengan kondisi lapangan, untuk komitmen atas target kinerja juga lebih dikuatkan. Selain itu, dalam menyusun anggaran juga diharapkan sesuai target kinerja, sehingga penyerapan anggaran lebih optimal. Penyusunan target kinerja dan rencana anggaran membutuhkan komitmen kinerja yang besar agar, dapat memberikan hasil yang baik	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		204.931		71.983		35,13%				
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD	persen		42		43		102,38%			
			Persentase Perempuan yang bekerja	persen		93,3		94		100,75%			
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		84.931		49.344		58,10%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	Persen		91,18		100		109,67%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota		84.931		49.344		58,10%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		120.000		22.639		18,87%				
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen		3		0		0,00%			
			Jumlah perempuan yang diberdayakan melalui pelatihan keterampilan	Orang		48		0		0,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		120.000		22.639		18,87%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		6		1		16,67%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		33.895		21.025		62,03%				
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	persen		100		100		100,00%			
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		19.997		12.646		63,24%				
			Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	persen		80		80		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		19.997		12.646		63,24%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		13.898		8.379		60,29%				
			Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		9.498		8.013		84,37%				
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		10		10		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		4.399		366		8,32%				
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		10		6		60,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		9.999		6.896		68,97%				
			Persentase Data SIGA yang tervalidasi	persen		100		100		100,00%			
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		9.999		6.896		68,97%				
			Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		9.999		6.896		68,97%				
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		292.953		205.438		70,13%				
			Persentase Forum Anak yang aktif	persen		62		62		100,00%			
			Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak	persen		20		20		100,00%			
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		44.957		28.175		62,67%				
			Persentase Lembaga Layanan anak Yang Telah Memiliki SPM	Persen		70		70		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		44.957		28.175		62,67%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		247.997		177.263		71,48%				
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		6		6		100,00%			
			Jumlah forum anak terbina	Lembaga		8		8		100,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		247.997		177.263		71,48%				
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		61.979		55.335		89,28%				
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		32.497		29.951		92,17%				
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan	Orang		15		10		66,67%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		32.497		29.951		92,17%				
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang		18		10		55,56%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		29.482		25.384		86,10%				
			Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		29.482		25.384		86,10%				
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen		1		1		100,00%	Keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana aparatur sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan terlambat	Penentuan target kinerja untuk tahun berikutnya agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				711.360		683.890	711.360	96,14%				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		35.691		33.774		94,63%				
			Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya	Persen		65,22		73,9		113,31%			
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		35.691		33.774		94,63%				
			Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan	unit		15		17		113,33%			
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		35.691		33.774		94,63%				
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit		4		4		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		480.249		472.790		98,45%				
			Persentase ketersediaan pangan utama	Persen		100		113,83		113,83%			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		272.099		270.161		99,29%				
			Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		163.038		162.769		99,84%				
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit		8		8		100,00%			
			Pemantauan Stok Pangan		18.844		18.246		96,82%				
3			Informasi Stok Pangan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		90.217		89.146		98,81%				
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan		48		48		100,00%			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		151.690		147.853		97,47%				
			Jumlah cadangan pangan yang tersedia dalam kondisi baik	ton		15		15		100,00%			
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		140.150		139.238		99,35%				
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton		15		15		100,00%			
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		11.540		8.615		74,65%				
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton		15		15		100,00%			
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		56.460		54.776		97,02%				
			Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya	Persen		55,17		55,17		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		56.460		54.776		97,02%				
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		16		16		100,00%			
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		120.420		104.250		86,57%				
			Persentase daerah rawan pangan	Persen		12,9		7,57		58,68%			
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		120.420		104.250		86,57%				
			Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi	desa		18		18		100,00%			
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.000		11.181		74,54%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		12		12		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		105.420		93.069		88,28%				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan		20		20		100,00%			
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		75.000		73.076		97,43%				
			Persentase pangan segar aman konsumsi	Persen		88		83,3		94,66%			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		75.000		73.076		97,43%				
			Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	Persen		100		100		100,00%			
			Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji	Persen		82		83,3		101,59%			
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		75.000		73.076		97,43%				
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		12		12		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				400.000		259.878	400.000	64,97%		Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala administrasi dan perbaikan standar harga satuan barang dan jasa (SSH)	keterlambatan capaian realisasi kinerja maupun anggaran hingga di akhir TW IV utamanya pada kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pelelangan perlu menjadi catatan penting bahan evaluasi agar pada TA 2025 kendala terkait administrasi dan standar harga satuan barang dan jasa tidak menjadi berlarut-larut yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan fisik yang berjalan hampir	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		137.500		17.478		12,71%				
			Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	persen		90		91,57		101,74%			
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		137.500		17.478		12,71%				
			Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		137.500		17.478		12,71%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		262.500		242.400		92,34%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	persen		60		50		83,33%		bersamaan mendekati akhir tahun dan sudah memasuki musim penghujan dapat menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang kurang optimal.	
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		262.500		242.400		92,34%				
			Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		262.500		242.400		92,34%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				15.129.291		13.978.977	15.129.291	92,40%		SDM tidak sesuai dengan kompetensi dan minim kuantitas SDM, minim kualitas dan kuantitas sarpras	Tingkatkan kompetensi SDM dan optimalkan sarpras pendukung sehingga mampu merumuskan strategi dan implementasi penanganan permasalahan sesuai urusan yang diampu OPD.	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		195.000		182.918		93,80%				
			Persentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		125.000		121.867		97,49%				
			Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		125.000		121.867		97,49%				
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokuman		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		70.000		61.051		87,22%				
			Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		40.000		32.584		81,46%				
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		30.000		28.467		94,89%				
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		575.882		554.824		96,34%				
			Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persen		87,54		100		114,23%			
			Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persen		8,33		19,23		230,85%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		575.882		554.824		96,34%				
			Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		280.000		273.883		97,82%				
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		160.000		157.213		98,26%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		135.882		123.728		91,06%				
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		2.394.570		2.105.824		87,94%				
			Persentase ruang terbuka hijau	Persen		8,1128		8,0083		98,71%			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		2.394.570		2.105.824		87,94%				
			Persentase KeanekaragamanHayati dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		2.364.570		2.087.241		88,27%				
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		29,24		29,24		100,00%			
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		30.000		18.583		61,94%				
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		5.000		4.656		93,12%				
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	Persen		55,26		80		144,77%			
			Penyimpanan Sementara Limbah B3		5.000		4.656		93,12%				
			Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan	Persen		33,33		17,24		51,73%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		5.000		4.656		93,12%				
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		20.000		15.696		78,48%				
			Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persen		79,87		82,91		103,81%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20.000		15.696		78,48%				
			Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan	Persen		48,89		50,16		102,60%			
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		20.000		15.696		78,48%				
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha		154		158		102,60%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		327.199		261.032		79,78%				
			persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Persen		54		89,41		165,57%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		327.199		261.032		79,78%				
			Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga pengelolaan LH yang terbentuk	lembaga		150		170		113,33%			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		20.000		15.918		79,59%				
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat		307.199		245.114		79,79%				
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga		135		194		143,70%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		145.000		124.256		85,69%				
			Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi	Persen		87,5		72,58		82,95%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Dacrah Kabupaten/Kota		145.000		124.256		85,69%				
			jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup	entitas		7		45		642,86%			
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		145.000		124.256		85,69%				
			Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		8		62		775,00%			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		20.000		15.715		78,58%				
			Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	Persen		100		100		100,00%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		20.000		15.715		78,58%				
			Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti	Persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota		20.000		15.715		78,58%				
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		11.446.641		10.714.056		93,60%				
			Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	Persen		71		49,32		69,46%			
			Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/ reduce, pemanfaatan sampah/ reuse, daur ulang/ recycled) dari sumber sampah	Persen		28		27,96		99,86%			
			Pengelolaan Sampah		11.446.641		10.714.056		93,60%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen		71		49,32		69,46%			
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		2.665.098		2.403.054		90,17%				
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen		0,23		0,23		100,00%			
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		3.873.924		3.466.430		89,48%				
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusatpengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		119,484		44634,38546		37355,95%			
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		4.907.619		4.844.572		98,72%				
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton		47114,2		44622,23		94,71%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.747.837		3.577.158	3.747.837	95,45%		1. Kompetensi SDM penyelenggara pelayanan penerbitan dokumen kependudukan belum memadai; 2. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum optimal; 3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan dan	Cermati dan perhitungkan dengan tepat terkait target program/kegiatan/ sub kegiatan agar capaian kinerja maksimal. Maksimalkan seluruh kemampuan suberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2.175.901		2.073.727		95,30%				
			Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen		89		90,32		101,48%			
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2.175.901		2.073.727		95,30%				
			Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	dokumen		114050		101529		89,02%			
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2.175.901		2.073.727		95,30%				
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		826.702		813.457		98,40%				
			Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen		100		86,83		86,83%			
			Pelayanan Pencatatan Sipil		826.702		813.457		98,40%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD	
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil, pewarganegaraan) sesuai standar	dokumen		31179		26062		83,59%	pemutakhiran data kependudukan; 4. Koordinasi lintas sektoral terkait pemanfaatan data kependudukan dalam optimalisasi pelayanan publik belum memadai; 5. Penyelenggaraan tata kelola Sistim Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 di Perangkat Daerah masih rendah; 6. Kurangnya efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran kinerja; 7. Kompetensi SDM Perencana yang kurang memadai	kedepan. Perhatikan aktifitas walidata karena merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah agar isian yang masih kosong segera didisi.		
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		826.702		813.457		98,40%					
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan		9		9		100,00%				
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		745.235		689.974		92,58%					
			Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	Persen		100		100		100,00%				
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		745.235		689.974		92,58%					
			Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan terbaru sesuai standar	proposal		2		1		50,00%				
			Jumlah penyajian data kependudukan (Buku Agregat Semester I dan II dan Buku Profil Kependudukan)	dokumen		3		3		100,00%				
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		745.235		689.974		92,58%					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		12		12		100,00%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.612.837		6.545.772	6.612.837	98,99%		- Pengiriman diklat disesuaikan dengan penawaran yang masuk di dinas PMD - Proses penyusunan Ranperbup terhambat dengan ketentuan - Terdapat sub kegiatan yang outputnya hampir sama	1. sesuaikan target 2025 dengan target renstra 2024-2026 yang telah disusun; 2. lebih cermat dalam penyusunan target kinerja pertriwulanan.		
			PROGRAM PENATAAN DESA		3.071.201		3.205.641		104,38 %					
			Prosentase desa yang tertata	Persen		2		2		100,00%				
			Penyelenggaraan Penataan Desa		3.071.201		3.205.641		104,38 %					
			Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa	Persen		2		2		100,00%				
			Fasilitasi Tata Wilayah Desa		5.000		4.430		88,60%					
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa		1		1		100,00%				
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		5.000		4.398		87,96%					
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	Desa		1		1		100,00%				
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		3.061.201		3.196.813		104,43					

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit		7		7		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		115.000		101.802		88,52%				
			Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	Persen		10		8		80,00%			
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa		115.000		101.802		88,52%				
			Jumlah Kerjasama Desa	Desa		119		119		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		10.000		6.685		66,85%				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		10.000		9.679		96,79%				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		95.000		85.438		89,94%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		2.583.463		2.500.225		96,78%				
			nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai		115		115		100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		2.583.463		2.500.225		96,78%				
			Nilai variabel aset desa	Nilai		25		25		100,00%			
			Nilai variabel integritas pemdes	Nilai		20		20		100,00%			
			Nilai variabel kelembagaan pemdes	Nilai		20		20		100,00%			
			Nilai variabel keuangan desa	Nilai		25		25		100,00%			
			Nilai variabel perencanaan desa	Nilai		25		25		100,00%			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		15.000		14.644		97,63%				
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		40.000		38.611		96,53%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		12.250		11.509		93,95%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Dokumen		123		123		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Desa										
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		75.000		73.466		97,95%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		1.583.974		1.581.338		99,83%				
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		1107		1304		117,80%			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		5.000		4.978		99,56%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan		25		60		240,00%			
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		5.000		4.975		99,50%				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		15		15		100,00%			
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		153.070		150.747		98,48%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		35.000		31.922		91,21%				
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		27.251		22.336		81,96%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		201.918		187.235		92,73%				
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen		123		123		100,00%			
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		10.000		9.565		95,65%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		50.000		49.580		99,16%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		30.000		29.900		99,67%				
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		369		369		100,00%			
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		100.000		65.316		65,32%				
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		5		16		320,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		10.000		9.520		95,20%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		50.000		48.827		97,65%				
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		180.000		165.758		92,09%				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		843.173		738.105		87,54%				
			nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai		33		33		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		843.173		738.105		87,54%				
			Nilai lembaga ekonomi desa	Nilai		13		13		100,00%			
			Nilai lembaga kemasyarakatan desa	Nilai		13		13		100,00%			
			Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakat lainnya	Nilai		7		7		100,00%			
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		100.000		90.634		90,63%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		2		2		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		101.541		97.785		96,30%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Lembaga		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		9.900		8.815		89,04%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		60.000		46.106		76,84%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		57.732		55.311		95,81%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		3		3		100,00%			
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		4.000		3.990		99,75%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		510.000		435.464		85,39%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.139.201		5.737.496	7.139.201	80,37%		Kurangnya Komitmen terhadap Timeline yang telah disusun, sehingga serapan anggaran tertumpu di TW 4	Masih terdapat realisasi yang melebihi 100% dan dibawah 50% yang menunjukan kurang optimalnya kesesuaian antara target dan komitmen. Diharapkan untuk periode berikutnya target kinerja lebih dioptimalkan sesuai dengan	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		368.600		147.938		40,14%				
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen		45		40		88,89%			
			Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun		20		21		105,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		25.000		976		3,90%		kondisi lapangan, untuk komitmen atas target kinerja juga lebih dikuatkan. Selain itu, dalam menyusun anggaran juga diharapkan sesuai target kinerja, sehingga penyerapan anggaran lebih optimal. Penyusunan target kinerja dan rencana anggaran membutuhkan komitmen kinerja yang besar agar, dapat memberikan hasil yang baik		
			Presentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat)	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		25.000		976		3,90%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		343.600		146.962		42,77%				
			Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana	Persen		100		80		80,00%			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		147.600		48.600		32,93%				
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		156.000		66.260		42,47%				
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		40.000		32.102		80,26%				
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2.315.401		1.420.491		61,35%				
			Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	persen		72,62		71,18		98,02%			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	persen		13,85		6,09		43,97%			
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen		15,4		13,85		89,94%			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.030.840		693.890		67,31%				
			Persentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen		10,72		10,8		100,75%			
			Pengendalian Program KKBPK		80.000		46.027		57,53%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		396.800		285.302		71,90%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		1		1		100,00%			
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		135.000		66.528		49,28%				
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan		9		6		66,67%			
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		169.040		120.104		71,05%				
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen		1		1		100,00%			
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		250.000		175.929		70,37%				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisa si		1		1		100,00%			
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		396.000		345.000		87,12%				
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen		100		100		100,00%			
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		396.000		345.000		87,12%				
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		132		132		100,00%			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		802.311		353.866		44,11%				
			Persentase Faskes yg aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	Persen		87,9		87		98,98%			
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan		62.420		29.743		47,65%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jejaringsnya										
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Laporan		12		12		100,00%			
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		721.891		320.718		44,43%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		1363		1363		100,00%			
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringsnya		18.000		3.405		18,92%				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Laporan		1		1		100,00%			
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		86.250		27.735		32,16%				
			Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	Persen		50		50		100,00%			
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		3.750		420		11,20%				
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		82.500		27.315		33,11%				
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung		9		9		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		4.455.200		4.169.067		93,58%				
			Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif	Persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		335.000		264.447		78,94%				
			Persentase UPPKA Aktif	Persen		27,27		27		99,01%			
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		300.000		233.615		77,87%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit		25		25		100,00%			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		35.000		30.832		88,09%				
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok		9		9		100,00%			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4.120.200		3.904.620		94,77%				
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)		1.962.000		1.962.000		100,00 %				
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)	Laporan		1		1		100,00%			
			Persentase Pemantauan Data Keluarga Berisiko Stunting	persen		80		80		100,00%			
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)		2.158.200		1.942.620		90,01%				
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan		9		9		100,00%	Keterbatasan anggaran untuk study keselamatan jalan pendukung pelayanan transportasi	perlu upaya peningkatan pemenuhan infrastruktur pendukung keselamatan jalan yang memadai dan sesuai standar. upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi masal berbasis jalan yang efisien, aman, dan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN				63.713.979		62.959.120	63.713.979	98,82%				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		63.713.979		62.959.120		98,82%				
			Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persen		87,69		87,69		100,00%			
			Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen		79		79		100,00%			
			Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persen		81		74		91,36%		nyaman dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada urusan perhubungan lakukan pencermatan target kinerja pada program/keg/subk eg dan periksa ulang kembali target kinerja apabila terdapat perubahan anggaran untuk dilakukan penyesuaian. agar kesalahan pencantuman target pada rahun 2023 tidak terulang kembali	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		143.002		142.361		99,55%				
			Jumlah dokumen perencanaan LLAJ	Dok		5		5		100,00%			
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		143.002		142.361		99,55%				
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dok		5		5		100,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		61.235.460		60.741.211		99,19%				
			Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persen		67		67		100,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		20.872.373		20.636.787		98,87%				
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		631		631		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		40.363.087		40.104.425		99,36%				
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		200		200		100,00%			
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		174.082		160.158		92,00%				
			Cakupan Terminal Penumpang Tipe c Dalam Kondisi Baik	Persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C		45.599		36.701		80,49%				
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang		30		4		13,33%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		128.483		123.457		96,09%				
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1		1		100,00%			
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		1.468.245		1.271.381		86,59%				
			Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan FasilitasPparkir	Persen		40		40		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		1.468.245		1.271.381		86,59%				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		326.584		299.469		91,70%				
			Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen		93		93		100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		206.584		182.500		88,34%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		9		9		100,00%			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		120.000		116.969		97,47%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		9		9		100,00%			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		69.107		62.328		90,19%				
			Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	Persen		45		45		100,00%			
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		69.107		62.328		90,19%				
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		297.500		282.212		94,86%				
			Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Operator		10		10		100,00%			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		297.500		282.212		94,86%		Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari	Capaian IKU sangat baik, Capaian Program , Kegiatan dan subkegiatan di atas 90%, agar diertahankan dan ditingkatkan untuk yang belum mencapai 100%. Agar dipenuhi keterisian data sebagaimana tertuang di e walidata urusan	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.524.951		12.021.811	12.524.951	95,98%				
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		9.738.526		9.533.475		97,89%				
			Nilai Survey Kepuasan Publik	nilai		82		83,7		102,07%			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		9.738.526		9.533.475		97,89%				
			Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	persen		100		100		100,00%			
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		192.480		189.124		98,26%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen		8		8		100,00%	Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.	kominfo, statistik dan persandian yang notabene adalah hasil kinerja di tingkat aktivitas ataupun subkegiatan yang tidak terlihat pada laporan evarenya ini yaitu an : Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah, Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas, Audit TIK Internal, eksternal, Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik, Strategi Komunikasi Publik yang disusun, Konten Audio Video, Konten Audio, Pertemuan tatap muka, KIM, Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data (urusan statistik), Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, Laporan	
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		325.200		259.181		79,70%				
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		215		461		214,42%			
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		8.550.712		8.452.306		98,85%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		263		238		90,49%			
			Pelayanan Informasi Publik		82.786		71.988		86,96%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		25		26		104,00%			
			Layanan Hubungan Media		293.825		274.716		93,50%				
			Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		2		2		100,00%			
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		53.180		52.730		99,15%				
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		240.343		233.430		97,12%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit		5		5		100,00%			
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		2.786.426		2.488.336		89,30%				
			Nilai SPBE domain tata kelola	nilai		4,4		3,9		88,64%			
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.458.099		2.197.604		89,40%				
			Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	persen		70		70		100,00%			
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2.458.099		2.197.604		89,40%				
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		209		209		100,00%			
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		328.327		290.731		88,55%				
			Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	aplikasi		94		94		100,00%			
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		59.822		57.445		96,03%				
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit		1		1		100,00%			
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		105.600		98.949		93,70%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit		1		1		100,00%		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik, Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (urusan persandian).	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		162.905		134.338		82,46%				
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				799.999		763.627	799.999	95,45%		Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan pembangunan SIHT masih belum terlaksana sepenuhnya, pekerjaan pengadaan Instalasi Listrik, Pembangunan dan Pemasangan LPJU tidak dapat dilaksanakan karena gedung produksi belum jadi sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang sesuai perencanaan yang nantinya akan disusun dalam Renstra dan Renja yang akan datang. Mengingat beberapa permasalahan yang ada di tahun 2024 ini, penting untuk membuat sebuah perencanaan yang berbasis pada manajemen risiko, sehingga risiko2 yang mungkin akan timbul dapat direduksi semaksimal mungkin.	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		50.000		48.702		97,40%				
			Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	persen		5		5,58		111,60%			
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000		48.702		97,40%				
			Presentase Koperasi yang terverifikasi izin usaha simpan pinjam	persen		5		5,58		111,60%			
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000		48.702		97,40%				
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha		15		15		100,00%			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		100.000		98.301		98,30%				
			Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	persen		20		25,9		129,50%			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.000		98.301		98,30%				
			Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya	persen		45		51,2		113,78%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		100.000		98.301		98,30%				
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		85		85		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		299.999		277.338		92,45%				
			Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya	persen		33		33		100,00%			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		299.999		277.338		92,45%				
			Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil	persen		75		75		100,00%			
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		50.000		41.187		82,37%				
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha		60		60		100,00%			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		50.000		38.407		76,81%				
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha		64		64		100,00%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		200.000		197.744		98,87%				
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang		50		50		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		350.000		339.286		96,94%				
			Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	persen		22		22		100,00%			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		350.000		339.286		96,94%				
			Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern	persen		22		22		100,00%			
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		350.000		339.286		96,94%				
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		60		60		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1.352.048		1.117.628	1.352.048	82,66%		1. Regulasi Perizinan Berusaha belum selesai diharmonisasi sehingga pelaksanaan	buat timeline dan dipatuhi dalam menyusun perbub. tingkatkan komitmen perizinan prasarana yang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		175.425		162.142		92,43%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	persen		50		50		100,00%	perizinan berusaha belum berjalan optimal. 2. Regulasi Pemberian insentif dan kemudahan berusaha masih dalam bentuk draft dan materi masih dibahas lebih lanjut dengan OPD terkait. 3. Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis dalam pelaksanaan pengawasan ke pelaku usaha. 4. Potensi dan peluang investasi yang kurang menarik di Kudus karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. 5. Belum optimalnya kegiatan promosi potensi dan peluang investasi yang telah dilaksanakan.	dibutuhkan. sering koordinasi dengan OPD terkait perkembangan proses. target yang belum terlaksana di tahun 2024 agar di evaluasi dan di tingkatkan lagi untuk kedepannya.	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		6.735		3.865		57,39%				
			Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	investor		10		5		50,00%			
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		6.735		3.865		57,39%				
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		1		0,7		70,00%			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		168.690		158.277		93,83%				
			Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		168.690		158.277		93,83%				
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		181.821		128.218		70,52%				
			Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	persen		10		10		100,00%			
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		181.821		128.218		70,52%				
			Prosentase pelaksanaan promosi	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		181.821		128.218		70,52%				
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		275.007		266.113		96,77%				
			IKM atas pelayanan perizinan	indeks		96		88,08		91,75%			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota		275.007		266.113		96,77%				
			Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	persen		90		90,5		100,56%			
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		268.803		259.973		96,71%				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		1300		1797		138,23%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		6.204		6.140		98,97%				
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		700		763		109,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		641.286		483.275		75,36%				
			Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	persen		75		31		41,33%			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		641.286		483.275		75,36%				
			Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	persen		72		26,05		36,18%			
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya		83.943		53.384		63,60%				
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha.		12		24		200,00%			
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		345.397		318.320		92,16%				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha		324		469		144,75%			
			Pengawasan Penanaman Modal		211.946		111.571		52,64%				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha		190		334		175,79%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		78.509		77.880		99,20%				
			Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	persen		92		100		108,70%			
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		78.509		77.880		99,20%				
			Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	persen		100		100		100,00%			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		78.509		77.880		99,20%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		12		12		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				17.446.798		16.164.090	17.446.798	92,65%		Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan Masih ada yang rendah dikarenakan pencairan pada digit belanja nara sumber Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. dan Subkegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/lembaga Realisasi anggaran belum Final karena menunggu hasil Rekonsiliasi	untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan agar disusun sebaik mungkin di setiap Triwulan, supaya target keuangan dan capaian kinerja dapat tercapai	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		790.000		745.221		94,33%				
			Presentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		96,96		96,96		100,00%			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		490.000		475.005		96,94%				
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen		96,96		96,96		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		40.000		39.999		100,00 %				
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		8		8		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		100.000		92.400		92,40%				
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		70		70		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		150.000		146.270		97,51%				
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		900		900		100,00%			
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		200.000		196.336		98,17%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		300.000		270.216		90,07%				
			Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan	Persen		51,52		51,52		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		100.000		75.995		76,00%				
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang		70		70		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		200.000		194.221		97,11%				
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		4		4		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		16.256.798		15.018.869		92,39%				
			Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen		4,76		4,76		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8.688.448		7.663.979		88,21%				
			Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik	Persen		50		50		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		8.688.448		7.663.979		88,21%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit		8		8		100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.583.350		1.467.090		92,66%				
			Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi	Orang		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		1.583.350		1.467.090		92,66%				
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		4		4		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		1.020.000		922.800		90,47%				
			Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang		170		170		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		1.000.000		903.540		90,35%				
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang		400		400		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		20.000		19.260		96,30%				
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		4.815.000		4.815.000		100,00 %				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	Persen		92,31		92,31		100,00%			
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan		4.815.000		4.815.000		100,00 %				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi		2		2		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		150.000		150.000		100,00 %				
			Persentase perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	Persen		100		100		100,00%			
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		150.000		150.000		100,00 %				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		400.000		400.000		100,00 %				
			Persentase organisasi Pramuka yang aktif	Persen		100		100		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		400.000		400.000		100,00 %				
			Persentase anggota kepramukaan yang dibina	Persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		400.000		400.000		100,00 %				
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				90.600		73.782	90.600	81,44%				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		90.600		73.782		81,44%				
			Indeks Pembangunan Statistik	indeks		2,8		2,88		102,86%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		90.600		73.782		81,44%				
			Persentase ketercukupan data statistik sektoral	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		25.600		13.497		52,72%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		65.000		60.285		92,75%		regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.	ini yaitu an : Perangkat keras ppheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah, Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas, Audit TIK Internal, eksternal, Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik, Strategi Komunikasi Publik yang disusun, Konten Audio Video, Konten Audio, Pertemuan tatap muka, KIM, Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data (urusan statistik), Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik, Laporan Pengelolaan	
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang		60		70		116,67%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (urusan persandian).	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					434.803		408.184	434.803	93,88%		Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.	Capaian IKU sangat baik, Capaian Program , Kegiatan dan subkegiatan di atas 90%, agar diertahankan dan ditingkatkan untuk yang belum mencapai 100%. Agar dipenuhi keterisian data sebagaimana tertuang di e walidata urusan kominfo, statistik dan persandian yang notabene adalah hasil kinerja di tingkat aktivitas ataupun subkegiatan yang tidak terlihat pada laporan evarenja ini yaitu an : Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah, Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas, Audit TIK Internal, eksternal, Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik, Strategi Komunikasi Publik yang disusun, Konten Audio	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			434.803		408.184		93,88%				
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks		324		324		100,00%			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			434.803		408.184		93,88%				
				Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	persen		54		54		100,00%			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			337.150		321.927		95,48%				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			97.653		86.257		88,33%				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangka t Daerah		7		7		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Video, Konten Audio, Pertemuan tatap muka, KIM, Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data (urusan statistik), Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik, Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (urusan persandian).	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					5.095.126		5.037.282	5.095.126	98,86%		Ada realisasi kinerja yang jauh dari target yaitu jumlah kunjungan Museum (Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam) dikarenakan di saat peak season dan high season	1. Pencapaian target dengan target renstra/RPD yang telah ditetapkan; 2. Dalam Pengembangan pariwisata dan pemajuan kebudayaan daerah tetap mempedomani dokumen	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.578.211		2.558.756		99,25%				
				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persentase		78		79,85		102,37%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.578.211		2.558.756		99,25%				
				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persentase		75		96,58		128,77%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1.438.211		1.418.756		98,65%		liburan di awal tahun dan akhir tahun kunjunganya jauh dari target dikarenakan kendala cuaca buruk	perencanaan/rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk PPKD agar diakselerasi agar sinkron dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		50		210		420,00%			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		1.140.000		1.140.000		100,00%				
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		50		67		134,00%			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		331.335		325.337		98,19%				
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase		70		79,7		113,86%			
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		20.000		17.963		89,82%				
			Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Persentase		10		19,6		196,00%			
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		10.000		9.502		95,02%				
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek		380		453		119,21%			
			Penetapan Cagar Budaya		10.000		8.461		84,61%				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		88		89		101,14%			
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		311.335		307.374		98,73%				
			Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	Persentase		70		79,7		113,86%			
			Pelindungan Cagar Budaya		201.341		199.598		99,13%				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		225		361		160,44%			
			Pengembangan Cagar Budaya		69.994		68.926		98,47%				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		1		1		100,00%			
			Pemanfaatan Cagar Budaya		40.000		38.851		97,13%				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek		1		2		200,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		2.185.580		2.153.188		98,52%				
			Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	Persentase		10		1,9		19,00%			
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		2.185.580		2.153.188		98,52%				
			Jumlah Kunjungan Museum	Orang		90000		81379		90,42%			
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		508.649		502.273		98,75%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit		10617		11562		108,90%			
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		767.739		748.310		97,47%				
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit		7		7		100,00%			
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		909.192		902.606		99,28%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		51		51		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				1.557.336		1.417.959	1.557.336	91,05%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi ,sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar	Dalam penyusunan target dan indikator supaya lebih cermat, Untuk capaian yang melebihi target supaya kedepannya disesuaikan lagi. Perencanaan manajemen waktu pelaksanaan supaya disusun dengan cermat, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1.557.336		1.417.959		91,05%				
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai		24,73		80		323,49%			
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		175.735		166.299		94,63%				
			Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional	persen		5,65		5,65		100,00%			
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		90.126		89.986		99,84%				
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		10		10		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.544		3.906		85,95%				
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		81.065		72.407		89,32%				
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar		45503		47769		104,98%			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.381.600		1.251.660		90,59%				
			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	persen		2,12		2,12		100,00%			
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		47.456		47.356		99,79%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		110		120		109,09%	realisasi capaian indikator dapat dicapai		
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.300.000		1.170.543		90,04%				
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan		1		1		100,00%			
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		34.144		33.761		98,88%				
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan		4		4		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				358.458		352.130	358.458	98,23%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target , yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi ,sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada	Dalam penyusunan target dan indikator supaya lebih cermat, Untuk capaian yang melebihi target supaya kedepannya disesuaikan lagi. Perencanaan manajemen waktu pelaksanaan supaya disusun dengan cermat, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		347.722		341.446		98,20%				
			persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	persen		34,9		36,43		104,38%			
			persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	persen		57,89		57,89		100,00%			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota		333.834		328.388		98,37%				
			Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip	persen		59,1		60,61		102,55%			
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		127.605		126.395		99,05%				
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas		52000		52000		100,00%			
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		181.621		177.618		97,80%				
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		13		16		123,08%			
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		24.608		24.375		99,05%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		22		33		150,00%			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		9.660		9.200		95,24%				
			Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK	persen		12		15,79		131,58%			
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		9.660		9.200		95,24%				
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		75		85		113,33%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		4.228		3.858		91,24%		triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai		
			Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	persen		33		33		100,00%			
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		4.228		3.858		91,24%				
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna		25		28		112,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		10.736		10.684		99,52%				
			persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	persen		33,5		36,43		108,75%			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		5.300		5.300		100,00 %				
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	persen		14,7		15,15		103,06%			
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		5.300		5.300		100,00 %				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		100		597		597,00%			
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		1.500		1.500		100,00 %				
			Persentase arsip yang terselamatkan	persen		0,13		0,13		100,00%			
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		1.500		1.500		100%				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		25		77		308,00%			
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		3.000		3.000		100,00 %				
			Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan	persen		0,13		0,13		100,00%			
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		1.500		1.500		100,00 %				
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kab/Kota	Daftar		50		95		190,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		1.500		1.500		100,00 %				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip		0		0		0%			
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		936		884		94,44%				
			Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi	persen		0,32		0,32		100,00%			
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		936		884		94,44%				
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		400		400		100,00%			

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				1.011.327		930.967	1.011.327	92,05%		Keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana aparaturnya sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan terlambat	Penentuan target kinerja untuk tahun berikutnya agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		72.508		65.378		90,17%				
			Persentase nelayan yang berdaya	Persen		96,83		100		103,27%			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		47.839		46.035		96,23%				
			Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan	unit		8		8		100,00%			
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		47.839		46.035		96,23%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit		8		8		100,00%			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		24.669		19.343		78,41%				
				Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina	Persen		96,67		100		103,44%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		24.669		19.343		78,41%				
				Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok		29		32		110,34%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		878.021		809.472		92,19%				
				Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	Persen		98,46		96,92		98,44%			
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		45.609		38.764		84,99%				
				Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya	Orang		45		45		100,00%			
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		45.609		38.764		84,99%				
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		30		30		100,00%			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		832.412		770.708		92,59%				
				Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan	unit		17		17		100,00%			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		832.412		770.708		92,59%				
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		17		17		100,00%			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		60.798		56.117		92,30%				
				Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	Persen		98,91		92,3		93,32%			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		60.798		56.117		92,30%				
				Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil	Persen		96		92,3		96,15%			
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		60.798		56.117		92,30%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		48		48		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				3.624.618		3.520.648	3.624.618	97,13%		Ada realisasi kinerja yang jauh dari target yaitu jumlah kunjungan Museum (Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiyayam) dikarenakan di saat peak season dan high season liburan di awal tahun dan akhir tahun kunjungan jauh dari target dikarenakan kendala cuaca buruk	1. Pencapaian target dengan target renstra/RPD yang telah ditetapkan; 2. Dalam Pengembangan pariwisata dan pemajuan kebudayaan daerah tetap mempedomani dokumen perencanaan/ rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk PPKD agar diakselerasi agar sinkron dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		2.325.818		2.249.998		96,74%				
			Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya	Objek		7		18		257,14%			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1.282.026		1.267.011		98,83%				
			Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola	Persentase		5		5		100,00%			
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1.282.026		1.267.011		98,83%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit		65		65		100,00%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		1.041.792		982.290		94,29%				
			Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan A traksi/Amenitas/Aksesibilitas/Lembaga Wisatanya	Destinasi		4		6		150,00%			
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.041.792		982.290		94,29%				
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi		4		0		0,00%			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		2.000		696		34,80%				
			Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dokumen		4		5		125,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota		1.000		450		45,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha		4		12		300,00%			
			Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota		1.000		246		24,60%				
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen		4		4		100,00%			
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		816.000		802.419		98,34%				
			Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	Prosentase		84		88,63		105,51%			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		816.000		802.419		98,34%				
			Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada	Persentase		37		38,63		104,41%			
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		816.000		802.419		98,34%				
			Jumlah laporan SubKegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		482.800		468.231		96,98%				
			Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persentase		18		24		133,33%			
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		482.800		468.231		96,98%				
			Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	Komunitas		3		4		133,33%			
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		482.800		468.231		96,98%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang		40		150		375,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				6.625.908		6.338.236	6.625.908	95,66%		Keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana aparaturnya sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan terlambat	Penentuan target kinerja untuk tahun berikutnya agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		2.115.630		2.059.056		97,33%				
			persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	persen		84,68		98,47		116,28%			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1.904.630		1.854.986		97,39%				
			Jumlah bibit tanaman yang ditanam	batang		7000		7000		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan	Unit		3015		3015		100,00%			
			Prosentase penyediaan pupuk	Persen		85		95,42		112,26%			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		698.900		698.201		99,90%				
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		12		12		100,00%			
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1.205.730		1.156.785		95,94%				
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		211.000		204.069		96,72%				
			Jumlah penyediaan bibit ternak yang dikembangkan	ekor		30		20		66,67%			
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		73.000		69.780		95,59%				
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kab/Kota Lain	bh		4000		4000		100,00%			
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		138.000		134.289		97,31%				
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis		300		300		100,00%			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.205.000		2.174.456		98,61%				
			persentase prasarana pertanian kondisi baik	persen		70,76		70,99		100,33%			
			Pembangunan Prasarana Pertanian		2.205.000		2.174.456		98,61%				
			Jumlah prasarana pertanian kondisi baik	Km		478		483,2		101,09%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		1.725.000		1.708.012		99,02%				
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		360.000		355.646		98,79%				
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		2		2		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		120.000		110.797		92,33%				
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		225.049		209.925		93,28%				
			Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	Persen		100		100		100,00%			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		170.000		160.562		94,45%				
			Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	ekor		8995		7843		87,19%			
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		20.000		19.265		96,33%				
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah		9		9		100,00%			
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		150.000		141.297		94,20%				
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		25.000		21.765		87,06%				
			Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas	ekor		175		384		219,43%			
			Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH	ekor		1510		1880		124,50%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		10.000		8.751		87,51%				
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		15.000		13.014		86,76%				
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		12		12		100,00%			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		30.049		27.598		91,84%				
			Prosentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	%		50		52		104,00%			
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan		30.049		27.598		91,84%				
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	unit usaha		30		30		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		150.000		142.146		94,76%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/ Penyakit	Persen		87		93,08		106,99%			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		150.000		142.146		94,76%				
			Prosentase luas serangan OPT yang dikendalikan	Persen		80		100		125,00%			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		150.000		142.146		94,76%				
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		3041		597		19,63%			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.930.229		1.752.654		90,80%				
			Persentase kelompok tani yang berdaya	Persen		20,63		25,52		123,70%			
			persentase kelompok ternak yang berdaya	Persen		16,26		17,9		110,09%			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.930.229		1.752.654		90,80%				
			Prosentase kelompok tani yang terampil	Persen		20,63		25,52		123,70%			
			Prosentase penyuluh pertanian yang meningkat Kapasitasnya	Persen		100		100		100,00%			
			Prosentase petani yang terampil	Persen		95		95		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		225.309		204.187		90,63%				
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		610		580		95,08%			
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		500.000		480.142		96,03%				
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		29		29		100,00%			
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1.044.920		914.067		87,48%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		3		3		100,00%			
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		160.000		154.258		96,41%				
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		2		2		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				20.000		18.313	20.000	91,57%		SDM tidak sesuai dengan kompetensi dan minim kuantitas	Tingkatkan kompetensi SDM dan optimalkan sarpras pendukung	

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		20.000		18.313		91,57%		SDM, minim kualitas dan kuantitas sarpras	sehingga mampu merumuskan strategi dan implementasi penanganan permasalahan sesuai urusan yang diampu OPD.	
			<i>persentase tutupan lahan tahura</i>	Persen		24,87		28,85		116,00%			
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		20.000		18.313		91,57%				
			Persentase penyediaan tanaman tahura	Persen		33,33		59,55		178,67%			
			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota		20.000		18.313		91,57%				
			Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha		2,5129		2,5129		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN				13.857.109		13.090.623	13.857.109	94,47%		-rehab gedung kantor tidak dapat dilaksanakan karena peserta tender tidak ada yang lulus dalam tahap evaluasi teknis, apabila dilakukan tender ulang waktu tidak mencukupi -	Realisasi fisik mencapai 96,91 persen dengan predikat tinggi, belum diimbangi oleh realisasi anggaran sebesar 88, 61 persen dengan predikat tinggi. Masih terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, untuk ahun berikutnya kegiatan yang sudah direncanakan agar dapat dilaksanakan lebih tepat waktu sehingga resiko kegagalan pelaksanaan dapat dikurangi.	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		10.000		6.133		61,33%				
			<i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)</i>	Persen		70		61,4		87,71%			
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		5.000		3.870		77,40%				
			Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan	Persen		70		50		71,43%			
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5.000		3.870		77,40%				
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		5.000		2.263		45,26%				
			Persentase Gudang yang mempunyai TDG	Persen		7		6		85,71%			
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		5.000		2.263		45,26%				
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen		21		21		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		12.724.651		12.069.984		94,86%				
			<i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik</i>	Persen		80		78,7		98,38%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12.702.241		12.050.624		94,87%				
			Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan	Persen		3,44		3,3		95,93%			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		7.474.606		6.957.988		93,09%				
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		8		8		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5.227.635		5.092.636		97,42%				
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		25		25		100,00%			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		22.410		19.360		86,39%				
			Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	Persen		70		70		100,00%			
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		22.410		19.360		86,39%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		139.768		135.125		96,68%				
			Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil	Persen		79		75		94,94%			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		119.168		115.236		96,70%				
			Cakupan Informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor	Persen		40		40		100,00%			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		5.569		5.435		97,60%				
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		360		360		100,00%			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		4.999		3.655		73,11%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		360		360		100,00%			
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		108.600		106.145		97,74%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		3		3		100,00%			
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.600		19.889		96,55%				
			Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK	Persen		87		80		91,95%			
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		8.250		7.986		96,80%				
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen		99		99		100,00%			
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		6.300		6.203		98,45%				
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		24		24		100,00%			
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		6.050		5.700		94,22%				
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan		24		24		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		221.123		204.279		92,38%				
			Persentase Pertumbuhan Ekspor	Persen		0,15		0,1		66,67%			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		221.123		204.279		92,38%				
			Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor	Persen		6		6		100,00%			
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		221.123		204.279		92,38%				
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk		2		2		100,00%			
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		69.336		34.540		49,82%				
			Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi	Persen		94		95,29		101,37%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		69.336		34.540		49,82%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar	Persen		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		54.344		25.533		46,98%				
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		10499		10011		95,35%			
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		14.992		9.007		60,08%				
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		100		59		59,00%			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		692.230		640.562		92,54%				
			Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	Persen		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		692.230		640.562		92,54%				
			Persentase Perluasan jaringan perdagangan	Persen		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		692.230		640.562		92,54%				
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM		250		315		126,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				13.765.816		10.977.887	13.765.816	79,75%		Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan pembangunan SIHT masih belum terlaksana sepenuhnya, pekerjaan pengadaan Instalasi Listrik, Pembangunan dan Pemasangan LPJU tidak dapat dilaksanakan karena gedung produksi belum jadi sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang sesuai perencanaan yang nantinya akan disusun dalam Renstra dan Renja yang akan datang. Mengingat beberapa permasalahan yang ada di tahun 2024 ini, penting untuk membuat sebuah perencanaan yang berbasis pada manajemen risiko, sehingga risiko2 yang mungkin akan timbul dapat direduksi	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		13.758.316		10.971.342		79,74%				
			Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO/ HACCP/ Halal)	Persen		4,5		4,5069		100,15%			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		13.758.316		10.971.342		79,74%				
			Persentase IHT dibina	persen		45		55,5		123,33%			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2.000		1.745		87,25%				
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		3		3		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2.356.594		2.234.395		94,81%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		12		12		100,00%		semaksimal mungkin.	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		50.000		45.138		90,28%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen		4		4		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		11.346.722		8.687.947		76,57%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		3.000		2.117		70,57%				
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		3		3		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		5.000		4.236		84,73%				
			Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	Persen		8,4		8,4191		100,23%			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota		5.000		4.236		84,73%				
			Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		2.500		2.137		85,50%				
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri,	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		2.500		2.099		83,96%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jml dok Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko utk bidang usaha sektor perindustrian dgn tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,		Dokumen		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			2.500		2.309		92,36%				
			Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini		Persen		3,8		3,82		100,53%			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			2.500		2.309		92,36%				
			Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS		persen		35		35		100,00%			
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			2.500		2.309		92,36%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen		3		3		100,00%			

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4.628.907		4.049.834	4.628.907	87,49%		Terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Musrenbangwil karena terkait pembatalan dari Provinsi sehubungan dengan jadwal pimpinan	Pentahapan pelaksanaan dan rencanan anggaran kas pada sub kegatan/ kegiatan antara agar lebih diselaraskan shingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin selaras.	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.555.011		3.152.671		88,68%				
			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah		persen		100		100		100,00%			
			Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		2.178.440		1.853.424		85,08%				
			Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		127.708		73.266		57,37%				
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		124.577		116.259		93,32%				
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		171.731		162.437		94,59%				
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara		1		1		100,00%			
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		10.478		5.201		49,64%				
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan		500		450		90,00%			
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.743.947		1.496.260		85,80%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen		5		5		100,00%			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1.204.871		1.156.663		96,00%				
			Persentase keterisian data RKPD terhadap Data RPJMD	persen		66		100		151,52%			
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1.204.871		1.156.663		96,00%				
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku		5		5		100,00%			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		171.700		142.584		83,04%				
			Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	persen		100		95		95,00%			
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota		171.700		142.584		83,04%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		4		4		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.073.896		897.163		83,54%				
			Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		526.389		417.323		79,28%				
			Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		124.489		105.223		84,52%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		13		13		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		401.900		312.100		77,66%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		27		27		100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		387.597		359.940		92,86%				
			Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		300.300		276.589		92,10%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		28		28		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		87.297		83.351		95,48%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		25		25		100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		159.910		119.900		74,98%				
			Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		159.910		119.900		74,98%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					317.143.603		312.971.993	317.143.603	98,68%		1. Peningkatan PAD tidak sesuai target, karena implementasi opsen dilaksanakan Tahun 2025; 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperbup belum dibahas oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 3. Pengamanan BMD setelah dilakukan pengukuran pemetaan tanah oleh BPN, tanah Daerah Irigasi (DI) Pemkab, Tumpang Tindih dengan tanah Hak Milik masyarakat di hak pakai Pemerintah Desa.	Realisasi fisik mencapai 94,71 persen dengan predikat sangat tinggi diikuti oleh realisasi anggaran sebesar 97,1 persen dengan predikat yang sama. Masih terdapat capaian indikator program/kegiatan yang cukup rendah, sehingga perlu evaluasi untuk penyesuaian indikator dan target kinerja.	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			311.963.118		308.779.405		98,98%				
				Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit	Persen		2		1,45		72,50%			
				Indeks Penganggaran Daerah	Indeks		100		100		100,00%			
				Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen		2,75		2,75		100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.086.589		949.602		87,39%				
				Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen		100		162,5		162,50%			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		317.201		279.751		88,19%				
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yg disusun	Dokumen		2		2		100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		172.762		150.973		87,39%				
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2		2		100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		357.682		318.752		89,12%				
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		2		2		100,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		238.944		200.126		83,75%				
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		2		7		350,00%			
1				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		374.700		298.229		79,59%				
				Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		159.000		133.375		83,88%				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		4		4		100,00%			
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		74.000		57.808		78,12%				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		60		60		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.000		32.269		75,04%				
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Laporan		7000		7000		100,00%			
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		98.700		74.778		75,76%				
			Jml Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		10		10		100,00%			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		627.831		511.037		81,40%				
			Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		62.670		56.732		90,53%				
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		1		1		100,00%			
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		288.405		224.267		77,76%				
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		264.325		230.038		87,03%				
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		5.766		0		0,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen			1		1		100,00%			
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666		0		0,00%				
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen			1		1		100,00%			
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			309.873.999		307.020.538		99,08%				
			Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen			100		100		100,00%			
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			280.039.377		283.652.277		101,29%				
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan			1		1		100,00%			
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			8.191.512		1.731.817		21,14%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan			1		1		100,00%			
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			21.643.110		21.636.443		99,97%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan			1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.908.259		2.059.105		70,80%				
			Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	Persen			100		100		100,00%			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.908.259		2.059.105		70,80%				
			Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen			91		91		100,00%			
			Penyusunan Standar Harga			77.821		69.421		89,21%				
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen			2		2		100,00%			
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			129.337		110.115		85,14%				
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1		1		100,00%			
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.000		0		0,00%				
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen			1		0		0,00%			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah			957.873		679.675		70,96%				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan			7		7		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah			1.451.732		1.001.872		69,01%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		450		335		74,44%			
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		81.710		41.842		51,21%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		204.786		156.181		76,27%				
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2.272.226		2.133.484		93,89%				
			Peningkatan PAD	Rupiah		1,10139E+11		43131463055		39,16%			
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		2.272.226		2.133.484		93,89%				
			Persentase Realisasi PAD	Persen		100		100		100,00%			
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah		25.809		21.413		82,97%				
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		250.932		240.613		95,89%				
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		55.757		46.888		84,09%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		51.849		51.849		100,00%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		155		155		100,00%			
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		218.460		183.080		83,80%				
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		15000		15000		100,00%			
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		39.320		36.054		91,69%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		7.393		5.344		72,29%				
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		50		50		100,00%			
			Penetapan Wajib Pajak Daerah		193.716		185.423		95,72%				
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		410000		410000		100,00%			
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		38.447		21.065		54,79%				
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		10000		10000		100,00%			
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		3.000		1.865		62,17%				
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penagihan Pajak Daerah		870.488		840.891		96,60%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		7.196		3.492		48,53%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		80		80		100,00%			
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		490.594		478.511		97,54%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		2.858		2.472		86,48%				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		16.407		14.525		88,53%				
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.287.382		3.386.838	4.287.382	79,00%		Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Bupati definitif, Pj Bupati memiliki kewenangan yang terbatas yang diatur oleh PerUndang Undangan salah	Perlu dilakukan analisa dan evaluasi atas target-target kinerja yang masih kurang dari standart agar dapat di capai target kinerja sesuai yang di harapkan.	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		4.287.382		3.386.838		79,00%				
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	indeks		0,074		0,074		100,00%			
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	indeks		0,2		0,195		97,50%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	indeks		0,0988		0,098		99,19%	satunya adalah penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama. Inovasi pelayanan yang masih kurang menyebabkan masih adanya pelayanan yang manual seperti pemberhentian dan kenaikan pangkat		
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	indeks		0,221		0,193		87,33%			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.859.839		1.676.150		90,12%				
			Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	indeks		83,59		88,16		105,47%			
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		8.480		8.418		99,26%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1.070.376		1.000.074		93,43%				
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		28		25		89,29%			
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		317.612		241.850		76,15%				
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		10		10		100,00%			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		248.857		214.969		86,38%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		4		4		100,00%			
			Pengelolaan Data Kepegawaian		214.515		210.839		98,29%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		2		2		100,00%			
			Mutasi dan Promosi ASN		1.249.460		690.969		55,30%				
			Persentase Penataan ASN (Mutasi dan Promosi) sesuai hasil Pemetaan Kompetensi	persen		20		20		100,00%			
			Pengelolaan Mutasi ASN		58.780		49.435		84,10%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		124.000		105.019		84,69%				
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		700		1126		160,86%			
			Pengelolaan Promosi ASN		1.066.680		536.516		50,30%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		58		35		60,34%			
			Pengembangan Kompetensi ASN		824.339		732.847		88,90%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase ASN yang masuk dalam kelompok rencana suksesi	persen		15		13,45		89,67%			
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		23.177		9.367		40,42%				
				Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		150		180		120,00%			
				Pengelolaan Assessment Center		677.932		659.988		97,35%				
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		2		2		100,00%			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		6.460		5.773		89,37%				
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang		50		193		386,00%			
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		116.770		57.719		49,43%				
				Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang		125		255		204,00%			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		353.744		286.872		81,10%				
				Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	persen		0,2		0,12		60,00%			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		34.476		28.566		82,86%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		9		9		100,00%			
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		14.647		5.659		38,64%				
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		300		300		100,00%			
				Pembinaan Disiplin ASN		198.360		163.435		82,39%				
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		740		913		123,38%			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kesejahteraan ASN	Dokumen		6		6		100,00%			
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		86.925		76.205		87,67%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		10		10		100,00%			
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		19.336		13.008		67,27%				
				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		4		7		175,00%			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.521.800		2.089.581	2.521.800	82,86%		Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Bupati definitif, Pj Bupati memiliki	Perlu dilakukan analisa dan evaluasi atas target-target kinerja yang masih kurang dari standart agar dapat di capai target kinerja sesuai yang	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2.521.800		2.089.581		82,86%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN	indeks		29		28		96,55%	kewenangan yang terbatas yang diatur oleh PerUndang Undangan salah satunya adalah penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama. Inovasi pelayanan yang masih kurang menyebabkan masih adanya pelayanan yang manual seperti pemberhentian dan kenaikan pangkat	di harapkan.	
			Pengembangan Kompetensi Teknis			1.906.805		1.688.096		88,53%				
				Persentase ASN yang lulus Diklat Teknis	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			4.452		828		18,60%				
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.902.353		1.687.268		88,69%				
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		734		1086		147,96%			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			614.995		401.485		65,28%				
				Persentase ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang lulus Pengembangan Kompetensi	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			614.995		401.485		65,28%				
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		30		24		80,00%			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPEDA					728.643		678.156	728.643	93,07%		Terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Musrenbangwil karena terkait pembatalan dari Provinsi sehubungan dengan jadwal pimpinan	Pentahapan pelaksanaan dan rencanan anggaran kas pada sub kegiatan/ kegiatan antara agar lebih diselaraskan shingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			728.643		678.156		93,07%				
				Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/ dipublikasikan	persen		20		20		100,00%			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			75.680		75.000		99,10%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persen		20		20		100,00%		selaras.	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		75.680		75.000		99,10%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan		1		1		100,00%			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100.000		93.627		93,63%				
			Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dipublikasikan (kajian/riset/grand design)	persen		20		20		100,00%			
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		100.000		93.627		93,63%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi		552.963		509.529		92,15%				
			Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	Persen		20		20		100,00%			
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		552.963		509.529		92,15%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		24		24		100,00%			

3.1.5. Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(* dalam ribu rupiah													
PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					457.594.862		428.064.476	457.594.862	93,55%		Realisasi Anggaran pada Sub Kegiatan Masih ada yang rendah dikarenakan pencairan pada digit belanja nara sumber Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. dan Subkegiatan yang Sumber Dana dari APBN (BOP PAUD, Dikmas, BOS SD dan SMP) yang pencairan langsung ke sekolah/ lembaga Realisasi anggaran belum Final karena menunggu hasil Rekonsiliasi	untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan agar disusun sebaik mungkin di setiap Triwulan, supaya target keuangan dan capaian kinerja dapat tercapai	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		457.594.862		428.064.476		93,55%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	Nilai		32		31		96,88%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		69.228		54.352		78,51%				
			Persentase capaian kinerja sub kegiatan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		59.228		45.978		77,63%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000		8.374		83,74%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		453.342.786		424.245.602		93,58%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		453.042.786		423.965.922		93,58%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		3688		3688		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		289.800		269.505		93,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.200		10.176		99,76%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		70.000		69.129		98,76%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		70.000		69.129		98,76%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		44.080		32.319		73,32%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		0,04		0,04		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		23.570		12.659		53,71%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2		2		100,00%			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20.510		19.661		95,86%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		225		225		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		500.538		478.245		95,55%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.500		14.496		99,97%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90.000		82.087		91,21%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.768		6.850		88,19%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		91.149		90.864		99,69%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		66.713		59.655		89,42%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		60.000		57.640		96,07%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		13		13		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		20.388		20.386		99,99%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.020		146.266		97,50%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		307.321		289.050		94,05%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		36.515		33.150		90,78%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		98.408		93.350		94,86%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		12		12		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		172.398		162.550		94,29%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		25		25		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.684.337		1.360.731		80,79%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.550		2.400		94,12%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		841.119		574.368		68,29%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29.413		29.231		99,38%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		811.255		754.732		93,03%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		17		17		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.576.571		1.535.048		97,37%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		95,68		95,68		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		212.661		205.802		96,77%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		69		69		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24.830		23.068		92,90%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		26		26		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.311.688		1.280.921		97,65%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		27.392		25.257		92,20%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		31		31		100,00%			
DINAS KESEHATAN					128.970.858		122.587.539	128.970.858	95,05%		Banyak Kegiatan yang menyesuaikan kondisi atau keadaan potensi penyakit yang dapat menimbulkan KLB atau Bencana sehingga tidak dapat diprediksi kapan muncul dan besarannyakegiatan beberapa kegiatan memerlukan Kesesuaian kebijakan standar gizi dalam indikator sekolah sehat.	Capaian tahun 2024 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2025, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		128.970.858		122.587.539		95,05%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		41		39		95,12%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		634.738		580.673		91,48%				
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		100		89,36		89,36%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		429.093		390.965		91,11%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		35		35		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		205.645		189.708		92,25%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		32		32		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		123.999.817		117.913.986		95,09%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		80		90,1		112,63%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		123.853.289		117.777.946		95,09%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		10221		16337		159,84%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		107.704		104.627		97,14%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		38.824		31.413		80,91%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		63		63		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		262.351		260.249		99,20%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		42,86		99,2		231,45%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		262.351		260.249		99,20%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		75		75		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		522.503		472.408		90,41%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		17.502		17.493		99,95%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		264.563		251.308		94,99%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		37.736		37.714		99,94%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		80.856		62.157		76,87%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		28.172		20.158		71,55%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		89.474		79.378		88,72%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		50		49		98,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.969.823		1.841.438		93,48%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.150		3.000		95,24%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		6		6		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		472.744		414.437		87,67%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		92.926		63.616		68,46%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		8		8		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.401.003		1.360.385		97,10%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		13		13		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.581.626		1.518.786		96,03%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		408.571		382.754		93,68%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		33		33		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.173.056		1.136.032		96,84%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		50		49		98,00%			
RSUD dr. LOEKMONO HADI					263.318.022		241.140.212	263.318.022	91,58%		Terdapat kesalahan penulisan target	Capaian tahun 2024 sudah bagus	

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		263.318.022		241.140.212		91,58%		capaian realisasi dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan.	agar ditingkatkan di tahun 2025, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		47		42		89,36%			
			Peningkatan Pelayanan BLUD		263.318.022		241.140.212		91,58%				
			Rasio Pelayanan	persen		95,1		101,22		106,44%			
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLU		263.318.022		241.140.212		91,58%				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		2		2		100,00%			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					16.145.642		15.590.684	16.145.642	96,56%		Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala administrasi dan perbaikan standar harga satuan barang dan jasa (SSH)	keterlambatan capaian realisasi kinerja maupun anggaran hingga di akhir TW IV utamanya pada kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pelelangan perlu menjadi catatan penting bahan evaluasi agar pada TA 2025 kendala terkait administrasi dan standar harga satuan barang dan jasa tidak menjadi berlarut-larut yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan fisik yang berjalan hampir bersamaan mendekati akhir tahun dan sudah memasuki musim penghujan dapat menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang kurang optimal.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		16.145.642		15.590.684		96,56%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	Nilai		43		39		90,70%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.251		29.539		88,84%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.888		17.435		92,31%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.363		12.104		84,27%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1		5		500,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.924.740		10.708.294		98,02%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.848.415		10.631.974		98,00%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		87		81		93,10%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		76.325		76.320		99,99%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		38.300		18.961		49,51%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		38.300		18.961		49,51%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		22		20		90,91%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		398.119		385.474		96,82%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.945		10.933		99,89%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		102.628		95.022		92,59%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		19.448		18.742		96,37%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		142.257		139.910		98,35%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.485		28.059		95,16%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		93.356		92.809		99,41%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20		20		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.053.033		967.318		91,86%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		151.065		147.683		97,76%				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
			Pengadaan Mebel		162.798		145.891		89,61%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		739.170		673.744		91,15%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		554.748		476.944		85,97%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.000		6.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1000		1000		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		239.456		194.868		81,38%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		309.292		276.076		89,26%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.143.452		3.004.153		95,57%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		681.860		662.042		97,09%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		55		55		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		1.050.360		965.478		91,92%				
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		23		23		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		48.512		48.315		99,59%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		34		34		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.362.720		1.328.318		97,48%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					20.872.296		19.793.990	20.872.296	94,83%		SDM tidak sesuai dengan kompetensi dan minim kuantitas SDM, minim kualitas dan kuantitas sarpras	Tingkatkan kompetensi SDM dan optimalkan sarpras pendukung sehingga mampu merumuskan strategi dan implementasi penanganan permasalahan sesuai urusan yang diampu OPD.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		20.872.296		19.793.990		94,83%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	nilai		30		39		130,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.923		20.901		69,85%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.923		13.325		74,34%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.000		7.576		63,13%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5		5		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.094.814		14.608.903		96,78%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		85		93,3		109,76%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.024.634		14.542.001		96,79%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		136		134		98,53%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60.180		57.247		95,13%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.000		9.655		96,55%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		13		13		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		226.681		206.098		90,92%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen		71,43		85,71		119,99%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.450		10.026		95,94%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		31.030		25.148		81,04%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		45		42		93,33%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		38.254		33.703		88,10%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		30		31		103,33%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		18.507		15.828		85,52%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12.636		10.680		84,52%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		114.004		108.913		95,53%				
			Jml Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		7		7		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		324.968		313.090		96,34%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		47.478		45.400		95,62%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		277.490		267.690		96,47%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		35		35		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.053.966		1.677.061		81,65%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		272.888		213.315		78,17%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.781.078		1.463.746		82,18%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.141.944		2.967.937		94,46%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.663.799		2.573.948		96,63%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		128		128		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.921		13.511		90,55%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		24		24		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		463.224		380.478		82,14%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					8.348.194		7.907.352	8.348.194	94,72%		Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai.	Cermati dan perhitungkan dengan tepat terkait target program/kegiatan/ sub kegiatan agar capaian kinerja maksimal. Maksimalkan seluruh kemampuan sumberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja kedepan. Perhatikan aktifitas walidata karena merupakan bagian dari Sistem	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.348.194		7.907.352		94,72%				
			Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018	nilai		35,5		30		84,51%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.347		26.545		97,07%				
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		22.347		21.671		96,98%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000		4.873		97,47%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		15		15		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.994.975		6.611.725		94,52%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		86		97		112,79%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.928.675		6.547.156		94,49%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		52		48		92,31%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.300		59.620		97,26%		Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah agar isian yang masih kosong segera diisi,		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		27		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.000		4.949		98,98%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.300		1.170		90,00%				
			Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		24,49		10		40,83%			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1.300		1.170		90,00%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		432.294		410.787		95,02%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.893		3.875		99,54%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.935		19.534		97,99%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.570		11.640		92,60%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.000		25.412		84,71%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.483		7.557		89,08%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		357.413		342.769		95,90%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91.889		90.328		98,30%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		91.889		90.328		98,30%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		17		17		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		262.048		256.942		98,05%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.992		1.740		87,35%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		109.882		106.038		96,50%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		150.174		149.165		99,33%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		538.341		509.855		94,71%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		453.363		428.392		94,49%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		37		37		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.530		16.080		82,33%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		19		19		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65.448		65.383		99,90%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					7.153.483		6.746.899	7.153.483	94,32%		Perubahan iklim dan tidak mementunya cuaca, menjadi faktor penghambat dalam tercapainya tujuan organisasi	Perkuat kesiapsiagaan terhadap bencana agar selalu siap menghadapi iklim dan cuaca tak	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		7.153.483		6.746.899		94,32%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Persen		36		36		100,00%		terduga	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48.732		44.224		90,75%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		19.184		17.714		92,34%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.548		26.511		89,72%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6		6		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.794.008		3.581.078		94,39%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		95		95,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.724.188		3.511.938		94,30%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		21		21		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		69.820		69.140		99,03%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.800		1.640		18,64%				
			Persentase ASN yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		100		100		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8.800		1.640		18,64%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2		2		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		261.136		228.467		87,49%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.897		7.100		71,74%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		41.582		31.783		76,43%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.919		7.918		99,99%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.626		24.660		80,52%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.896		11.565		97,22%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.480		82,86%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		155.015		141.961		91,58%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		209.105		195.899		93,68%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		16.348		15.096		92,34%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		175.563		164.663		93,79%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		20		20		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		17.194		16.140		93,87%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		277.665		254.406		91,62%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100.917		77.884		77,18%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		176.748		176.522		99,87%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.554.038		2.441.186		95,58%				
			Persentase BMD dalam kondisi Baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50.840		50.313		98,96%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		344.859		321.880		93,34%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		35		35		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		3.008		3.000		99,73%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		8		8		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40.512		34.511		85,19%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		47		47		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.112.754		2.029.582		96,06%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.065		1.900		92,01%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.029.094		7.058.726	8.029.094	87,91%		Kurangnya Komitmen terhadap Timeline yang telah disusun, sehingga serapan anggaran tertumpu di TW 4	Masih terdapat realisasi yang melebihi 100% dan dibawah 50% yang menunjukan kurang optimalnya kesesuaian antara target dan	

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.029.094		7.058.726		87,91%			komitmen. Diharapkan untuk periode berikutnya target kinerja lebih dioptimalkan sesuai dengan kondisi lapangan, untuk komitmen atas target kinerja juga lebih dikuatkan. Selain itu, dalam menyusun anggaran juga diharapkan sesuai target kinerja, sehingga penyerapan anggaran lebih optimal. Penyusunan target kinerja dan rencana anggaran membutuhkan komitmen kinerja yang besar agar, dapat memberikan hasil yang baik	
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		46		37		80,43%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.131		18.632		63,96%				
			Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.070		12.827		60,88%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.061		5.805		72,01%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6		6		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.489.335		5.123.127		93,33%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		86		86		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.427.475		5.075.285		93,51%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		490		490		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		49.260		37.540		76,21%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.600		10.302		81,76%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000		9.060		60,40%				
			Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		100		100		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000		9.060		60,40%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5		5		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		210.445		165.059		78,43%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.287		5.886		80,78%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		52.183		35.085		67,23%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		45		45		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		64.877		44.745		68,97%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		16.729		15.099		90,26%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.850		91,67%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		65.170		60.393		92,67%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		419.670		303.542		72,33%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		419.670		303.542		72,33%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	paket		11		10		90,91%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		673.697		584.505		86,76%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.202		2.289		44,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		262.406		214.496		81,74%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		57.909		27.006		46,63%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		348.180		340.715		97,86%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.191.816		854.802		71,72%				
			Persentase BMD dalam kondisi Baik	persen		96,7		96		99,28%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		375.017		291.367		77,69%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		68		68		100,00%			
			Terbayarnya honorarium petugas pengemudi	OB		36		36		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		801.219		553.484		69,08%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6		5		83,33%			
			Terbayarnya honorarium petugas kebersihan	OB		36		36		100,00%			
			Terbayarnya honorarium petugas keamanan	OB		84		84		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.580		9.952		63,87%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					9.795.615		9.049.429	9.795.615	92,38%		Pelaksanaan kegiatan bersumber dari DBHCHT terutama pekerjaan pembangunan SIHT masih belum terlaksana sepenuhnya, pekerjaan pengadaan Instalasi Listrik, Pembangunan dan Pemasangan LPJU	Utk Renja OPD pada triwulan/ tahun berikutnya, Dinas Nakerperinkop UKM dapat meneruskan kegiatan-kegiatan yang sesuai perencanaan yang nantinya akan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		9.795.615		9.049.429		92,38%				
			Nilai Kematangan OPD	nilai		45		41		91,11%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.258		27.996		92,52%		tidak dapat dilaksanakan karena gedung produksi belum jadi sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan.	disusun dalam Renstra dan Renja yang akan datang. Mengingat beberapa permasalahan yang ada di tahun 2024 ini, penting untuk membuat sebuah perencanaan yang berbasis pada manajemen risiko, sehingga risiko2 yang mungkin akan timbul dapat direduksi semaksimal mungkin.	
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		95		95		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.268		13.617		89,19%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.990		14.379		95,92%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		8		8		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.951.433		6.565.427		94,45%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		85		85		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.883.940		6.498.156		94,40%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ tahun		574		574		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60.758		60.601		99,74%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6.735		6.670		99,04%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		284.463		250.555		88,08%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		95		95		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.960		10.370		94,61%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		38.403		34.445		89,69%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.307		6.739		81,13%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		40.450		36.535		90,32%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		26.799		15.619		58,28%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200		7.200		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.240		3.250		76,65%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		148.104		136.398		92,10%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30		30		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		106.829		94.990		88,92%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		106.829		94.990		88,92%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8		8		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.398.579		1.240.903		88,73%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		95		95		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.400		8.321		99,06%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		423.154		332.989		78,69%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		967.025		899.593		93,03%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.024.053		869.559		84,91%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		80		80		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		258.099		232.762		90,18%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		33		33		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		69.842		32.204		46,11%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		50		50		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		651.260		561.680		86,25%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		44.852		42.913		95,68%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					5.142.409		4.783.037	5.142.409	93,01%		1. Kompetensi SDM penyelenggara pelayanan penerbitan dokumen kependudukan belum memadai; 2,. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum optimal; 3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan; 4. Koordinasi lintas sektoral terkait pemanfaatan data kependudukan dalam optimalisasi pelayanan publik belum memadai; 5. Penyelenggaraan tata kelola Sistem	Cermati dan perhitungkan dengan tepat terkait target program/kegiatan/ sub kegiatan agar capaian kinerja maksimal. Maksimalkan seluruh kemampuan suberdaya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. Diperlukan upaya optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja kedepan. Perhatikan aktifitas	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.142.409		4.783.037		93,01%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	indeks		45		41		91,11%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		115.959		107.730		92,90%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84.894		78.545		92,52%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.065		29.185		93,95%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		34		34		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.308.997		4.001.020		92,85%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen ke atas		85		82,6		97,18%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.254.266		3.949.953		92,85%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		23		23		100,00%	Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 di Perangkat Daerah masih rendah; 6. Kurangnya efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran kinerja; 7. Kompetensi SDM Perencana yang kurang memadai	validata karena merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah agar isian yang masih kosong segera didisi.	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		54.731		51.067		93,31%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		27		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		43.813		40.789		93,10%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		48		56,5		117,71%			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		7.578		5.574		73,56%				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12		12		100,00%			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		9.575		9.390		98,07%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		150		150		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		26.660		25.825		96,87%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5		13		260,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		225.063		208.896		92,82%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.565		2.703		59,21%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.831		17.027		81,74%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.634		6.894		71,55%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.595		10.451		82,98%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.973		11.199		70,11%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600		2.910		80,83%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.359		9.345		99,85%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		148.506		148.368		99,91%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		31.582		26.494		83,89%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31.582		26.494		83,89%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		16		16		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		273.610		266.827		97,52%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.008		958		95,06%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.130		8.130		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		264.472		257.738		97,45%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		143.385		131.281		91,56%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		143.385		131.281		91,56%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		26		26		100,00%			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.055.108		5.811.360	6.055.108	95,97%		- Pengiriman diklat disesuaikan dengan penawaran yang masuk di dinas PMD - Proses penyusunan Ranperbup terhambat dengan ketentuan - Terdapat sub kegiatan yang outputnya hampir sama	1. sesuaikan target 2025 dengan target renstra 2024-2026 yang telah disusun; 2. lebih cermat dalam penyusunan target kinerja pertriwulanan.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.055.108		5.811.360		95,97%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		44		41		93,18%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.560		104.603		97,25%				
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		22.255		21.236		95,42%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85.304		83.367		97,73%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12		12		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.227.142		4.086.963		96,68%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		87		87		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.141.582		4.007.783		96,77%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		364		364		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		85.560		79.180		92,54%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000		8.500		56,67%				
			Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		100		100		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000		8.500		56,67%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		3		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		176.192		175.369		99,53%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.499		7.499		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000		19.997		99,99%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.998		9.911		99,13%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.992		24.515		98,09%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.500		22.497		99,99%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.008		7.008		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.328		6.319		99,86%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		6		6		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		71.238		71.092		99,80%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		35		35		100,00%			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		6.629		6.530		98,51%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		300.305		292.982		97,56%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		74.700		70.917		94,94%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Pengadaan Mebel		47.828		46.948		98,16%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		177.777		175.117		98,50%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		45		45		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		453.080		421.813		93,10%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.052		1.048		99,62%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		111.200		89.285		80,29%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.000		5.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		335.828		326.480		97,22%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		775.830		721.130		92,95%				
			Persentase BMD dalam kondisi Baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		224.205		216.461		96,55%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		18		18		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		525.875		478.919		91,07%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		6		6		100,00%	Keterbatasan anggaran untuk study keselamatan jalan pendukung pelayanan transportasi	perlu upaya peningkatan pemenuhan infrastruktur pendukung keselamatan jalan yang memadai dan sesuai standar. upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi masal berbasis jalan yang efsien, aman, dan nyaman dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada urusan perhubungan lakukan pencermatan target kinerja pada program/keg/subk eg dan periksa ulang kembali target kinerja apabila terdapat perubahan anggaran untuk dilakukan penyesuaian. agar kesalahan pencantuman target pada rahun 2023 tidak terulang kembali	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.750		25.750		100,00%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		43		43		100,00%			
DINAS PERHUBUNGAN					16.254.722		15.424.070	16.254.722	94,89%				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		16.254.722		15.424.070		94,89%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD))	Angka		24,05		37		153,85%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.492		36.817		98,20%				
			Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.232		22.888		98,52%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3		3		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.261		13.929		97,67%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		15		15		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.900.094		9.317.047		94,11%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		85		85		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.825.934		9.243.017		94,07%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		73		73		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		70.260		70.247		99,98%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		27		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.900		3.784		97,01%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		29		29		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000		14.634		97,56%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		15.000		14.634		97,56%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.580		29.150		89,47%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Orang		6		6		100,00%			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		22.000		20.250		92,05%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1		1		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10.580		8.900		84,12%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2		2		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		386.155		338.374		87,63%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.149		9.695		86,96%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		37.655		33.228		88,24%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		18.769		10.192		54,30%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		29.641		22.173		74,80%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		112.943		105.868		93,74%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600		3.340		92,78%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		172.398		153.879		89,26%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		715.401		709.675		99,20%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		479.534		476.675		99,40%				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		25.566		24.900		97,39%				
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Pengadaan Mebel		19.068		19.000		99,64%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		191.233		189.100		98,88%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.975.440		4.816.868		96,81%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.436		5.180		95,29%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		258.593		241.054		93,22%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.521		14.935		85,24%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.693.890		4.555.699		97,06%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		192.559		161.505		83,87%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		163.362		133.631		81,80%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		29.197		27.874		95,47%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.750.025		12.200.173	12.750.025	95,69%		Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di	Capaian IKU sangat baik, Capaian Program , Kegiatan dan subkegiatan di atas 90%, agar diertahankan dan ditingkatkan untuk yang belum mencapai 100%. Agar dipenuhi keterisian data sebagaimana tertuang di e walidata urusan kominfo, statistik dan persandian yang notabene adalah hasil kinerja di tingkat aktivitas ataupun subkegiatan yang tidak terlihat pada laporan evarenja ini yaitu an : Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah, Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		12.750.025		12.200.173		95,69%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		43		39		90,70%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.580		19.562		95,06%				
			Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.693		15.273		97,33%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.887		4.289		87,76%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3		3		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.985.866		3.950.284		99,11%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.910.732		3.875.521		99,10%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		28		28		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		58.800		58.800		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%	tahun 2024 ini.	dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas, Audit TIK Internal, eksternal, Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik, Strategi Komunikasi Publik yang disusun, Konten Audio Video, Konten Audio, Pertemuan tatap muka, KIM, Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data (urusan statistik), Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan, Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik, Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		16.334		15.963		97,73%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.000		5.874		97,90%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6.000		5.874		97,90%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.013.691		4.661.792		92,98%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		12		12		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		57.785		40.765		70,55%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		6		200,00%			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		4.955.906		4.621.027		93,24%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2000		2000		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		240.867		233.785		97,06%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		46.499		44.704		96,14%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		40		40		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23.025		20.061		87,13%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.537		17.615		90,16%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10.800		10.635		98,47%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%		Kabupaten/Kota (urusan persandian).	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		141.006		140.770		99,83%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		53.670		52.200		97,26%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		3.857		3.600		93,34%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		49.813		48.600		97,56%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.175.780		3.042.917		95,82%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500		1.639		46,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.172.280		3.041.278		95,87%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		253.571		233.758		92,19%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		212.260		201.413		94,89%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41.311		32.345		78,30%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		50		50		100,00%			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					5.746.831		5.513.376	5.746.831	95,94%		1. Regulasi Perizinan Berusaha belum selesai diharmonisasi sehingga pelaksanaan perizinan berusaha belum berjalan optimal. 2. Regulasi Pemberian insentif dan kemudahan berusaha masih dalam bentuk draft dan materi masih dibahas lebih lanjut dengan OPD terkait. 3. Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis dalam pelaksanaan pengawasan ke pelaku usaha. 4. Potensi dan peluang investasi yang kurang menarik di Kudus karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. 5. Belum optimalnya kegiatan promosi potensi dan peluang investasi yang telah dilaksanakan.	buat timeline dan dipatuhi dalam menyusun perbub. tingkatkan komitmen perizinan prasarana yang dibutuhkan. sering koordinasikan dengan OPD terkait perkembangan proses. target yang belum terlaksana di tahun 2024 agar di evaluasi dan di tingkatkan lagi untuk kedepannya.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.746.831		5.513.376		95,94%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		39		39		100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.958		19.769		99,05%				
			Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		96,88		96,88%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.493		15.330		98,95%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.465		4.439		99,42%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		21		21		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.979.644		3.845.674		96,63%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen ke atas		85		92,79		109,16%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.935.421		3.801.569		96,60%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		350		326		93,14%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		42.500		42.397		99,76%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.723		1.709		99,14%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		14		14		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.500		17.480		99,89%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		17.500		17.480		99,89%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84.385		80.250		95,10%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		50		100		200,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		84.385		80.250		95,10%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		41		48		117,07%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		245.108		231.332		94,38%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.528		4.516		99,73%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49.705		49.591		99,77%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16.793		15.441		91,95%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		63.157		52.664		83,39%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		20.249		19.662		97,10%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.400		8.040		95,71%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82.276		81.418		98,96%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		23		35		152,17%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.605		224.054		94,70%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		236.605		224.054		94,70%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT R KOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		99		99		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		873.507		833.881		95,46%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.170		1.144		97,74%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		297.735		259.640		87,21%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		574.602		573.097		99,74%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		290.124		260.935		89,94%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		91,51		91,51%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		44.650		36.293		81,28%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		142.254		130.116		91,47%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.300		21.250		99,77%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		30		30		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34.600		34.043		98,39%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		47.320		39.233		82,91%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		17		17		100,00%			
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					11.283.090		10.614.470	11.283.090	94,07%		Ada realisasi kinerja yang jauh dari target yaitu jumlah kunjungan Museum (Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam) dikarenakan di saat peak season dan high season liburan di awal tahun dan akhir tahun kunjunganya jauh dari target dikarenakan kendala cuaca buruk	1. Pencapaian target dengan target renstra/RPD yang telah ditetapkan; 2. Dalam Pengembangan pariwisata dan pemajuan kebudayaan daerah tetap mempedomani dokumen perencanaan/rencana na induk yang telah ditetapkan. Untuk PPKD agar diakselerasi agar sinkron dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.283.090		10.614.470		94,07%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		41		39		95,12%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		77.832		77.478		99,55%				
			Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persentase		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		43.332		43.145		99,57%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		29		29		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34.500		34.333		99,52%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		40		40		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.633.673		5.032.503		89,33%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persentase		96		95,88		99,88%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.483.829		4.882.701		89,04%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		42		36		85,71%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		47.724		47.687		99,92%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		102.120		102.115		99,99%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		115		115		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		86.680		84.790		97,82%				
			Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persentase		85		85		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		86.680		84.790		97,82%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		15		15		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		654.473		650.566		99,40%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persentase		80		80		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.500		7.463		99,51%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90.981		88.713		97,51%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		25.342		25.162		99,29%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		77.500		77.101		99,48%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		170.000		169.821		99,89%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.500		7.409		98,78%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		60		60		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		271.650		270.936		99,74%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4.000		3.961		99,03%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1200		1200		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63.514		62.134		97,83%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		63.514		62.134		97,83%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.597.211		2.548.102		98,11%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persentase		80		80		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.700		1.410		82,94%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		615.520		608.460		98,85%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.979.991		1.938.232		97,89%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.169.707		2.158.898		99,50%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase		75		75		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		252.826		252.426		99,84%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		17		17		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		5.000		4.883		97,66%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		28		28		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.413		10.099		96,98%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		66		66		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.901.468		1.891.490		99,48%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					5.480.544		4.895.902	5.480.544	89,33%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, ada juga yang belum mencapai sesuai target, yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang rendah	Dalam penyusunan target dan indikator supaya lebih cermat, Untuk capaian yang melebihi target supaya kedepannya disesuaikan lagi. Perencanaan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.480.544		4.895.902		89,33%				
			Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah	Nilai		37		35		94,59%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		848		836		98,66%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%	akan lebih mudah dalam pencapaian target kinerja, sedangkan target kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan jika target kinerja tinggi ,sehingga dalam capaian lebih sulit dicapai meskipun ada target yang tercapai meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai	manajemen waktu pelaksanaan supaya disusun dengan cermat, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		848		836		98,66%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		7		7		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.202.394		3.730.931		88,78%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.148.274		3.678.571		88,68%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		364		364		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		54.120		52.360		96,75%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		197.785		181.180		91,60%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.867		6.628		96,52%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		42.479		36.986		87,07%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.661		7.887		81,64%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23.377		17.265		73,85%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.240		6.261		86,48%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.616		4.235		75,41%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.025		7.025		100,00%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		3		3		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95.520		94.893		99,34%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		10		10		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		162.523		146.308		90,02%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		129.764		115.708		89,17%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		32.759		30.600		93,41%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		468.845		437.845		93,39%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.770		3.720		98,67%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		133.008		109.584		82,39%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		36		36		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		332.067		324.541		97,73%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		120		120		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		448.149		398.803		88,99%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		202.527		167.979		82,94%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%	Keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana aparatur sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan terlambat	Penentuan target kinerja untuk tahun berikutnya agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.622		32.022		70,19%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		200.000		198.801		99,40%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					16.404.122		15.093.675	16.404.122	92,01%				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.404.122		15.093.675		92,01%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	nilai		40		40		100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.219		22.718		55,12%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.619		15.801		66,90%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.600		6.917		39,30%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		23		23		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.297.777		12.305.712		92,54%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		93,11		93,11%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.252.177		12.261.895		92,53%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		89		89		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		45.600		43.817		96,09%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.930		5.902		66,09%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		60,44		54,5		90,17%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		8.930		5.902		66,09%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		55		48		87,27%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		229.125		210.739		91,98%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		95		95		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.282		12.211		85,50%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.853		12.561		74,53%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.829		14.888		83,50%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		25		25		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		41.311		36.548		88,47%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		17.356		14.438		83,19%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.560		86,67%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		119.694		118.535		99,03%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		200		210		105,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		211.648		197.420		93,28%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		211.648		197.420		93,28%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		61		61		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.014.404		911.231		89,83%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		94		91,6		97,45%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.300		3.300		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		332.458		291.085		87,56%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		678.646		616.845		90,89%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.601.019		1.439.952		89,94%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		69		66,3		96,09%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		275.526		202.061		73,34%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		120		120		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.774		10.174		86,41%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25		25		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.313.719		1.227.718		93,45%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
DINAS PERDAGANGAN					18.956.583		15.986.125	18.956.583	84,33%		-rehab gedung kantor tidak dapat dilaksanakan karena peserta tender tidak ada yang lulus dalam tahap evaluasi teknis, apabila dilakukan tender ulang waktu tidak mencukupi -	Realisasi fisik mencapai 96,91 persen dengan predikat tinggi, belum diimbangi oleh realisasi anggaran sebesar 88, 61 persen dengan predikat tinggi. Masih terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, untuk ahun berikutnya kegiatan yang sudah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		18.956.583		15.986.125		84,33%				
			Nilai KOPD	Nilai		35		40		114,29%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57.957		53.496		92,30%				
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	Persen		89		95		106,74%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31.632		28.961		91,56%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.325		24.535		93,20%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%		direncanakan agar dapat dilaksanakan lebih tepat waktu sehingga resiko kegagalan pelaksanaan dapat dikurangi.	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.333.780		12.111.118		90,83%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		86		93,02		108,16%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.249.480		12.030.993		90,80%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		136		111		81,62%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		76.500		72.328		94,55%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		38		38		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7.800		7.798		99,97%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		75		75		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		685.000		661.590		96,58%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		685.000		661.590		96,58%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.615		21.888		73,91%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		2		4,9		245,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		16.000		14.003		87,52%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2		5		250,00%			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		13.615		7.885		57,91%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		65		65		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		367.125		355.493		96,83%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		80		80		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.999		4.346		86,94%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		56.280		49.438		87,84%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.480		4.448		99,29%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.246		20.230		99,92%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		147.000		146.653		99,76%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200		7.200		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.260		2.214		97,94%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		124.660		120.964		97,04%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5		5		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		268.129		222.309		82,91%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		67.230		63.510		94,47%				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Pengadaan Mebel		139.361		106.410		76,36%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		9		9		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.784		37.800		82,56%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.754		14.589		92,61%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.244.949		1.908.102		85,00%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		90		90		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.200		1.250		29,76%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		996.470		748.352		75,10%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.244.279		1.158.500		93,11%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.970.028		652.129		33,10%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		80		80		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		511.320		367.841		71,94%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		25		25		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		800		746		93,25%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.280		9.810		86,97%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		7		7		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.424.678		258.456		18,14%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		0		0,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21.950		15.277		69,60%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		16		16		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BAGIAN PEMERINTAHAN					198.200		178.042	198.200	89,83%		Faktor penghambat dapat diminimalisir sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik	Kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi, agar dipertahankan untuk tahun sebelumnya. Agar diinformasikan pada kolom faktor pendorong atau faktor penghambat terkait informasi hasil penataan administrasi pemerintahan, hasil pengelolaan administrasi kewilayahan hasil fasilitasi pelaksanaan otda, hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri, luar negeri dan hasil evaluasinya	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		198.200		178.042		89,83%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.840		15.840		100,00%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15.840		15.840		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		21.115		15.920		75,40%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		21.115		15.920		75,40%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2		2		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		72.707		63.022		86,68%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.999		10.187		92,62%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.998		3.994		99,89%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.943		7.475		94,11%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400		2.400		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47.367		38.966		82,26%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		50		50		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.493		51.254		99,54%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.435		1.374		95,71%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		50.058		49.880		99,64%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.045		32.006		86,40%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		100		166,67%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30.835		27.472		89,09%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.210		4.534		73,02%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					399.189		289.449	399.189	72,51%		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait	Kategori capaian kinerja fisik dan keuangan sangat tinggi, untuk dipertahankan. Agar diinformasikan pada kolom faktor pendorong dan atau faktor penghambat terkait keterisian data dalam SIPD yang seharusnya menjadi tanggungjawab Bagian Kesra yang notabene adalah keluaran aktivitas	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		399.189		289.449		72,51%				
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	Persen		70		91,3		130,43%			
			IKM Setda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		67.680		61.990		91,59%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.880		58.350		94,30%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.800		3.640		62,75%			yang dilakukan yaitu Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi, Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.080		14.220		56,70%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25.080		14.220		56,70%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2		2		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		94.740		69.822		73,70%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.800		12.795		99,96%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.980		6.680		66,93%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.090		10.083		90,92%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		59.070		38.464		65,12%				
			Jml Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		24		24		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.888		64.829		64,90%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.076		2.072		99,81%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		97.812		62.757		64,16%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.801		78.589		70,29%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		100		166,67%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		97.820		67.094		68,59%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.981		11.495		82,22%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		18		18		100,00%			
BAGIAN HUKUM					246.539		187.763	246.539	76,16%		Keterbatasan pengadaan buku peraturan perundang-undangan terbaru dari Pihak Ketiga, sehingga kebutuhan informasi sebagai bentuk layanan kepada masyarakat tidak bisa optimal	Kategori capaian kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi, agar dapat dipertahankan. Agar mempertimbangkan pengisian data yang diamanatkan dalam e walidata SIPD yaitu masalah hukum yang Diselesaikan dan masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan yang notabene merupakan output aktifitas dalam subkegiatan yang dilakukan.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		246.539		187.763		76,16%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	persen		70		91,3		130,43%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.880		11.880		100,00%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		11.880		11.880		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48.459		35.910		74,10%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		48.459		35.910		74,10%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5		5		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		111.640		91.961		82,37%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.034		11.727		78,00%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.464		9.849		59,82%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.172		3.899		54,36%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.308		7.522		61,11%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.662		58.964		97,20%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		25		25		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		996		650		65,26%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		996		650		65,26%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73.564		47.362		64,38%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		58		96,67%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		65.485		44.817		68,44%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6		6		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8.079		2.545		31,50%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		9		9		100,00%			
BAGIAN PEREKONOMIAN					128.089		116.363	128.089	90,85%		Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA	Kategori capaian kinerja fisik sangat	

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		128.089		116.363		90,85%		sebagian besar baru dilaksanakan pada triwulan IV karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi dan menunggu GU 1 Setda. Angka Inflasi Daerah dalam 1 Tahun berada di bawah target Daerah 3 +/- 1 % dan target Nasional 2,5 +/- 1 %. Rendahnya angka inflasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus, tetapi terjadi secara Nasional. Angka Inflasi Nasional tahun 2024 merupakan angka inflasi terendah sejak perhitungan inflasi pertama di tahun 1958.	tinggi agar dipertahankan dan kinerja keuangan tinggi perlu ditingkatkan. Agar dijelaskan dalam kolom pendorong dan atau penghambat hal-hal terkait ketersediaan data yang menjadi tusi bagian perekonomian sebagaimana diamantkan dalam walidata SIPD yaitu Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD. Data-data tersebut notabene dihasilkan dalam aktivitas pelaksanaan subkegiatan. Terkait ketercapaian angka inflasi yang belum sesuai target, agar ditambahkan upaya intervensi sesuai kewenangan Sekda yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian.	
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29.760		26.490		89,01%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		29.760		26.490		89,01%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.415		6.960		93,86%				
			Level Variabel Diklat Aparatur pada Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		7.415		6.960		93,86%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.134		38.417		95,72%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.892		18.908		95,05%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.677		2.590		96,75%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.097		3.094		99,90%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.650		2.530		95,47%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.680		93,33%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.018		9.616		95,98%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.780		44.496		87,62%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		60		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		43.920		37.750		85,95%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.030		4.961		98,63%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		7		7		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.830		1.785		97,54%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
BAGIAN ADM PEMBANGUNAN					194.059		181.757	194.059	93,66%		(1) Kurang disiplinnya PD dalam mengisi e-planning terkait data kinerja dan realisasi anggaran (2) belum optimalnya aplikasi SIPD terutama di penatausahaan (3) belum optimalnya LHPM SPIP, terutama pada pemenuhan data dukung	capaian kinerja fisik maupun keuangan kategori sangat tinggi untuk dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Agar menambahkan penjelasan di kolom faktor pendorong atau faktor penghambat terkait penjelasan/informasi pelaksanaan tugas hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, hasil pengendalian dan evaluasi program	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		194.059		181.757		93,66%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	Persen		70		91,3		130,43%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		36.999		35.691		96,46%				
			Level variabel PPD pada kematangan PD	Nilai		4		5		125,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000		24.710		98,84%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.000		10.981		91,51%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		9		9		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.820		15.455		86,73%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%		pembangunan dan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan ada gambaran kekurangan dan atau keberhasilan pelaksanaan tugas yang dimandatkan.	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		17.820		15.455		86,73%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.938		3.884		98,62%				
			Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3.938		3.884		98,62%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		39.010		37.961		97,31%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		39.010		37.961		97,31%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		4		6		150,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		56.362		51.554		91,47%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.093		16.281		85,27%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		540		540		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.960		3.323		83,91%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.240		6.240		100,00%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.680		93,33%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24.729		23.491		94,99%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5		7		140,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		900		900		100,00%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		900		900		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.030		36.313		93,04%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		99		165,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		34.970		32.868		93,99%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3		3		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.840		2.425		85,39%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.220		1.020		83,61%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		4		200,00%			
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					255.233		241.342	255.233	94,56%		-	Capaian kinerja fisik dan capaian kinerja keuangan sangat tinggi agar dipertahankan. Terkait pemenuhan data Orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		255.233		241.342		94,56%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		34.980		34.980		100,00%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		34.980		34.980		100,00%			dan jasa agar dipertimbangkan dipenuhi dalam tahun 2025. Dukungan pencapaian nilai MCP KPK di bidang pengadaan barang dan jasa agar terus ditingkatkan karena masih pada angka 83, 09%. Dukungan P3DN agar terus ditingkatkan.	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		16.490		14.799		89,75%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		135		114		84,15%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.702		1.516		89,07%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10.738		9.766		90,95%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		315		209		66,38%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600		3.195		88,75%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.768		99.128		99,36%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.596		1.050		65,79%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		98.172		98.078		99,90%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.995		92.434		88,88%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		60		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		90.395		80.341		88,88%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.330		7.861		84,26%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		13		13		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.270		4.232		99,11%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		7		7		100,00%			
BAGIAN UMUM					45.020.174		42.271.339	45.020.174	93,89%		Pengaturan cashflow yang kurang optimal, sehingga banyak belanja yang tidak bisa teralisasi tepat waktu. Hal ini diantaranya kendala di sistem SIPD Penatausahaan - Karena kekosongan jabatan KDH/WKDH maka tidak ada realisasi belanja di Sub Keg. Penyed. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH karena gaji PJ Bupati ikut instansi definitif. - Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten dalam hal pembangunan fisik.	Kategori capaian kinerja fisik dan keuangan sangat tinggi agar dipertahankan. Agar diinformasikan di kolom faktor pendorong dan atau faktor penghambat terkait data-data aktivitas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi misalnya data pengelolaan aset / BMD lingkup Setda, hasil fasilitasi administrasi Kepala daerah dalam upaya mendukung kinerja pimpinan daerah, pengelolaan keuangan lingkup setda. Permasalahan di tingkat aktivitas subkegiatan misal adanya rekomendasi-rekomendasi pihak	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		45.020.174		42.271.339		93,89%				
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	Persen		70		91,33		130,47%			
			IKM Pemda	Indeks		89		89,33		100,37%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.095		14.901		98,71%				
			Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD	Nilai		4		5		125,00%			
			Level variabel PPD pada kematangan PD	Nilai		4		5		125,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.095		14.901		98,71%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.147.646		21.140.057		95,45%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		90,72		103,09%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		21.991.657		20.969.063		95,35%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		147		132		89,80%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		131.580		146.647		111,45%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		24.409		24.347		99,75%		terkait atas pelaksanaan aktivitas yang menjadi tugas Bagian Umum. Agar ditindaklanjuti untuk penguatan kinerja fungsi tata usaha pimpinan sebagaimana hasil rapat koordinasi penyusunan pohon kinerja sekretariat daerah utamanya dalam mengatur lalu lintas pengajuan dan penginformasian disposisi atas naskah dinas yang ditujukan kepada Bupati.		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		4		4		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		441.784		419.192		94,89%				
			Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		26.969		26.769		99,26%				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		414.815		392.423		94,60%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.360		90.247		92,69%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		49.360		45.620		92,42%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		3		3		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		48.000		44.627		92,97%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		6		12		200,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.010.964		3.541.034		88,28%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		625.958		508.176		81,18%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		130.176		105.743		81,23%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.060		13.895		98,83%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		40.000		38.564		96,41%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		191.696		123.406		64,38%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		48.000		23.145		48,22%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.961.074		1.734.437		88,44%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		450		471		104,67%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.000.000		993.666		99,37%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		325		328		100,92%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.800.539		8.451.439		96,03%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		90		90		100,00%			
			Pengadaan Mebel		919.799		905.008		98,39%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		98		98		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		496.166		487.005		98,15%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		64		64		100,00%			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.344.599		4.090.463		94,15%				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.039.975		2.968.963		97,66%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		173		173		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.767.638		5.337.601		92,54%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		49.992		46.143		92,30%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.417.072		2.097.677		86,79%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.300.574		3.193.782		96,76%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.028.175		2.890.201		95,44%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		60		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		83.800		83.705		99,89%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		640.093		571.361		89,26%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		56		56		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		322.905		309.275		95,78%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		128		128		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.940.348		1.885.131		97,15%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		9		9		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		41.029		40.728		99,27%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		55		55		100,00%			
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		254.860		0		0,00%				
			Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum)	Persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		254.860		0		0,00%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		456.113		386.666		84,77%				
			Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		456.113		386.666		84,77%				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
BAGIAN ORGANISASI					829.888		742.698	829.888	89,49%		Pada Kegiatan Bimtek, realisasi hanya 50% disebabkan biaya untuk pelaksanaan bimtek, hanya cukup untuk membiayai 3 orang pegawai, dan pada sub kegiatan peningkatan kinerja dan RB hasil yang dicapai belum optimal, disebabkan beberapa kegiatan Monev budaya kerja tidak terlaksana	Kategori capaian kinerja fisik sangat tinggi dan capaian kinerja keuangan tinggi untuk dapat dipertahankan. Untuk dipertimbangkan kembali penentuan target pada indikator Persentase PD dengan nilai IKM min 80 dan Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang jika akan digunakan kembali pada perencanaan periode 2025-2029 mengingat capaian di atas 100% Data terkait sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan kelembagaan yang disediakan, Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan, Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota,	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		829.888		742.698		89,49%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	Persen		70		91,3		130,43%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.820		11.820		100,00%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		11.820		11.820		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.970		19.620		93,56%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20.970		19.620		93,56%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		6		3		50,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		47.656		44.379		93,12%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.336		12.495		93,70%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%		Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan pada SIPD masih 0, agar dipertimbangkan untuk pemenuhannya. Untuk diberikan penjelasan pada kolom faktor pendorong dan atau faktor penghambat untuk data hasil aktivitas di subkegiatan berupa Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan, Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun.	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.380		1.380		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.765		3.606		95,78%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.640		8.469		79,59%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.740		96,67%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16.735		16.689		99,73%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.500		1.500		100,00%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		1.500		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		53.196		48.896		91,92%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		60		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.476		46.256		91,64%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6		6		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.720		2.640		97,06%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
			Penataan Organisasi		694.746		616.483		88,74%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase PD dengan nilai IKM min 80	Persen		80		98,6		123,25%			
			Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang	Persen		85		100		117,65%			
			Persentase PD dengan nilai RB min 70	Persen		63		50		79,37%			
			Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB	Persen		76		50		65,79%			
			Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan	Persen		36		36		100,00%			
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		280.111		256.346		91,52%				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		178.424		165.872		92,96%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		6		6		100,00%			
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		189.080		153.086		80,96%				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		4		4		100,00%			
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		47.130		41.180		87,37%				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		1		1		100,00%			
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					4.009.023		3.471.359	4.009.023	86,59%		Banyaknya kegiatan KDH/WKDH ke luar daerah sehingga kegiatan dalam daerah banyak yang tertunda dan dijadwalkan ulang, untuk itu perlu kecermatan, ketelitian dan tenaga ekstra keprotokolan dalam peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Capaian kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi dipertahankan untuk tahun berikutnya. Untuk dipertimbangkan keterisian data Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah sebagaimana arahan e walidata SIPD. Keterisian data tersebut notabennya adalah hasil aktivitas yang dilakukan.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.009.023		3.471.359		86,59%				
			IKM Pemda	Indeks		89		90,53		101,72%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum	Persen		70		91,3		130,43%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		53.200		50.017		94,02%				
			Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		88		95,1		108,07%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		35.700		32.545		91,16%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		17.500		17.472		99,84%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40.264		39.620		98,40%				
			Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Nilai		4		3		75,00%			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		40.264		39.620		98,40%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		3		3		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		109.403		96.632		88,33%				
			Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Nilai		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44.986		38.520		85,63%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.033		5.190		86,03%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.630		25.591		99,85%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.240		77,14%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28.554		24.091		84,37%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.064		223.942		84,17%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.040		1.800		88,24%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		264.024		222.142		84,14%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		199.701		175.534		87,90%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		80		133,33%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		179.520		159.399		88,79%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.181		16.135		79,95%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		29		29		100,00%			
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		888.930		539.215		60,66%				
			Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/ WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim)	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		232.791		163.215		70,11%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		656.139		376.000		57,30%				
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2.451.461		2.346.398		95,71%				
			Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/wakil bupati) terselenggara sesuai SOP	Persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Keprotokolan		1.374.571		1.373.585		99,93%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		445.730		347.972		78,07%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan		631.160		624.841		99,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		12		12		100,00%			
SEKRETARIAT DPRD					61.498.185		56.544.606	61.498.185	91,95%		Perlunya mengakumulasi waktu yang digunakan agar realisasi tercapai sesuai time line	Tingkatkan koordinasi dan sinergi antara DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mendukung efektifitas capaian kinerja	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		61.498.185		56.544.606		91,95%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		33		39		118,18%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.070		27.931		99,50%				
			Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.731		16.594		99,18%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.339		11.337		99,98%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.402.278		4.093.952		93,00%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.234.296		3.936.775		92,97%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		324		324		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		122.460		111.680		91,20%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		45.522		45.497		99,95%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1354		2058		151,99%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		101.000		100.575		99,58%				
			Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		101.000		100.575		99,58%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		303.446		285.465		94,07%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP tahun	Persen		100		100		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		63.879		54.937		86,00%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		108		107		99,07%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		239.567		230.528		96,23%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		26		26		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.915.540		1.467.059		76,59%				
			Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		287.196		279.206		97,22%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		38		39		102,63%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		243.839		217.443		89,17%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		49		49		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		248.746		193.856		77,93%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		70		70		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		243.769		170.362		69,89%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		93.604		81.137		86,68%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		53.400		50.080		93,78%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		72		72		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		563.364		310.475		55,11%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		72		49		68,06%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		181.623		164.501		90,57%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20		20		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.352.320		6.517.231		88,64%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		498.738		481.180		96,48%				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Mebel		333.937		305.595		91,51%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		212		212		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		492.341		469.131		95,29%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		24		24		100,00%			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.992.008		1.842.776		92,51%				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.035.296		3.418.550		84,72%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		257		257		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.284.380		2.023.563		88,58%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.000		8.000		66,67%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		15		11		73,33%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		864.716		640.947		74,12%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.407.664		1.374.617		97,65%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		149		149		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.712.788		5.352.172		93,69%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		99,33		99,33%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		493.488		458.538		92,92%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		115		118		102,61%			
			Pemeliharaan Mebel		56.570		55.167		97,52%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		80		80		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		91.778		85.725		93,40%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		113		113		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4.428.153		4.149.274		93,70%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		642.799		603.467		93,88%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		130		125		96,15%			
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		38.087.071		35.640.907		93,58%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Laporan		14		14		100,00%			
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		37.294.552		34.949.168		93,71%				
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan		540		540		100,00%			
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		667.610		621.692		93,12%				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		188		182		96,81%			
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		124.909		70.048		56,08%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang		45		29		64,44%			
			Layanan Administrasi DPRD		1.311.291		1.035.752		78,99%				
			Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan	Laporan		224		218		97,32%			
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1.311.291		1.035.752		78,99%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan		224		218		97,32%			
BAPPEDA					7.940.354		7.475.383	7.940.354	94,14%		Terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Musrenbangwil karena terkait pembatalan dari Provinsi sehubungan dengan jadwal pimpinan	Pentahapan pelaksanaan dan rencanan anggaran kas pada sub kegatan/ kegiatan antara agar lebih diselaraskan shingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin selaras.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		7.940.354		7.475.383		94,14%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	Nilai		48		40		83,33%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57.740		40.650		70,40%				
			Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		96		96,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40.630		26.754		65,85%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.110		13.897		81,22%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.862.323		5.644.844		96,29%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		85		85		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.807.318		5.596.045		96,36%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		36		36		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		50.335		44.920		89,24%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.670		3.879		83,06%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		16.647		15.751		94,62%				
			Jumlah Dokumen Penagmanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		16.647		15.751		94,62%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		214.200		205.368		95,88%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		70		75		107,14%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		25.500		24.905		97,67%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		4		133,33%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		188.700		180.462		95,63%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		78		50		64,10%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		455.987		382.351		83,85%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.115		5.218		51,58%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39.499		29.273		74,11%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		19.374		14.649		75,61%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		61.127		48.817		79,86%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		25.060		17.864		71,28%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.400		7.920		94,29%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		292.412		258.610		88,44%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30		30		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		541.351		522.573		96,53%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		310.732		310.732		100,00%				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Mebel		10.848		10.000		92,18%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		11		11		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		219.771		201.841		91,84%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		29		29		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		415.452		333.383		80,25%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		136.326		112.372		82,43%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		279.126		221.011		79,18%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		376.654		330.464		87,74%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		347.054		304.274		87,67%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		30		30		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.200		13.190		92,89%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		19		19		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.400		13.000		84,41%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		31		31		100,00%			
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					23.220.905		20.925.974	23.220.905	90,12%		1. Peningkatan PAD tidak sesuai target, karena implementasi opsen dilaksanakan Tahun 2025; 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperbup belum dibahas oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 3. Pengamanan BMD setelah dilakukan pengukuran pemetaan tanah oleh BPN, tanah Daerah Irigasi (DI) Pemkab, Tumpang Tindih dengan tanah Hak Milik masyarakat di hak pakai Pemerintah Desa.	Realisasi fisik mencapai 94,71 persen dengan predikat sangat tinggi diikuti oleh realisasi anggaran sebesar 97,1 persen dengan predikat yang sama. Masih terdapat capaian indikator program/kegiatan yang cukup rendah, sehingga perlu evaluasi untuk penyesuaian indikator dan target kinerja.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.220.905		20.925.974		90,12%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Indeks		38		38		100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.008		40.158		80,30%				
			Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Persen		85		85		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		30.666		24.073		78,50%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.342		16.085		83,16%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.320.355		17.415.951		90,14%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		90		90,14		100,16%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		19.156.343		17.269.792		90,15%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		63		63		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		135.676		122.471		90,27%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28.337		23.688		83,59%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		9		9		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11.814		11.657		98,67%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		25		25		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		11.814		11.657		98,67%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		3		3		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		91.774		46.263		50,41%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen		12		60		500,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		91.774		46.263		50,41%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		65		65		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		319.632		249.218		77,97%				
			Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran yang sesuai standar	Persen		90		90		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.430		3.414		99,53%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60.619		29.496		48,66%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		74		74		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.295		6.577		63,89%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		26		26		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		32.515		28.710		88,30%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.700		11.986		57,90%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.600		3.975		86,41%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		187.473		165.061		88,05%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30		38		126,67%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.324.717		2.279.714		98,06%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.101.466		1.079.879		98,04%				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		8		8		100,00%			
			Pengadaan Mebel		591.337		581.568		98,35%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		121		121		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		631.914		618.267		97,84%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		71		71		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		634.231		538.604		84,92%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.000		4.864		48,64%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		5		5		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		29.760		23.812		80,01%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		594.471		509.928		85,78%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		468.374		344.409		73,53%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		427.093		323.717		75,80%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		56		56		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		1.250		1.005		80,40%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		26		26		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.828		6.677		61,66%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		40		40		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.203		13.010		44,55%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		77		77		100,00%			
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.940.264		8.684.916	8.940.264	97,14%		Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Bupati definitif, Pj Bupati memiliki kewenangan yang terbatas yang diatur oleh PerUndang Undangan salah satunya adalah penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama. Inovasi pelayanan yang masih kurang menyebabkan masih adanya pelayanan yang manual seperti pemberhentian dan kenaikan pangkat	Perlu dilakukan analisa dan evaluasi atas target-target kinerja yang masih kurang dari standart agar dapat di capai target kinerja sesuai yang di harapkan.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.940.264		8.684.916		97,14%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		48		40		83,33%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.065		32.235		65,70%				
			Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		83		96,9		116,75%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		35.867		21.598		60,22%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		12		12		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.199		10.637		80,59%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		29		29		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.155.958		7.144.751		99,84%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		85		89		104,71%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.080.234		7.078.299		99,97%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		630		703		111,59%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		57.120		53.160		93,07%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		18.604		13.292		71,45%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		63		63		100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000		19.626		98,13%				
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		20.000		19.626		98,13%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT R KOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		280.827		219.872		78,29%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		31,11		100		321,44%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		280.827		219.872		78,29%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15		92		613,33%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		343.613		301.906		87,86%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.500		1.284		51,36%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49.051		44.390		90,50%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.001		11.307		70,66%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		56.019		51.109		91,23%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.800		4.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		19.989		19.076		95,43%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		195.253		169.941		87,04%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		479.000		446.587		93,23%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		4.714		3.930		83,37%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		225.321		212.160		94,16%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		17		17		100,00%			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		141.549		140.701		99,40%				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		107.416		89.796		83,60%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		78		78		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		231.985		182.770		78,79%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.400		2.922		66,41%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		157.107		114.601		72,94%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		70.478		65.247		92,58%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		379.816		337.169		88,77%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		94		94		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		175.408		153.820		87,69%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		4.146		3.600		86,83%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		48.112		29.134		60,56%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		38		38		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		152.150		150.615		98,99%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		3		300,00%			
INSPEKTORAT DAERAH					10.491.628		9.736.613	10.491.628	92,80%		1.Adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan dimana pada awalnya dilakukan dengan berkunjung ke perangkat daerah dan/atau mengundang perangkat daerah ke inspektorat daerah berubah menjadi hanya pengiriman data dukung (softfile) dan dikerjakan di kantor (sub kegiatan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pengawasan karena adanya percepatan tugas mandatory yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah. 2. Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara sampai triwulan IV tahun 2024 belum ada realisasi keuangan dikarenakan kegiatan tersebut berdasarkan aduan yang masuk yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sampai akhir	Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi terkait dengan pengaduan dan pengendalian atas kerugian negara sehingga masyarakat lebih memahami dan aktif dalam mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan Pemkab.	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.491.628		9.736.613		92,80%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		35		36		102,86%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		217.202		199.151		91,69%				
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		69.127		65.951		95,40%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		148.075		133.201		89,96%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.874.124		7.491.169		95,14%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		80		80		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.808.189		7.429.113		95,15%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		40		40		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		58.740		58.740		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7.195		3.317		46,10%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000		25.702		85,67%		triwulan IV, belum ada aduan yang masuk yang berpotensi menimbulkan kerugianA negara.		
			Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		30.000		25.702		85,67%				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		353.056		267.107		75,66%				
			Persentase ASN PD yang memenuhi 40 JP pertahun	Persen		100		100		100,00%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		230.806		208.744		90,44%				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		25		25		100,00%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		122.250		58.363		47,74%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		20		20		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		319.990		238.875		74,65%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000		5.215		65,19%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35.581		21.476		60,36%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.828		24.100		93,31%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14.461		9.024		62,40%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400		1.930		80,42%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		233.720		177.131		75,79%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		24		24		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		834.261		796.170		95,43%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		621.464		602.580		96,96%				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Pengadaan Mebel		6.163		5.400		87,62%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		206.634		188.190		91,07%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		13		13		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		364.288		343.989		94,43%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		990		246		24,80%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		112.705		98.932		87,78%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		250.593		244.812		97,69%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		498.707		374.450		75,08%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		395.300		317.528		80,33%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		20		20		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		51.569		15.080		29,24%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8		8		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		42.000		36.160		86,09%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.838		5.682		57,76%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		15		15		100,00%			
KECAMATAN KALIWUNGU					3.740.673		3.402.496	3.740.673	90,96%		Sudah mulai turun hujan yang intensif menjadikan peningkatan kewaspadaan seluruh masyarakat Kecamatan Kaliwungu untuk pencegahan dan mitigasi potensi bencana di wilayah ini. Pencegahan dan mitigasi ini dilakukan secara dini dimulai dari tingkat Desa siaga bencana dan Kecamatan Tanggap Bencana agar tidak menimbulkan efek yang besar akibat potensi bencana.	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.740.673		3.402.496		90,96%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai		40		42		105,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.764		12.582		70,83%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.494		5.902		69,48%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.270		6.680		72,06%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.384.999		2.139.825		89,72%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.342.689		2.104.924		89,85%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		22		18		81,82%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40.320		33.052		81,97%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.990		1.849		92,92%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		209.004		170.526		81,59%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		90		90,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.102		2.310		37,85%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49.066		37.030		75,47%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		87.760		73.157		83,36%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.491		14.246		98,31%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.998		357		17,84%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.850		91,67%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.215		132		3,13%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		41.172		39.445		95,81%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		259.107		252.090		97,29%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.400		2.400		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		49.683		42.873		86,29%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		207.024		206.817		99,90%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		869.799		827.474		95,13%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		152.292		142.551		93,60%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		15		15		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.161		3.120		34,06%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		701.026		677.398		96,63%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.320		4.405		60,18%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		22		22		100,00%			
KECAMATAN KOTA KUDUS					14.411.784		13.578.701	14.411.784	94,22%		Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan untuk tahun mendatang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		14.411.784		13.578.701		94,22%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.154		18.989		99,14%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.394		11.394		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.760		7.595		97,87%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.432.278		12.650.120		94,18%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		94,8		94,80%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.372.456		12.590.736		94,15%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		1288		1087		84,39%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		57.490		57.070		99,27%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.332		2.314		99,23%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.212		138.033		97,06%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.770		2.308		83,32%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36.884		36.519		99,01%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		42		42		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.258		16.479		95,49%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		22		22		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		11.692		11.657		99,70%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.848		11.877		85,77%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.300		4.835		91,23%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		5		5		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.260		50.158		99,80%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		143.093		133.870		93,55%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		54.208		51.350		94,73%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		76.447		71.420		93,42%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		23		23		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.438		11.100		89,24%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		221.111		209.834		94,90%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.600		3.450		95,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		113.200		102.698		90,72%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		104.311		103.686		99,40%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		453.937		427.856		94,25%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		139.928		131.848		94,23%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		46.983		29.595		62,99%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		54		48		88,89%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		267.026		266.414		99,77%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN PURWOSARI					410.371		400.215	410.371	97,53%				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		410.371		400.215		97,53%				
			Nilai Kematangan Organisasi	Nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		3.224		80,60%		kurangnya komunikasi antar seksi dalam pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 bisa lebih ditingkatkan kinerja pada OPD sesuai renstra OPD	
			Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		1.922		96,09%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.302		65,12%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.290		31.167		93,62%				
			Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		31.290		29.630		94,69%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		1.537		76,87%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		33.159		31.259		94,27%				
			Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.336		1.336		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000		10.000		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		26		86,67%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.443		7.314		98,27%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		20		18		90,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.890		7.890		100,00%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.690		2.919		62,23%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		53.389		52.665		98,64%				
			Persentase Pengadaan BMD	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.432		11.351		99,29%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		41.957		41.314		98,47%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21.120		18.784		88,94%				
			Persentase Pembayaran Jasa PenunjangKantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.920		1.920		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%	jaringan internet yang kurang stabil sehingga upload data pada aplikasi terkendala	Capaian kinerja lebih dari 90% pada triwulan IV Tahun 2024 sehingga di Tahun 2025 lebih ditingkatkan lagi kinerja pada tahun 2025 sesuai rentra OPD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		19.200		16.864		87,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		265.413		263.116		99,13%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		11.870		11.591		97,65%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.480		5.471		99,83%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8		8		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		248.063		246.054		99,19%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
KELURAHAN SUNGGINGAN					274.921		270.420	274.921	98,36%				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		274.921		270.420		98,36%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000		3.000		99,99%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.500		1.500		99,99%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.500		1.500		99,99%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.040		38.040		100,00%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		35.400		35.400		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.640		2.640		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		33.060		32.975		99,74%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.164		1.161		99,74%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.265		12.210		99,55%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.810		8.791		99,78%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.541		7.533		99,89%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.480		1.480		99,99%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.754		11.655		99,16%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		11.754		11.655		99,16%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.619		26.695		90,13%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.880		2.880		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		26.739		23.815		89,06%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		159.448		158.056		99,13%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.500		15.268		98,50%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6		6		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.400		10.200		98,08%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		133.548		132.588		99,28%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
KELURAHAN PANJUNAN					452.077		418.622	452.077	92,60%		Proses pengerjaan dengan pihak ketiga yang membutuhkan banyak koordinasi serta Sistem Pemerintahan yang selalu dinamis, membutuhkan banyak waktu dalam penyelesaiannya	Pencapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2024 sudah di atas 90% namun realisasi keuangan masih kurang dari 90% sehingga di tahun 2025 perlu ditingkatkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan harus sesuai renstra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		452.077		418.622		92,60%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500		1.006		40,26%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.500		680		45,30%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4		4		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000		327		32,69%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37.900		35.590		93,91%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		35.400		33.090		93,47%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.500		2.500		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		42.835		33.757		78,81%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.286		1.028		79,94%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.350		7.194		69,51%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.000		3.000		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		11.459		9.761		85,18%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.540		8.574		68,37%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72.090		70.535		97,84%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		58.671		57.798		98,51%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.419		12.737		94,92%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.126		88.317		88,21%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.000		6.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		28.414		16.718		58,84%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		65.712		65.599		99,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		196.626		189.417		96,33%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		16.737		13.351		79,77%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		1.000		921		92,10%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.999		2.387		79,59%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		175.890		172.758		98,22%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KELURAHAN WERGU WETAN					302.361		300.770	302.361	99,47%		Kendala Kegiatan OPD : 1. Secara umum Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik sudah tercapai sebesar 97,51 %. 2. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik belum tercapai yaitu sebesar 72,98 % hal dikarenakan pelaksana kegiatan prodeskel yang notebene para anggota Karang Taruna untuk Tahun 2024 melaksanakan kegiatan lain yaitu pelaksanaan Pemilu Presiden dan legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah serentak, sehingga pelaksanaan prodeskel tidak dapat berjalan dengan maksimal.	Tingkatkan kinerja pada tahun 2025 sesuai renstra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		302.361		300.770		99,47%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		4.000		99,99%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		2.000		99,98%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		2.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.988		38.960		99,93%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		36.988		36.960		99,92%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		2.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.975		44.701		99,39%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.444		14.324		99,17%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.311		11.281		99,73%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		16		16		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.520		3.520		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.600		5.592		99,85%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.300		8.189		98,66%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.795		99,73%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67.780		66.535		98,16%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		67.780		66.535		98,16%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		14		14		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.130		29.989		102,95%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		3.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		26.130		26.989		103,29%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		117.488		116.586		99,23%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.328		14.670		95,71%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4		4		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.108		10.098		99,90%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		92.052		91.818		99,75%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
KELURAHAN WERGU KULON					406.928		391.486	406.928	96,21%		Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. Secara umum Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik sudah tercapai sebesar 97,74 % :	Pertahankan kinerja pada Kelurahan Wergu Kulon sehingga di tahun 2025 bisa tercapai target rentra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		406.928		391.486		96,21%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.042		3.981		98,49%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.045		2.009		98,24%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.997		1.972		98,75%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42.206		39.723		94,12%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		39.600		37.620		95,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.606		2.103		80,71%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		52.070		50.405		96,80%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.978		1.933		97,72%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		28.101		27.842		99,08%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		28		28		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.776		3.984		83,42%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.510		7.466		99,41%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7.905		7.560		95,63%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.620		90,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		127.073		124.995		98,36%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		35.592		34.911		98,09%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		74.091		72.912		98,41%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		17.390		17.172		98,74%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.300		25.457		86,89%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.920		1.920		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.380		23.537		85,97%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		48		48		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.238		146.925		96,51%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25.337		22.046		87,01%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.570		10.735		92,78%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		115.331		114.144		98,97%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN MLATI KIDUL					541.117		510.919	541.117	94,42%		1) Tidak ada Balita yang masuk kriteria Balita KEP dan Karang Taruna kurang aktif sehingga serapan anggaran pemberdayaan kurang maksimal; 2) Keterlambatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan sehingga ada kegiatan fisik yang selesai di Bulan desember.	Pencapaian realisasi kinerja triwulan IV Tahun 2024 melebihi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sehingga pada tahun 2025 agar dipertahankan sesuai rentra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		541.117		510.919		94,42%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		4.000		100,00%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		2.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		2.000		100,00%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.420		35.323		99,73%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		33.420		33.420		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		1.903		95,13%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		8		8		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.418		33.651		87,59%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.000		3.000		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.980		9.900		99,20%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		27		27		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.000		5.557		79,39%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		21		21		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		11.564		9.085		78,56%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.074		4.309		84,92%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		73.467		69.167		94,15%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		33.600		30.000		89,29%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		50		50		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.903		12.668		98,18%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		26.964		26.499		98,27%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115.841		110.219		95,15%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.040		4.200		83,33%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		28.019		23.242		82,95%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		48		48		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		82.782		82.777		99,99%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		273.971		258.559		94,37%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		36.814		24.140		65,57%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.190		8.810		86,46%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		15		15		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65.448		65.440		99,99%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		161.519		160.169		99,16%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN MLATINOROWITO					452.216		426.869	452.216	94,40%		Melaksanaan suatu kegiatan serta	Pencapaian kinerja triwulan IV Tahun	

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		452.216		426.869		94,40%		membuat perencanaan dalam suatu kegiatan yang tidak tepat merupakan faktor penghambat kegiatan tersebut.	2024 capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sehingga pada tahun 2025 capaian kinerja harus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai renstra OPD	
			Nilai Kematangan Organisasi			41		41		100,00%			
			Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		8		8		100,00%			
			Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.499		2.809		80,27%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.499		1.334		88,95%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.475		73,77%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.864		36.719		99,61%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		34.884		34.740		99,59%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.980		1.979		99,97%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		41.539		38.564		92,84%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.300		1.292		99,38%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.749		13.633		92,43%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.241		6.009		82,99%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10.886		10.861		99,77%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.563		4.969		89,32%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67.526		62.020		91,85%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		37.200		36.900		99,19%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		50		50		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.326		25.120		82,83%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.442		12.765		65,66%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17.642		10.965		62,15%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		283.346		273.992		96,70%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23.553		21.015		89,22%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3		3		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.570		11.015		95,20%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		65.376		61.943		94,75%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		182.847		180.019		98,45%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN KERJASAN					479.695		461.928	479.695	96,30%		1.Aplikasi SIPD RI yang sering eror dan maintenance 2..Laporan realisasi anggaran/keuangan masih input di SiPEPAK karena belum terintegrasinya dengan SIPDRI	Tingkatkan kinerja di tahun 2025 sesuai rentra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		479.695		461.928		96,30%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.952		3.950		99,95%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.952		1.952		100,00%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.998		99,90%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.430		24.430		100,00%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		22.440		22.440		100,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		24		24		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.990		1.990		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		9		9		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		25.952		25.952		100,00%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.854		1.854		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.756		6.756		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		22		22		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.726		2.726		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.025		4.025		100,00%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.831		4.831		100,00%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.960		3.960		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		22		22		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		32.307		32.130		99,45%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		32.307		32.130		99,45%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72.309		64.463		89,15%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.992		4.990		99,96%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17.259		12.952		75,05%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		50.058		46.520		92,93%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		48		48		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		320.744		311.003		96,96%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13.060		12.056		92,31%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.774		9.774		100,00%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		297.910		289.173		97,07%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN KAJEKSAN					354.688		340.721	354.688	96,06%		Harga lebih tinggi dari nilai pagu anggaran sehingga tidak bisa dibelanjakan , kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan serta faktor Sistem eroor dan membutuhkan waktu yang lama.	Tingkatkan kinerja pada tahun 2025 sesuai rentra OPD	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		354.688		340.721		96,06%				
			Nilai Kematangan Organisasi	nilai		35		41		117,14%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		3.712		92,80%				
			Persentase capaian kinerja <i>subgiat</i>	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		1.845		92,25%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.867		93,35%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2		2		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		39.571		39.145		98,92%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		37.571		37.235		99,11%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		1.910		95,50%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.824		37.508		96,61%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.158		2.158		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.339		10.807		95,31%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.622		6.622		100,00%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.380		9.072		96,72%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.525		7.229		96,07%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.620		90,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40.621		36.454		89,74%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.199		24.032		85,22%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.422		12.422		100,00%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		124.414		120.691		97,01%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.980		1.980		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.318		19.215		86,10%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100.116		99.496		99,38%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.258		103.211		96,23%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		21.050		18.363		87,24%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		86.208		84.848		98,42%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN JATI					3.902.751		3.770.265	3.902.751	96,61%		1. Waktu pengumpulan data dukung tidak tepat waktu sehingga memperlambat penginpiutan di SIPD 2. Pelaksanaan Kegiatan kadang molor tidak sesuai RAK	capaian kinerja tergolong tinggi, untuk tahun kedepan dipertahankan dan ditingkatkan lagi	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.902.751		3.770.265		96,61%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)	Nilai		46		43		93,48%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.879		10.979		100,92%				
			Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.475		6.214		113,50%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.404		4.766		88,19%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.559.212		2.485.944		97,14%				
			Persentase Anggaran realisasi anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	Persen		85		100		117,65%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.512.778		2.438.067		97,03%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		19		19		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.017		45.460		103,28%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.417		2.417		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.537		185.430		87,66%				
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.040		6.040		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		31.142		30.515		97,99%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.715		14.711		99,97%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13.590		13.586		99,97%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.351		15.351		100,00%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.680		93,33%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.692		15.436		92,47%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		112.206		88.112		78,53%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		192.982		177.946		92,21%				
			Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		76.659		75.505		98,49%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		64.107		52.260		81,52%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		52.216		50.180		96,10%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		368.625		363.662		98,65%				
			Prosentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.400		2.400		100,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60.733		56.293		92,69%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		305.492		304.969		99,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		559.516		546.304		97,64%				
			Prosentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		117.666		113.140		96,15%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		11		11		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.822		18.145		83,15%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		340.030		335.882		98,78%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		79.998		79.137		98,92%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
KECAMATAN UNDAAN					3.809.611		3.635.728	3.809.611	95,44%		1. adanya kegiatan pada seksi bidang dalam efisiensi anggaran, 2. adanya realisasi anggaran yang tidak tercapai karena tidak semua peralatan mesin membutuhkan pemeliharaan	capaian triwulan IV sudah tergolong tinggi, utk tahun kedepan pertahankan dan tingkatkan kinerjanya	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.809.611		3.635.728		95,44%				
			Nilai Kematangan OPD	Nilai		40		41		102,50%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.051		28.826		95,92%				
			Persetase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Persentase		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.951		17.102		95,27%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		17		17		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.100		11.725		96,89%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.389.509		2.303.445		96,40%				
			Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	Persen Keatas		90		90		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.345.016		2.265.194		96,60%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		19		19		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40.353		34.300		85,00%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.140		3.951		95,43%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		135.825		127.587		93,93%				
			Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar	Persentase		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.000		9.895		98,95%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.447		30.623		94,38%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.959		11.055		92,44%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.290		11.954		78,18%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.731		13.798		87,71%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400		2.400		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.000		3.000		100,00%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		44.998		44.862		99,70%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		2		2		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.240		220.298		93,25%				
			Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		78.240		72.000		92,02%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		158.000		148.298		93,86%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		40		40		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.878		128.315		77,82%				
			Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		1.498		99,87%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		97.930		61.482		62,78%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		65.448		65.335		99,83%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		853.108		827.257		96,97%				
			Persentase BMD dalam Kondisi baik	Persentase		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		119.392		103.302		86,52%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.402		9.820		63,76%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		712.824		709.085		99,48%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.490		5.050		91,99%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN MEJOBLO					3.879.326		3.728.512	3.879.326	96,11%		1. Pelaksanaan kegiatan kadang tidak sesuai dengan rencana anggaran Kas sehingga memperlambat realisasi anggaran 2. Waktu pengumpulan data / penyusunan data kurang cepat sehingga untuk pembuatan buku profil tidak dapat terealisasi untuk kegiatan seksi Kesra.	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi dan sesuai target 100 %, pertahankan untuk tahun mendatang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.879.326		3.728.512		96,11%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		41		42		102,44%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.918		15.620		87,17%				
			Persentase capaian kinerja sub kegiatan	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.350		7.742		82,80%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.568		7.878		91,95%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.007.754		2.911.273		96,79%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.964.559		2.874.090		96,95%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		19		19		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		41.682		36.300		87,09%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.513		883		58,36%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		99.935		82.907		82,96%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.990		5.625		93,91%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18.551		15.949		85,97%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.396		8.989		95,67%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.532		8.532		100,00%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.021		6.204		77,34%				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.850		91,67%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.468		2.248		91,09%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		42.777		31.510		73,66%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		129.400		122.900		94,98%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		3.098		2.900		93,61%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		73.405		69.250		94,34%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		30		30		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		52.897		50.750		95,94%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		9		9		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		168.677		162.960		96,61%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		1.500		50,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		58.250		56.660		97,27%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		107.427		104.800		97,55%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		455.642		432.853		95,00%				
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		114.071		104.735		91,82%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.327		17.140		60,51%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		35		35		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		313.244		310.978		99,28%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN JEKULO					4.002.953		3.858.727	4.002.953	96,40%		Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	Capaian sudah tergolong tinggi,pertahankan dan tingkatkan pada periode tahun berikutnya	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.002.953		3.858.727		96,40%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		45		42		93,33%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.178		6.976		85,31%				
			Prosentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.690		5.609		83,85%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.488		1.367		91,87%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.771.041		2.671.905		96,42%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen ke atas		80		80		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.725.861		2.628.585		96,43%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		17		17		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		45.180		43.320		95,88%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		105.559		86.175		81,64%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.409		12.533		81,33%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.506		20.833		85,01%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		39		39		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.300		7.481		72,63%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24		24		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.399		11.248		78,12%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.847		3.455		71,28%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.090		73,57%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.226		1.631		73,27%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4		4		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		29.672		25.904		87,30%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		293.356		280.710		95,69%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		137.137		127.164		92,73%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		29		29		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		156.219		153.546		98,29%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		35		35		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		206.694		206.135		99,73%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		2.500		83,33%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		82.260		82.901		100,78%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		121.434		120.734		99,42%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		618.124		606.825		98,17%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		98.129		87.515		89,18%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		208.402		209.177		100,37%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		311.593		310.132		99,53%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN BAE					3.334.727		3.163.687	3.334.727	94,87%		Pelaksanaan kegiatan kadang tidak sesuai dengan rencana anggaran kas sehingga memperlambat realisasi anggaran.	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.334.727		3.163.687		94,87%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)	Nilai		39		41		105,13%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.061		27.461		88,41%				
			Persentase Capaian kinerja sub kegiatan	Indeks		83		83		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.175		20.175		100,00%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.886		7.287		66,93%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.527.705		2.451.267		96,98%				
			Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/ DPPA	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.481.896		2.408.134		97,03%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		20		20		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		43.811		41.360		94,41%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.999		1.773		88,72%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		109.927		72.570		66,02%				
			Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.992		1.992		100,00%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		3		42,86%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.091		15.077		68,25%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		35		35		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.474		5.246		95,83%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.525		10.084		69,43%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.544		8.121		77,02%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.281		3.281		100,00%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47.820		24.569		51,38%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		135.989		130.895		96,25%				
			Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Mebel		39.003		38.185		97,90%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		96.986		92.710		95,59%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		203.048		173.277		85,34%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.400		850		35,42%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		73.350		59.683		81,37%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		127.298		112.744		88,57%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		326.997		308.216		94,26%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		133.362		131.102		98,31%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		178.408		163.309		91,54%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.227		13.805		90,66%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		8		8		100,00%			
KECAMATAN GEBOG					3.750.970		3.535.861	3.750.970	94,27%		Dukungan dan komitmen pejabat	Capaian triwulan IV 2024 sudah	

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.750.970		3.535.861		94,27%		struktural dalam melaksanakan perjanjian kinerja	menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Indeks		44		42		95,45%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43.450		40.286		92,72%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.660		28.688		96,72%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.790		11.598		84,10%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		8		8		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.664.323		2.476.784		92,96%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen ke atas		85		85		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.616.747		2.429.972		92,86%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		23		23		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.577		43.856		98,38%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.000		2.956		98,56%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		129.391		128.184		99,07%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		13.532		13.139		97,09%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		31.870		31.793		99,76%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		39		39		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.999		9.996		99,97%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24		24		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.596		9.243		96,32%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.004		7.941		99,22%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400		2.310		96,25%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.990		3.962		99,30%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000		49.800		99,60%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		107.594		99.695		92,66%				
			Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		107.594		99.695		92,66%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		544.682		529.787		97,27%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		2.960		98,67%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		65.167		52.135		80,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		476.515		474.692		99,62%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Disediakan										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		261.531		261.126		99,85%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		103.535		103.407		99,88%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		137.696		137.469		99,84%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.300		20.250		99,75%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5		5		100,00%			
KECAMATAN DAWE					4.133.951		3.967.014	4.133.951	95,96%		1. ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan 2. ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terkait dengan OPD lain	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.133.951		3.967.014		95,96%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		43		41		95,35%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.140		13.997		92,45%				
			Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.890		9.231		93,34%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		11		11		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.250		4.766		90,78%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.141.182		3.036.794		96,68%				
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen ke atas		85		85		100,00%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.097.942		3.001.694		96,89%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		22		22		100,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		42.240		34.210		80,99%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.000		890		89,02%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		162.265		146.263		90,14%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.000		3.856		77,12%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.000		13.281		88,54%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		20		20		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		50.833		43.685		85,94%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.006		10.317		85,93%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.658		3.125		85,43%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		2.825		67,26%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.242		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70.326		69.174		98,36%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		12		12		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		191.752		178.376		93,02%				
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.484		1.400		56,36%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		73.630		61.806		83,94%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		115.638		115.171		99,60%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		623.612		591.584		94,86%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		88.188		67.763		76,84%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		519.490		515.826		99,29%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.934		7.995		50,17%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.526.946		4.229.713	4.526.946	93,43%		Dengan hanya ada dua unit kendaraan operasional roda empat, memperlambat pelaksanaan tugas-tugas yang agendanya bersamaan. Kegiatan aspirasi dari Dewan, sering tidak sesuai dengan jadwal yang	Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta target	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.526.946		4.229.713		93,43%				
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		35		37		105,71%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.093		26.728		80,77%				

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	Dokumen		22		22		100,00%	sudah direncanakan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan yang melibatkan anggota Forkopimda, harus menyesuaikan dengan agenda-agenda lain anggota Forkopimda, sehingga sulit untuk memenuhi jadwal. Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak sesuai jadwal karena pengajuan permohonan terlambat	program/kegiatan/ sub kegiatan juga disesuaikan.	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		27.173		21.804		80,24%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.920		4.924		83,17%				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12		12		100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.711.273		3.484.705		93,90%				
			Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA	Persen		100		93,89		93,89%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.630.703		3.404.965		93,78%				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		20		22		110,00%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		79.570		78.740		98,96%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.000		1.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		187.424		175.805		93,80%				
			Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.497		1.409		94,12%				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29.999		29.338		97,79%				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.757		3.740		99,55%				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.958		10.716		82,70%				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.524		18.203		93,23%				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		2.940		70,00%				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115.489		109.460		94,78%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		60		60		100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		284.679		270.314		94,95%				
			Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barjas dan RKBu)	Unit		10		10		100,00%			
			Pengadaan Mebel		35.682		31.757		89,00%				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		242.818		232.542		95,77%				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		11		11		100,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.179		6.015		97,35%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.837		160.644		95,71%				
			Cakupan Keterpenuhihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.992		1.700		85,34%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		30.180		23.429		77,63%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		24		24		100,00%			

PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		135.665		135.514		99,89%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		142.640		111.518		78,18%				
			Jumlah Unit BMD Yang Dipelihara Sesuai Standar	Unit		24		24		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		47.650		40.137		84,23%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		82.460		64.312		77,99%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12		12		100,00%			
			Pemeliharaan Mebel		1.000		980		98,00%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		3		3		100,00%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.530		6.090		52,82%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3		3		100,00%			

3.1.6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT RKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN					1.065.473		860.103	1.065.473	80,72%		Faktor penghambat dapat diminimalisir sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik	Kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi, agar dipertahankan untuk tahun sebelumnya. Agar diinformasikan pada kolom faktor pendorong atau faktor penghambat terkait	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.065.473		860.103		80,72%				
				Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		70		77,55		110,79%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%		informasi hasil penataan administrasi pemerintahan, hasil pengelolaan administrasi kewilayahan hasil fasilitasi pelaksanaan otda, hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri, luar negeri dan hasil evaluasinya	
				Administrasi Tata Pemerintahan		1.033.149		836.624		80,98%				
				Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan	Persen		90		100		111,11%			
				Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah	Persen		50		85,55		171,10%			
				Penataan Administrasi Pemerintahan		108.434		78.608		72,49%				
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		19		19		100,00%			
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		175.762		153.859		87,54%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		9		9		100,00%			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		748.953		604.158		80,67%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen		9		9		100,00%			
				Fasilitasi Kerjasama Daerah		32.324		23.478		72,63%				
				Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi	Persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		23.829		16.453		69,05%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		5		11		220,00%			
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		8.495		7.025		82,70%				
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		1		1		100,00%			
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					89.023.639		86.002.299	89.023.639	96,61%		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/lembaga terkait	Kategori capaian kinerja fisik dan keuangan sangat tinggi, untuk dipertahankan. Agar diinformasikan pada kolom faktor pendorong dan atau faktor penghambat terkait keterisian data dalam SIPD yang seharusnya menjadi tanggungjawab Bagian Kesra yang notabene adalah keluaran aktivitas yang dilakukan yaitu Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi, Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Hasil Fasilitasi,	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		89.023.639		86.002.299		96,61%				
				Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		70		77,75		111,07%			
				Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		89.023.639		86.002.299		96,61%				
				Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen		90		100		111,11%			
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		33.253.548		31.815.089		95,67%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen		34		34		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pengelolaan Bina Mental Spiritual								Keterbatasan pengadaan buku peraturan perundang- undangan terbaru dari Pihak Ketiga, sehingga kebutuhan informasi sebagai bentuk layanan kepada masyarakat tidak bisa optimal	Kategori capaian kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi, agar dapat dipertahankan. Agar mempertimbangkan pengisian data yang dijamin dalam e validasi SIPD yaitu masalah hukum yang diselesaikan dan masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan yang notabene merupakan output aktifitas dalam subkegiatan yang dilakukan.	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		10.868.212		10.378.421		95,49%				
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	Dokumen		7		7		100,00%			
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		44.901.879		43.808.789		97,57%				
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		22		22		100,00%			
	BAGIAN HUKUM					533.957		482.922	533.957	90,44%		Keterbatasan pengadaan buku peraturan perundang- undangan terbaru dari Pihak Ketiga, sehingga kebutuhan informasi sebagai bentuk layanan kepada masyarakat tidak bisa optimal	Kategori capaian kinerja fisik sangat tinggi dan kinerja keuangan tinggi, agar dapat dipertahankan. Agar mempertimbangkan pengisian data yang dijamin dalam e validasi SIPD yaitu masalah hukum yang diselesaikan dan masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan yang notabene merupakan output aktifitas dalam subkegiatan yang dilakukan.	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		533.957		482.922		90,44%				
				Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		70		77,55		110,79%			
				Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		533.957		482.922		90,44%				
				IRH (Indeks Reformasi Hukum)	Indeks		56		87,72		156,64%			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		139.560		108.991		78,10%				
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen		200		320		160,00%			
				Fasilitasi Bantuan Hukum		264.399		262.264		99,19%				
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		8		8		100,00%			
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		129.999		111.667		85,90%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		250		424		169,60%			
	BAGIAN PEREKONOMIAN					427.908		380.723	427.908	88,97%		Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA sebagian besar baru dilaksanakan pada triwulan IV karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi dan menunggu GU 1 Setda. Angka Inflasi Daerah dalam 1 Tahun berada di bawah target Daerah 3 +/- 1 % dan target Nasional 2,5 +/- 1 %. Rendahnya angka inflasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus, tetapi terjadi secara Nasional. Angka Inflasi Nasional tahun 2024 merupakan angka inflasi terendah sejak perhitungan inflasi pertama di tahun 1958.	Kategori capaian kinerja fisik sangat tinggi agar dipertahankan dan kinerja keuangan tinggi perlu ditingkatkan. Agar dijelaskan dalam kolom pendorong dan atau penghambat hal-hal terkait ketersediaan data yang menjadi tusi bagian perekonomian sebagaimana diamatkan dalam walidata SIPD yaitu Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD. Data-data tersebut notabene dihasilkan dalam aktivitas pelaksanaan subkegiatan. Terkait ketercapaian angka inflasi yang belum sesuai target, agar ditambahkan upaya intervensi sesuai kewenangan Sekda yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian.	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		427.908		380.723		88,97%				
				Angka inflasi daerah dalam satu tahun	Angka		2		1,71		85,50%			
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		77.908		72.305		92,81%				
				Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba	Persen		80		100		125,00%			
				Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	Persen		100		96		96,00%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		35.000		34.722		99,21%				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		8		8		100,00%			
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		42.908		37.582		87,59%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		16		16		100,00%			
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		350.000		308.418		88,12%				
				Persentase realisasi DBHCHT	Persen		55		93,01		169,11%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		350.000		308.418		88,12%				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen		4		4		100,00%			
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					184.886		168.015	184.886	90,88%		(1) Kurang disiplinnya PD dalam mengisi e-planning terkait data kinerja dan realisasi anggaran (2) belum optimalnya aplikasi SIPD terutama di penatausahaan (3) belum optimalnya LHPM SPIP, terutama pada	capaian kinerja fisik maupun keuangan kategori sangat tinggi untuk dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Agar menambahkan penjelasan di kolom faktor pendorong atau faktor penghambat terkait penjelasan/informasi pelaksanaan tugas hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah, hasil pengendalian	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		184.886		168.015		90,88%				
				MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai		2,8		2,89		103,21%			
				Angka inflasi daerah dalam satu tahun	Angka		3		1,71		57,00%			
				Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	Persen		70		80,7		115,29%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah</i>	<i>Persen</i>		65		78,5		120,77%	pemenuhan data dukung	dan evaluasi program pembangunan dan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan ada gambaran kekurangan dan atau keberhasilan pelaksanaan tugas yang dimandatkan.	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		184.886		168.015		90,88%				
				Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu	<i>Persen</i>		90		96,84		107,60%			
				Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3	<i>Persen</i>		14,7		94,2		640,82%			
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		57.932		50.774		87,64%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	<i>Dokumen</i>		1		1		100,00%			
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		100.359		92.616		92,28%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	<i>Laporan</i>		12		12		100,00%			
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		26.595		24.625		92,59%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	<i>Laporan</i>		2		2		100,00%			
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.462.785		1.350.184	1.462.785	92,30%		-	Capaian kinerja fisik dan capaian kinerja keuangan sangat tinggi agar dipertahankan. Terkait pemenuhan data Orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa agar dipertimbangkan dipenuhi dalam tahun 2025. Dukungan pencapaian nilai MCP KPK di bidang pengadaan barang dan jasa agar terus ditingkatkan karena masih pada angka 83, 09%. Dukungan P3DN agar terus ditingkatkan.	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.462.785		1.350.184		92,30%				
				<i>Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan</i>	<i>Persen</i>		70		80,7		115,29%			
				<i>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah</i>	<i>Persen</i>		65		86,88		133,66%			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1.462.785		1.350.184		92,30%				
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	<i>Indeks</i>		85,6		86,86		101,47%			
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	<i>persen</i>		5		0		0,00%			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		533.566		466.116		87,36%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		41		37		90,24%			
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		535.898		501.204		93,53%				
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		38		38		100,00%			
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		393.321		382.864		97,34%				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		328		333		101,52%			
SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD					35.956.672		25.020.043	35.956.672	69,58%		Perlunya mengakumulasi waktu yang digunakan agar realisasi tercapai sesuai time line	Tingkatkan koordinasi dan sinergi antara DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mendukung efektifitas capaian kinerja	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		35.956.672		25.020.043		69,58%				
				Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	Persen		100		86		86,00%			
				Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	Persen		100		100		100,00%			
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		2.675.023		2.220.381		83,00%				
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen		18		18		100,00%			
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		484.420		412.897		85,24%				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		3		4		133,33%			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		941.898		694.199		73,70%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		4		4		100,00%			
				Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan		367.204		283.650		77,25%				
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		600.000		584.519		97,42%				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		6		6		100,00%			
				Penyusunan Tata Tertib DPRD		281.501		245.116		87,07%				
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		4		4		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pembahasan Kebijakan Anggaran		894.700		743.342		83,08%				
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen		12		12		100,00%			
				Pembahasan APBD		894.700		743.342		83,08%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		12		12		100,00%			
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		12.032.932		6.873.037		57,12%				
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD	Laporan		112		100		89,29%			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		12.032.932		6.873.037		57,12%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		112		100		89,29%			
				Peningkatan Kapasitas DPRD		9.931.457		8.888.032		89,49%				
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan		472		472		100,00%			
				Pendalaman Tugas DPRD		2.338.147		1.660.348		71,01%				
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		14		14		100,00%			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		232.400		62.500		26,89%				
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		13		6		46,15%			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		318.000		306.000		96,23%				
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		84		84		100,00%			
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD		7.042.910		6.859.184		97,39%				
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		442		442		100,00%			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1.368.049		1.144.807		83,68%				
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Laporan		10		13		130,00%			
				Kunjungan Kerja dalam Daerah		13.050		0		0,00%				
				Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		6		9		150,00%			
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		42.400		8.060		19,01%				
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pelaksanaan Reses		1.312.599		1.136.747		86,60%				
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		2		2		100,00%			
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		766.703		161.868		21,11%				
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		7		12		171,43%			
				Penyusunan Kode Etik DPRD		556.163		0		0,00%				
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		1		0		0,00%			
				Pengawasan Kode Etik DPRD		210.540		161.868		76,88%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		6		15		250,00%			
				Fasilitasi Tugas DPRD		8.287.808		4.988.575		60,19%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen		210		131		62,38%			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1.153.072		801.938		69,55%				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		21		16		76,19%			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1.413.510		1.200.231		84,91%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		19		23		121,05%			
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		5.721.226		2.986.406		52,20%				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		170		93		54,71%			

3.1.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH					1.619.774		981.868	1.619.774	60,62%		1.Adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan	Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi terkait	

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		754.905		377.866		50,05%		pengawasan dimana pada awalnya dilakukan dengan berkunjung ke perangkat daerah dan/atau mengundang perangkat daerah ke inspektorat daerah berubah menjadi hanya pengiriman data dukung (softfile) dan dikerjakan di kantor (sub kegiatan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pengawasan karena adanya percepatan tugas mandatory yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah. 2. Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara sampai triwulan IV tahun 2024 belum ada realisasi keuangan dikarenakan kegiatan tersebut berdasarkan aduan yang masuk yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sampai akhir triwulan IV, belum ada aduan yang masuk yang berpotensi menimbulkan kerugianA negara.	dengan pengaduan dan pengendalian atas kerugian negara sehingga masyarakat lebih memahami dan aktif dalam mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan Pemkab.	
				Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen		86		86		100,00%			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	Persen		70		70		100,00%			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	Persen		70		70		100,00%			
				Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart	persen		100		100		100,00%			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		527.265		245.901		46,64%				
				Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko)	Persen		100		95		95,00%			
				jumlah obyek pengawasan internal	laporan		8		8		100,00%			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		144.828		48.798		33,69%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		46		46		100,00%			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		35.813		10.904		30,45%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		35		54		154,29%			
				Reviu Laporan Kinerja		79.594		26.871		33,76%				
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		54		54		100,00%			
				Reviu Laporan Keuangan		47.670		36.860		77,32%				
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		10		10		100,00%			
				Pengawasan Desa		138.965		65.673		47,26%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		24		24		100,00%			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		80.395		56.796		70,65%				
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		9		7		77,78%			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		227.640		131.965		57,97%				
				rata-rata Persentase realisasi PDTT (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu), pengawasan atas dasar perintah atasan, dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		4.855		0		0,00%				
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		1		0		0,00%			
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		222.785		131.965		59,23%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		27		31		114,81%			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		864.869		604.003		69,84%				
				Indeks integritas	Nilai		78		75,77		97,14%			
				Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)	persen		93		92,93		99,92%			
				Pendampingan dan Asistensi		864.869		604.003		69,84%				
				persentase penurunan Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan internal dan eksternal	Persen		25		25		100,00%			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		55.892		9.593		17,16%				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah		34		34		100,00%			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		133.232		57.686		43,30%				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		34		34		100,00%			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		619.440		517.943		83,61%				
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		43		53		123,26%			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		56.305		18.781		33,36%				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		34		34		100,00%			

3.1.8. Unsur Kewilayahan

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN	KECAMATAN KALIWUNGU					814.486		774.997	814.486	95,15%		Sudah mulai turun hujan yang intensif menjadikan peningkatan kewaspadaan seluruh masyarakat Kecamatan Kaliwungu untuk pencegahan dan mitigasi potensi bencana di wilayah ini. Pencegahan dan mitigasi ini dilakukan secara dini dimulai dari tingkat Desa siaga bencana dan Kecamatan Tanggap Bencana agar tidak menimbulkan efek yang besar akibat potensi bencana.	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24.951		22.381		89,70%				
				Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan	persen		91		90		98,90%			
				Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi	persen		74		72		97,30%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		10.339		8.291		80,19%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10.339		8.291		80,19%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		11		11		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		14.612		14.090		96,43%				
				Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.	persen		100		95		95,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		14.612		14.090		96,43%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		6		6		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		246.904		231.800		93,88%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	persen		88		85		96,59%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		246.904		231.800		93,88%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec		46.630		46.001		98,65%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		200.274		185.799		92,77%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		15		15		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		183.823		181.944		98,98%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		183.823		181.944		98,98%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		62		62		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		183.823		181.944		98,98%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		162.345		152.474		93,92%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		87		85		97,70%			
				Persentase layanan kecamatan sesuai	persen		83		80		96,39%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		162.345		152.474		93,92%				
				Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		108.608		107.706		99,17%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		53.737		44.768		83,31%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		6		6		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		196.463		186.398		94,88%				
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	persen		95		90		94,74%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		196.463		186.398		94,88%				
				Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12.350		12.350		100,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		4		4		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		62.810		58.400		92,98%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		99		99		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		112.998		108.841		96,32%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		15		15		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan Desa		6.807		6.807		100,00%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.498		0		0,00%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN KOTA KUDUS					406.419		367.466	406.419	90,42%		Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan untuk tahun mendatang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		72.612		64.527		88,87%				
				Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	angka		92,2		90		97,61%			
				Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	angka		74		74		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		69.037		62.002		89,81%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		54.105		49.370		91,25%				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		6		6		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		14.932		12.632		84,60%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1		1		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		3.575		2.525		70,63%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		3.575		2.525		70,63%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>		126.540		113.810		89,94%				
				<i>Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	persen		90		100		111,11%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		126.540		113.810		89,94%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	kegiatan		2		2		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		15.300		8.150		53,27%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		111.240		105.660		94,98%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>		127.865		114.543		89,58%				
				<i>Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi</i>	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		127.865		114.543		89,58%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		127.865		114.543		89,58%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		18.993		14.997		78,96%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		18.993		14.997		78,96%				
				Presentase tindakanlanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		18.993		14.997		78,96%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		60.409		59.589		98,64%				
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes	persen		95		100		105,26%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		60.409		59.589		98,64%				
				Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	dokumen		65		65		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		13.444		13.444		100,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		144		144		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		3.485		3.485		100,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		144		142		98,61%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		30.795		29.975		97,34%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		48		32		66,67%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan Desa		8.300		8.300		100,00%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		4.385		4.385		100,00%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KELURAHAN PURWOSARI					1.530.154		1.480.142	1.530.154	96,73%		kurangnya komunikasi antar seksi dalam pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 bisa lebih ditingkatkan kinerja pada OPD sesuai renstra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.252.084		1.240.159		99,05%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.252.084		1.240.159		99,05%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan teralisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.647		4.647		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarak atan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		981.793		971.118		98,91%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		6		6		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		265.644		264.395		99,53%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		7		7		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		66.800		59.974		89,78%				
				Persentase dukungan SPM bidang Trantibum dan Kebencanaan	Persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		66.800		59.974		89,78%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi	Persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		66.800		59.974		89,78%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		211.270		180.010		85,20%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		211.270		180.010		85,20%				
				Presentase tindakanlanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		211.270		180.010		85,20%		jaringan internet yang kurang stabil sehingga upload data pada aplikasi terkendala	Capaian kinerja lebih dari 90% pada triwulan IV Tahun 2024 sehingga di Tahun 2025 lebih ditingkatkan lagi kinerja pada tahun 2025 sesuai rentra OPD	
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN SUNGGINGAN					992.169		984.088	992.169	99,19%				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		828.185		823.003		99,37%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		828.185		823.003		99,37%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3.136		3.136		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		601.407		596.312		99,15%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		6		6		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		223.641		223.555		99,96%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		6		6		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		46.520		44.520		95,70%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		46.520		44.520		95,70%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		46.520		44.520		95,70%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		117.464		116.565		99,23%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Persentase Konflik yang tertangani</i>	<i>persen</i>		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		117.464		116.565		99,23%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		117.464		116.565		99,23%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN PANJUNAN					778.504		642.373	778.504	82,51%		Proses pengerjaan dengan pihak ketiga yang membutuhkan banyak koordinasi serta Sistem Pemerintahan yang selalu dinamis, membutuhkan banyak waktu dalam penyelesaiannya	Pencapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2024 sudah di atas 90% namun realisasi keuangan masih kurang dari 90% sehingga di tahun 2025 perlu ditingkatkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan harus sesuai renstra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		600.650		480.917		80,07%				
				<i>Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	<i>persen</i>		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		600.650		480.917		80,07%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.000		3.951		98,76%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		324.728		240.544		74,08%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		8		8		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		271.923		236.423		86,94%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		4		4		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		64.345		59.880		93,06%				
				<i>Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		64.345		59.880		93,06%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		64.345		59.880		93,06%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		7		7		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		113.509		101.575		89,49%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		113.509		101.575		89,49%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		113.509		101.575		89,49%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN WERGU WETAN					1.375.417		1.336.488	1.375.417	97,17%		Kendala Kegiatan OPD : 1. Secara umum Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik sudah tercapai sebesar 97,51 %. 2. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik belum tercapai yaitu sebesar 72,98 % hal dikarenakan pelaksana kegiatan prodeskel yang notebene para anggota Karang Taruna untuk Tahun 2024 melaksanakan kegiatan lain yaitu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak, sehingga pelaksanaan prodeskel tidak dapat berjalan dengan maksimal.	Tingkatkan kinerja pada tahun 2025 sesuai renstra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.220.059		1.211.143		99,27%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.220.059		1.211.143		99,27%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.000		5.000		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.099.280		1.090.551		99,21%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		9		9		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		115.779		115.592		99,84%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		6		6		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		44.300		44.300		100,00%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		44.300		44.300		100,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		44.300		44.300		100,00%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		111.058		81.045		72,98%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		111.058		81.045		72,98%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		111.058		81.045		72,98%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
				Tersusunnya Data Monografi Kelurahan Wergu Wetan Tahun 2023	Dokumen		1		0		0,00%			
				Tersusunnya Buku Profil Kelurahan Wergu Wetan Tahun 2023	Buku		6		0		0,00%			
	KELURAHAN WERGU KULON					832.999		820.395	832.999	98,49%		Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. Secara umum Realisasi serapan baik Anggaran maupun Fisik sudah tercapai sebesar 97,74 % :	Pertahankan kinerja pada Kelurahan Wergu Kulon sehingga di tahun 2025 bisa tercapai target rentra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		676.628		667.680		98,68%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		676.628		667.680		98,68%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3.517		3.517		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		10		10		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		476.886		472.133		99,00%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		5		5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		196.225		192.030		97,86%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		14		14		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		59.962		59.962		100,00%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		59.962		59.962		100,00%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		59.962		59.962		100,00%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		96.409		92.752		96,21%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		100		100		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		96.409		92.752		96,21%				
				Presentase tindakanlanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		96.409		92.752		96,21%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN MLATI KIDUL					1.395.466		1.221.838	1.395.466	87,56%		1) Tidak ada Balita yang masuk kriteria Balita KEP dan Karang Taruna kurang aktif sehingga serapan anggaran pemberdayaan kurang maksimal; 2) Keterlambatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan sehingga ada kegiatan	Pencapaian realisasi kinerja triwulan IV Tahun 2024 melebihi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sehingga pada tahun 2025 agar dipertahankan sesuai rentra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.239.524		1.087.676		87,75%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.239.524		1.087.676		87,75%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.650		5.650		100,00%		fisik yang selesai di Bulan desember.		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		933.535		889.303		95,26%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		3		3		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		300.340		192.723		64,17%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		5		5		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		62.542		49.083		78,48%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		62.542		49.083		78,48%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		62.542		49.083		78,48%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		93.400		85.079		91,09%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		93.400		85.079		91,09%				
				Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		93.400		85.079		91,09%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN MLATINOROWITO					1.185.744		1.117.534	1.185.744	94,25%		Melaksanakan suatu kegiatan serta membuat perencanaan dalam suatu kegiatan yang tidak tepat merupakan faktor penghambat	Pencapaian kinerja triwulan IV Tahun 2024 capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.026.036		1.002.551		97,71%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.026.036		1.002.551		97,71%		kegiatan tersebut.	kinerja sehingga pada tahun 2025 capaian kinerja harus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai renstra OPD	
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3.500		3.440		98,29%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		852.755		843.346		98,90%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		4		4		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		169.781		155.765		91,74%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		4		4		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		36.055		32.608		90,44%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		36.055		32.608		90,44%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		36.055		32.608		90,44%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		123.654		82.375		66,62%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		123.654		82.375		66,62%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		123.654		82.375		66,62%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KELURAHAN KERJASAN					852.331		845.932	852.331	99,25%		1.Aplikasi SIPD RI yang sering eror dan maintenance 2..Laporan realisasi anggaran/keuangan masih input di SiPEPAK karena belum terintegrasinya dengan SIPDRI	Tingkatkan kinerja di tahun 2025 sesuai rentra OPD	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		500.485		495.572		99,02%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		80,34		89,27%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		500.485		495.572		99,02%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan teralisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3.084		3.084		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarak atan		5		5		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		184.671		182.128		98,62%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		9		9		100,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		312.729		310.360		99,24%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		17		17		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100.038		100.004		99,97%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100.038		100.004		99,97%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100.038		100.004		99,97%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		251.809		250.356		99,42%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		251.809		250.356		99,42%				
				Presentase tindakanlanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		169.119		168.804		99,81%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		30		30		100,00%	Harga lebih tinggi dari nilai pagu anggaran sehingga tidak bisa dibelanjakan , kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan serta faktor Sistem eroor dan membutuhkan waktu yang lama.	Tingkatkan kinerja pada tahun 2025 sesuai rentra OPD	
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		82.690		81.553		98,62%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN KAJEKSAN					1.275.640		1.142.787	1.275.640	89,59%				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.140.944		1.016.223		89,07%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		90		90		100,00%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.140.944		1.016.223		89,07%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	kegiatan		3		3		100,00%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.200		4.200		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		878.551		804.264		91,54%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		5		4		80,00%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		258.194		207.759		80,47%				
				Jml Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		4		4		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		70.000		67.276		96,11%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		70.000		67.276		96,11%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		70.000		67.276		96,11%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		11		11		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		64.696		59.288		91,64%		1.Waktu pengumpulan data dukung tidak tepat waktu sehingga memperlambat peninpiutan di SIPD 2. Pelaksanaan Kegiatan kadang molor tidak sesuai RAK	capaian kinerja tergolong tinggi, untuk tahun kedepan dipertahankan dan ditingkatkan lagi	
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		64.696		59.288		91,64%				
				Presentase tindakanjnut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		64.696		59.288		91,64%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KECAMATAN JATI					589.408		560.893	589.408	95,16%				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		89.989		69.615		77,36%				
				Nilai kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibum	Persen		74		75		101,35%			
				Nilai kepuasan layanan Kecamatan	Persen		86		86		100,00%			
				Persentase dukungan SPM Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial yang Terealisasi	Persen		83		83		100,00%			
				Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar	Persen		85		85		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		78.416		58.143		74,15%				
				Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	Persen		60		100		166,67%			
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		67.655		49.143		72,64%				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10.761		9.001		83,64%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		11.573		11.471		99,12%				
				Jumlah Dokumen koordinasi atau sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Pelayanan Umum	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	laporan		6		6		100,00%			
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait	Persen		50		95		190,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		11.573		11.471		99,12%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		156.684		149.179		95,21%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Desa	Persen		92		92		100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		156.684		149.179		95,21%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	kegiatan		5		5		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		30.000		30.000		100,00%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		12		12		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		126.684		119.180		94,08%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		104.884		112.367		107,13%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	Persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		104.884		112.367		107,13%				
				Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang Dapat Diatasi	Persen		60		100		166,67%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		104.884		112.367		107,13%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		141.986		141.778		99,85%				
				Persentase Konflik yang Tertangani	Persen		92		100		108,70%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		141.986		141.778		99,85%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	Persen		60		100		166,67%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		127.252		127.252		100,00%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		14.734		14.526		98,58%				
				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		95.866		87.955		91,75%				
				Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Persen		95		100		105,26%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		95.866		87.955		91,75%				
				Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	dokumen		5		5		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		14.552		13.803		94,86%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		56		56		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		55.000		51.385		93,43%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		14		14		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		15.000		12.753		85,02%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		28		28		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6.315		6.215		98,42%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%	1. adanya kegiatan pada seksi bidang dalam efisiensi anggaran, 2. adanya realisasi anggaran yang tidak tercapai karena tidak semua peralatan mesin membutuhkan pemeliharaan	capaian triwulan IV sudah tergolong tinggi, utk tahun kedepan pertahankan dan tingkatkan kinerjanya	
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		5.000		3.799		75,98%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN UNDAAN					563.566		553.466	563.566	98,21%				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		57.951		55.015		94,93%				
				Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan	Persentase		90,3		94,97		105,17%			
				Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	Persentase		74		74		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		45.000		42.895		95,32%				
				Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan	Indeks		91,07		94,97		104,28%			
				Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan	Persentase		90,3		100		110,74%			
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		37.000		35.060		94,76%				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		5		5		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8.000		7.835		97,93%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4		4		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		6.961		6.331		90,95%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dg Perangkat Daerah terkait	Persentase		74		74		100,00%			
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dg Perangkat Daerah terkait	Persentase		100		100		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		6.961		6.331		90,95%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		5		5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		5.990		5.789		96,64%				
				Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	Persentase		100		100		100,00%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		5.990		5.789		96,64%				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		173.922		170.311		97,92%				
				Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Persentase		94		90		95,74%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		173.922		170.311		97,92%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi	Laporan		16		16		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		12.000		9.043		75,36%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		161.922		161.268		99,60%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		95.804		94.535		98,67%				
				Persentase dukungan SPM bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi	Persentase		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		95.804		94.535		98,67%				
				Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	Persentase		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		95.804		94.535		98,67%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		87.980		87.894		99,90%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Persentase Konflik yang tertangani</i> 3	<i>Persentase</i>		95		95		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		87.980		87.894		99,90%				
				Persentase Tindaklanjuti Hasil Forkopimcam	Persentase		93		93		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		87.980		87.894		99,90%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		147.909		145.712		98,51%				
				<i>Persentase Desa Tertib Administrasi</i>	<i>Persentase</i>		92		92		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		147.909		145.712		98,51%				
				Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		8.000		7.440		93,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		6.000		5.649		94,15%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		119.000		118.227		99,35%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan Desa		8.909		8.531		95,76%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		6.000		5.865		97,75%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		16		16		100,00%			
	KECAMATAN MEJOBO					464.270		388.293	464.270	83,64%		1. Pelaksanaan kegiatan kadang tidak sesuai dengan rencana anggaran Kas sehingga memperlambat realisasi anggaran 2. Waktu pengumpulan data /	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi dan sesuai target 100 %, pertahankan untuk tahun mendatang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		118.632		79.483		67,00%				
				<i>Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi</i>	<i>persen</i>		74		74		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar</i>	<i>persen</i>		92		92,31		100,34%	penyusunan data kurang cepat sehingga untuk pembuatan buku profil tidak dapat terealisasi untuk kegiatan seksi Kesra.		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		29.425		28.688		97,50%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		29.425		28.688		97,50%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		89.207		50.795		56,94%				
				Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		89.207		50.795		56,94%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		111.655		90.348		80,92%				
				<i>Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa</i>	<i>persen</i>		92		92		100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		111.655		90.348		80,92%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	kegiatan		5		5		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		24.712		17.317		70,08%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		86.943		73.031		84,00%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		99.685		90.594		90,88%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		99.685		90.594		90,88%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		62		62		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		99.685		90.594		90,88%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		70.200		66.492		94,72%				
				<i>Persentase Konflik yang tertangani</i>	<i>persen</i>		87		87		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		70.200		66.492		94,72%				
				Presentase tindakanlanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		70.200		66.492		94,72%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		64.099		61.376		95,75%				
				<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Peldes</i>	<i>persen</i>		95		95		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		64.099		61.376		95,75%				
				Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		4.520		4.145		91,70%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		4		4		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2.800		2.800		100,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		99		99		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		45.528		43.190		94,86%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		11		11		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7.871		7.861		99,87%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		3.380		3.380		100,00%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN JEKULO					335.218		300.926	335.218	89,77%		Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	Capaian sudah tergolong tinggi,pertahankan dan tingkatkan pada periode tahun berikutnya	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		58.517		51.102		87,33%				
				Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	Persen		90,5		91,18		100,75%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		48.517		42.374		87,34%				
				Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	nilai		74		74		100,00%			
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	nilai		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		35.000		31.368		89,62%				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13.517		11.006		81,43%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		10.000		8.728		87,28%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	Persen		80		80		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		10.000		8.728		87,28%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		54.499		43.208		79,28%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	persen		91		80		87,91%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		54.499		43.208		79,28%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		3		60,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		3.100		1.396		45,02%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		51.400		41.813		81,35%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		109.421		102.528		93,70%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		85		85,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		109.421		102.528		93,70%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		109.421		102.528		93,70%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		85.000		80.022		94,14%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		77		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		85.000		80.022		94,14%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		85.000		80.022		94,14%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		27.782		24.066		86,63%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Persentase Desa Tertib Administrasi</i>	<i>persen</i>		95		95		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		27.782		24.066		86,63%				
				Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		90		90		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		8.990		7.411		82,43%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		7.136		5.503		77,12%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan Desa		9.801		9.401		95,92%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.855		1.752		94,43%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN BAE					409.382		344.691	409.382	84,20%		Pelaksanaan kegiatan kadang tidak sesuai dengan rencana anggaran kas sehingga memperlambat realisasi anggaran.	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan untuk tahun mendatang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		58.603		50.298		85,83%				
				<i>Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
				<i>Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali bidang Trantibum</i>	<i>Persen</i>		100		100		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		14.896		13.771		92,45%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		87		87		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		14.896		13.771		92,45%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0		0		0%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		43.707		36.527		83,57%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di	persen		85		85		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				koordinasikan dengan perangkat daerah terkait										
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		43.707		36.527		83,57%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		115.678		93.828		81,11%				
				Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	desa		10		10		100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		115.678		93.828		81,11%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	persen		90		100		111,11%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		14.976		11.200		74,79%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100.702		82.628		82,05%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		115.078		90.945		79,03%				
				Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	desa		10		10		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		115.078		90.945		79,03%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		115.078		90.945		79,03%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		67.044		64.404		96,06%				
				Persentase Konflik yang tertangani	desa		10		10		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		67.044		64.404		96,06%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		67.044		64.404		96,06%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		52.979		45.215		85,35%				
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pempdes	Desa		10		10		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		52.979		45.215		85,35%				
				Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		4.600		4.600		100,00%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		99		99		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		35.625		29.715		83,41%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		10		10		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9.904		8.850		89,36%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		2.850		2.050		71,93%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN GEBOG					357.097		318.189	357.097	89,10%		Dukungan dan komitmen pejabat struktural dalam melaksanakan perjanjian kinerja	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		85.024		79.809		93,87%				
				Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali bidang Trantib	Nilai		85		90		105,88%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<i>Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan</i>	<i>Nilai</i>		80		87,5		109,38%		mendatang	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		73.644		69.386		94,22%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		60		60		100,00%			
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		49.528		47.639		96,19%				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		24.116		21.747		90,17%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		11.380		10.423		91,59%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	persen		55		55		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		11.380		10.423		91,59%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>		114.401		106.000		92,66%				
				<i>Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa</i>	<i>persen</i>		75		94,55		126,07%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		114.401		106.000		92,66%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	kegiatan		5		5		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		10.000		10.000		100,00%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		104.401		96.001		91,95%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		51.375		39.481		76,85%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		51.375		39.481		76,85%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		60		100		166,67%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		51.375		39.481		76,85%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		71.847		60.473		84,17%				
				Persentase Konflik yang tertangani	persen		77		100		129,87%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		71.847		60.473		84,17%				
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		55		100		181,82%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		71.847		60.473		84,17%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		34.449		32.425		94,13%				
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pempdes	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		34.449		32.425		94,13%				
				Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12.000		11.181		93,18%				
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		48		48		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		6.500		5.971		91,86%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		7.000		6.791		97,01%				
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7.000		6.905		98,64%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dg Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.950		1.579		80,96%				
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN DAWE					784.790		694.113	784.790	88,45%		1. ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan 2. ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terkait dengan OPD lain	Capaian triwulan IV 2024 sudah menunjukkan kinerja yang tinggi, diatas 90%, pertahankan dan tingkatkan utuk tahun mendatang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		102.771		93.222		90,71%				
				Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan (melalui survey pelayanan di kecamatan)	persen		100		97,51		97,51%			
				Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecamatan Kecuali bidang Tramtibbum	Persen		100		100		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		11.079		10.902		98,40%				
				Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		11.079		10.902		98,40%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		91.692		82.320		89,78%				
				Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dgn perangkat daerah terkait	persen		55		55		100,00%			
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		91.692		82.320		89,78%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		223.094		196.939		88,28%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terealisasi	kegiatan		5		5		100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		223.094		196.939		88,28%				
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	kegiatan		5		5		100,00%			
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec		47.299		33.755		71,37%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen		1		1		100,00%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		175.795		163.183		92,83%				
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		182.869		168.323		92,05%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		182.869		168.323		92,05%				
				Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		60		60		100,00%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		182.869		168.323		92,05%				
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		74.035		60.034		81,09%				
				Persentase Konflik yang Tertangani	persen		92		92		100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		74.035		60.034		81,09%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGETKINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOM DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		55		55		100,00%			
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		56.160		50.374		89,70%				
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan		12		12		100,00%			
				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		17.875		9.660		54,04%				
				jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instalasi vertikal	laporan		2		2		100,00%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		202.021		175.596		86,92%				
				Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	persen		95		95		100,00%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		202.021		175.596		86,92%				
				Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10.200		7.294		71,51%				
				Memfasilitasi penyiapan dokumen dalam rangka penyusunan Perdes perkades	dokumen		4		4		100,00%			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4.770		3.600		75,47%				
				Menyiapkan dokumen dalam rangka fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	dokumen		18		18		100,00%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		177.226		155.552		87,77%				
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen		18		18		100,00%			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		8.325		8.250		99,10%				
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen		1		1		100,00%			
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.500		900		60,00%				
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	dokumen		1		1		100,00%			

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang diambil meliputi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yang dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun tindakan yang diambil oleh Bupati Kudus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 5. PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 6. PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Perda Kab. Kudus No.2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Perda Kab. Kudus No.3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	- Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Dasar dan PAUD - Peningkatan Prestasi Olahraga - Peningkatan Kegiatan Kepramukaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		10. Perbup Kudus No.14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos; 11. Perbup Kudus No.71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
2.	Penetapan Daftar Nama Guru Swasta Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.	1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. PP No.74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Permendikbud No.5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 9. Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Perda Kab.Kudus No.2 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Meningkatkan Honorarium untuk Kesejahteraan Guru Swasta pada di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		11. Perda Kab.Kudus No.10 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024; 12. Perbup Kudus No.55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kab. Kudus; 13. Perbup Kudus No.18 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024	
3.	Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan : 1. Jati 2. Kota 3. Gebog 4. Jekulo	1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Perbup Kudus No.38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus; 4. Perbup Kudus No.53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi layanan Administrasi pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan : 1. Jati; 2. Kota; 3. Gebog; 4. Jekulo.
4.	Pengajuan Usulan Penambahan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Sekolah	1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Penyediaan data kondisi kerusakan bangunan sekolah yang uptodate

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Peneratandar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	
5.	Kajian Strategis Penguatan Kepemudaan Kabupaten Kudus	1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kab/Kota Layak Pemuda 5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan	Tujuan dari penyusunan Kajian Strategis Pembangunan Pemuda Kabupaten Kudus ini adalah tersusunnya satu dokumen komprehensif terkait dengan strategi – strategi kebijakan penguatan kepemudaan di Kabupaten Kudus yang dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan daerah Kabupaten Kudus.
6.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan	1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa	1. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui sebuah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 disebutkan bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan, dalam hal ini terdapat Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, dimana salah satu urusan tersebut adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dimana Pemerintah Daerah Kota	2. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang Tangguh dan berdaya saing 3. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di daerah 4. Memahami dinamika perkembangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Kudus 5. Memahami rencana program pengembangan kepemudaan di Kabupaten Kudus

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		memiliki rincian kewenangan kepemudaan yaitu: a) penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.	
7.	Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.7.1/140/2024 Tentang Penetapan Upaya Percepatan Penurunan Stunting Melalui SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) di Kabupaten Kudus	Tujuan: Percepatan Penurunan stunting secara holistik, Integratif, dan berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat secara kolaboratif/ Masalah yang diselesaikan: penguatan rujukan dan pedampingan tingkat posyandu, puskesmas dan rumah sakit serta melibatkan unsur terkait lainnya. Dengan mengawal balita bermasalah gizi untuk mendapat intervensi dan monitoring yang maksimal
8.	Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.7 .1 / 141 /2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus	Tujuan : Optimalisasi Pelaksanaan SI CANTIK (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) Kabupaten Kudus Masalah yang diselesaikan: penguatan pada pelaksanaan penapisan maupun tatalaksana balita bennasalah gizi sesuai dengan algoritma gizi sehingga semua

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			balita bermasalah gizi mendapat intervensi sesuai dengan permasalahannya
9.	- Penegakan Perda Dan Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. - Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.	- Undang-Undang 23 Tahun 2014 - Permendagri 90 Tahun 2019 - Permendagri 26 Tahun 2020	Mengurangi Gangguan Tibum Tranmas di Kabupaten/Kota
10.	- Pelaksanaan Penanganan Dan Penyelamatan Kebakaran - Standarisasi Penanganan Dan Penyelamatan Kebakaran Di Kabupaten / Kota.	- Permendagri 16 Tahun 2020 - Permendagri 114 Tahun 2018	Mencegah dan Menangani Kebakaran
11.	Meningkatnya PPKS yang berdaya	1. Peraturan Bupati Kudus No 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Tahun 2024. 2. Perbup Kudus Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan melalui Sadan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 3. Perda Kab. Kudus no. 10 tahun 2021 tentang Pertindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang	Peningkatan Penanganan PPKS

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
12.	Keputusan Bupati Kudus Nomor : 800.1.4/322/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian dan pemetaan dalam manajemen talenta Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Optimalisasi pengembangan kompetensi dan karir pegawai aparatur sipil negara
13.	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kudus tahun 2022 - 2025	Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2022	Tujuan: Untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas bagi pengembangan Penanaman Modal di Daerah.
14.	Standar operasional prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor 067.1/385/2021 tanggal 1 September 2021	Tujuan: Sebagai pedoman pelaksanaan tugas berupa petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
15.	Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomor: 067/384/2021 tanggal 15 September 2021	Tujuan: Sebagai pedoman dan acuan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan.
16.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPO)	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPO)	Tujuan : Untuk mendorong terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja Aparat Pemerintahan Desa (APD) serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan demokratis Masalah yang diselesaikan :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Menjadi pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa (APD) dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
17.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas perubahan daerah Kabupaten kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	1. Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup; 2. Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).
18.	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus	1. Peningkatan data kependudukan secara cepat, mudah, gratis, dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Kudus.
19.	Perusahaan wajib untuk menyampaikan: a. Informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus secara online melalui "SI_CAKEP_KU" (Sistem Informasi Pencari Kerja dan Pelatihan Kerja di Kabupaten Kudus) atau tertulis, b. Informasi lowongan pekerjaan yang disampaikan bersifat terbuka, bebas, obyektif, adil dan setara	Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 500.15.1/1408.2/2024 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	tanpa diskriminasi. c. Melaporkan data tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan yang telah dilaporkan d. Dalam melaksanakan pengisian lowongan pekerjaan, agar perusahaan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dengan cara mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Menengah/SMK di Kabupaten Kudus.		
20.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/385/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, penetapan penerima dan besaran hibah uang merupakan kewenangan Bupati.	Untuk meningkatkan sarana dan prasarana organisasi kesenian di Kabupaten Kudus.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
21.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.6/316/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Jadi Kota Kudus ke-475 Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.	Untuk kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Kudus ke-475 Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan sadar budaya.
22.	Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung	Undang-undang (UU) tentang bangunan gedung terbaru adalah UU Nomor 28 Tahun 2002. Peraturan pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021	1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 4. Memastikan bahwa bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik, aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23.	- Peningkatan jumlah koleksi - Peningkatan sarana prasarana perpustakaan	1. Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	- Penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten / Kota	3. Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun 4. Meningkatnya koleksi bahan pustaka 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan
24.	Mengoptimalkan pengelolaan arsip secara baku	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2022 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	1. Sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, serta alih media Arsip. 2. Memberikan petunjuk /pedoman bagi Perangkat Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 3. Sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip 4. Sebagai pedoman penyusutan arsip (meliputi pemindahan arsip dinamis in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah ke Dinas Kearsipan selaku LKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
25.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Perbup Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. 2. Perbup Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tentang Pajak Restoran. 3. Perbup Nomor 61 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 5. Perbup Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 40 Tahun 2017 tentang harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah. 6. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Restoran 7. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) 8. Perbup Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025. 9. Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
26.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah	1. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023. 3. Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		APBD Tahun Anggaran 2024 4. Perda Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan APBD TA. 2024 5. Perbup Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 6. Perbup Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024 yang mengatur Penambahan Anggaran DAK Non Fisik BOS Reguler, DAK Non Fisik BOKB, DAK Non Fisik Ketahanan Pangan/Pertanian, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pergeseran antar obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek antar belanja. 7. Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024 yang mengatur Penambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA.2023 yang telah dsalurkan seluruhnya secara tunai ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2024 dan pergeseran antar obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek antar belanja. 8. Perbup Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Perbup Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus.	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		10. Perbup Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 11. Perbup Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 21. Perbup Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 18 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja . 22. Perbup Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	
27.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya; 2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2025; 3. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Anggaran 2025
28.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabupaten Kudus Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah; 2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024; 3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah
29.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan	1. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Tengah dan Pemerintah Pusat; 2. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan 3. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
30.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 000.7.2.4/305/2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program kegiatan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024; 2. mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sedangkan pelaksanaan dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 100.1.7/05/2024 Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 April 2024, adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Pendidikan		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar mengoptimalkan -SPJ-an tepat waktu sesuai juknis tahun 2023.	Sudah dilaksanakan, SPJ dibuat per-sub kegiatan dan terverifikasi	SPJ sesuai realisasi penggunaan anggaran
2	Sehubungan kondisi fisik/kerusakan sekolah maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan.	Telah dilaksanakan, Koordinasi dengan Korwil, Pengawas dan Kepala Sekolah untuk selalu melakukan pengecekan kondisi bangunan	Diperolehnya data Update tentang kerusakan bangunan sekolah
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama agar lebih ditingkatkan.	Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi untuk Guru SD dan SMP	Guru SD dan SMP yang Kompeten sesuai bidangnya
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan, agar lebih ditingkatkan.	Sudah dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan inovasi pembelajaran paradigma baru	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga tutor 18 PKBM se Kabupaten Kudus
	Bidang Kesehatan		
	Dinas Kesehatan		
1	Pengadaan barang agar disesuaikan dengan standar/spesifikasi dari Kementerian Kesehatan	Semua bidang dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa memastikan kesesuaian dengan regulasi/ kebijakan yang berlaku	Memastikan bahwa barang-barang yang akan diadakan memenuhi standar kualitas, keamanan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			oleh Kementerian Kesehatan
2	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	Menyusun timeline atau schedule dalam pelaksanaan kegiatan dan target penyelesaian	Memastikan kegiatan OPD dapat terlaksana dengan lebih baik , terstruktur, terorganisir dan pelaksanaan dapat lebih fokus pada masing-masing kegiatan
3	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan agar ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dan SDM sesuai dengan mutu hasil dan analisis kebutuhan yang mengacu pada regulasi dan kebijakan pemerintah	Meningkatkan kompetensi yang relevan dan bermanfaat bagi OPD serta meningkatkan kinerja SDM agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
RSUD dr. Loekmonohadi			
1	Capaian kinerja tahun 2023 sudah bagus, Untuk kinerja ditahun 2024 pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal	- Melaksanakan pelatihan dengan pengembangan pegawai RSUD dr.Loekmono Hadi secara berkelanjutan - Melakukan evaluasi kinerja secara berkala - Melakukan strategi/ terobosan inovasi pelayanan kesehatan di RSUD dr.Loekmono Hadi guna peningkatan kinerja	Kinerja RSUD dr.Loekmono Hadi tahun 2024 lebih optimal
2	Dengan adanya poliklinik yang selalu antri karena banyaknya pasien diharapkan ada alternatif membuka poliklinik di sore hari	- Rencana rekrutment SDM guna melaksanakan poliklinik sore hari - Rencana penambahan sarana dan prasarana untuk poliklinik sore hari	Terlaksananya Poliklinik sore hari

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3	Pembangunan ICU dan IBS beserta kelengkapannya sudah dilaksanakan dengan baik sehingga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Loekmono Hadi	- Peresmian layanan ICU baru dengan jumlah tempat tidur 22 tempat tidur - Gedung ICU dan IBS sudah digunakan untuk layanan unggulan RSUD dr.Loekmono Hadi - Melakukan promosi melalui sosial media terkait alat kesehatan dan layanan yang ada di gedung IBS dan ICU yang baru	Memanfaatkan gedung IBS dan ICU secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr.Loekmono Hadi
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Perencanaan pembangunan harus direncanakan secara matang, termasuk aspek estetika dan keselamatan agar tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai batas waktu yang direncanakan sehingga kualitas pekerjaan menjadi lebih baik	- Akan ditindaklanjuti - Perencanaan kegiatan di DPUPR Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dengan matang, tepat waktu dan memprioritaskan ruas-ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan.	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi
2	Kegiatan fisik banyak yang tertunda, dan masyarakat banyak yang mengeluhkan program-program Dinas PUPR yang kurang cepat/kurang responsif pelaksanaannya	- Perencanaan kegiatan berada di tahun yang sama dengan kegiatan fisik, akan ditindak lanjuti dengan perencanaan di tahun sebelumnya. - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di DPUPR harus melalui beberapa tahapan yaitu : melalui tahap perencanaan persiapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan dan serah terima jabatan	Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3	Konstruksi tanggul untuk aliran sungai agar lebih diperhatikan, termasuk ukuran konstruksi tanggul tidak perlu terlalu lebar, tetapi fokus pada ketepatan ukuran kedalaman sungai	Akan kami pertimbangkan dalam perencanaan bangunan tanggul sungai kedepannya	Desain tanggul sungai yang lebih ramping
4	Perpecahan aliran sungai dari Desa Ngemplak ke timur menuju arah Mejobo, agar dibuat 3 (tiga) titik pintu bendungan aliran sungai sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir	Akan kami kaji dan kami koordinasikan dengan BBWS Pemali Juana	Mengurangi dampak banjir
5	Kawasan Poroliman Tanjung adalah kawasan padat lalu lintas dan daerah langganan banjir, juga sepanjang jalan Mejobo – Jepang merupakan kawasan padat lalu lintas yang sering terjadi kecelakaan sehingga membutuhkan solusi tepat dan perencanaan yang matang DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR agar selalu berkoordinasi untuk membuat perencanaan flyover yang merupakan bagian Jalan Nasional di Kabupaten Kudus dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat	Untuk melaksanakan pembangunan Flyover harus dilakukan perencanaan secara matang dan berkoordinasi dengan para stakeholder	Mengurangi kemacetan dan kecelakaan Jalan Mejobo Jepang
6	Pada saat musim hujan, Kudus menjadi langganan banjir, air melimpah tetapi pada saat musim kemarau, Kudus kesulitan air terutama untuk pertanian dan kebutuhan air bersih. Sehubungan hal tersebut perlu direncanakan dan direalisasikan pembuatan embung sebagai penampung air hujan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan air bersih	Akan kami usulkan di Musrenbang selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang ada	Mengurangi bencana banjir dan kekeringan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7	Terkait usulan-usulan dari masyarakat, responsibilitas PUPR perlu ditingkatkan lagi, seperti contoh usulan masyarakat tentang pemasangan tutup saluran drainase di depan makam cungkup Desa Bulungcangkring dll	Akan dikaji ulang berdasarkan skala prioritas	Prioritas yang paling penting untuk penanganan aduan masyarakat
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Pengecekan usia dan kondisi pohon agar dilaksanakan secara berkala untuk mengantisipasi pohon tumbang dan bertambahnya korban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar melalui CSR dalam hal perimbasan pohon yang telah menjulang tinggi dan telah melakukan peremajaan beberapa pohon di beberapa titik wilayah	Sampai saat ini kami sudah melakukan pendataan terkait kondisi pohon penghijauan di 9 ruas jalan di Kabupaten Kudus terdapat 22 pohon dalam kondisi mati dan bagian bawah pohon kropos yang akan kami tindaklanjuti penebangan pohon tersebut. Kami sudah melakukan kegiatan perimbasan pohon penghijauan yang melibatkan perusahaan(CSR) yaitu 2 ruas jalan yaitu jln. Lingkar Panjang – Pegunungan dan Jln. Pemuda, kedepan kami akan melibatkan Perusahaan dalam perimbasan pohon penghijauan.	- Mengantisipasi pohon tumbang dan jatunya korban - Menciptakan keindahan dan kerapian poho peghijauan
2	Terkait reboisasi, permasalahan banjir dan sedimentasi (pendangkalan sungai) yang terjadi di Kudus yang disebabkan karena penghijauan di daerah atas sudah banyak berkurang. Untuk itu, perlu adanya program reboisasi di daerah atas dengan pengawasan yang ketat	Daerah atas merupakan lahan kehutanan dan hutan rakyat milik masyarakat. Lahan kehutanan kewenangan dari LHK. penanganan reboisasi pada daerah tersebut sudah dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Pati, BPDASHI Kementerian LHK, Perhutani, didukung oleh semua stakeholder terkait (antara lain Dinas PLPLH, Dinas Pertanian	Mengatasi permasalahan banjir

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dan Pangan, BPBD, kelompok masyarakat, swasta (perusahaan an. Djarum). Namun memang perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan aserta edukasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan daerah konservasi	
3	Perencanaan program penanganan sampah untuk diproduksi agar tidak menjadi Gunung Sampah	Program penanganan sampah ke depan akan melibatkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya, selain itu juga penambahan TPS 3R di desa-desa sehingga sampah yang dibawa ke TPA berkurang	- Mengurangi sampah masuk TPA - Memaksimalkan pengurangan sampah dari sumbernya
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1	BPBD agar meningkatkan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD telah membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 360/282/2022 Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus yang setiap tahun diadakan pelatihan Tim Reaksi Cepat, Selain itu BPBD Bersama 9 Kecamatan telah membentuk Kencana serta Desata pada masing-masing desa untuk respon cepat penanggulangan bencana	BPBD telah meningkatkan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota melalui 1. Pembentukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/282/2022 2. Pembentukan Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana) pada 9 Kecamatan di Kabupaten Kudus 3. Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana) pada 70 Desa/ kelurahan di Kabupaten Kudus

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	BPBD agar lebih meningkatkan fungsi koordinasi dengan OPD terkait dalam hal pencairan dana tak terduga	BPBD Kabupaten Kudus bersama BPPKAD telah menginisiasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pencairan Dana Tidak Terduga agar proses pencairan Dana Tidak Terduga dapat segera di proses saat terjadi darurat bencana	Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan BPPKAD dan Inspektorat guna percepatan pencairan Dana Tidak Terduga
3	Satpol PP berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya bisa menjadi panutan dan bisa menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar Perda, dan dalam Penegakan Perda di masyarakat agar dilakukan dengan pendekatan yang humanis	- Satpol PP Dalam Melaksanakan Penindakan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. - Melaksanakan Koordinasi Komunikasi Dan Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait Agar Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Lebih Maksimal.	Dalam Upaya Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati, Satpol PP Kabupaten Kudus Akan Melaksanakan Koordinasi Komunikasi Dan Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait Agar Lebih Maksimal Dalam Melaksanankan Penindakan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah
	Bidang Sosial		
1	Dinas Sosial agar menyediakan data base yang valid untuk mengatasi kebutuhan tidak terduga dan memfasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada perator SIK-Ng se Kab.Kudus dalam rangka Updating data 2. Fasilitasi bantuan kesejahteraan keluarga dg pemberian BLT kepada Buruh Rokok	Pemberian bantuan sosial tepat sasaran

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		3. Pemberian pertindungan jaminan sosial ketenagkerjaan kepda pekerja rentan 4. Meningkatkan layanan verifikasi pengajuan PBI APBD 5. Meningkatkan layanan pengajuan dan penyaluran bantuan pemakaman	
2	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan	Peningkatan koordinasi intern dan monev dilaksanakan secara berkala, adapun pelaksanaan kegiatan bantuan iuran JKK dan JKM kepada pekerja rentan, terkendala regulasi sehingga pelaksanaan di akhir tahun	Target Kinerja Fisik dan Keuangan tercapai
3	Tingkatkan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan sosial temu penguatan anak dan keluarga, untuk bimbingan fisik pembuatan batik ecoprint sebanyak 15 orang	Peningkatan keterampilan kepada penyandang disabilitas intelektual maupun keluarganya
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Adanya kegiatan mal administrasi dan mal policy dalam pembangunan kios melanggar sempadan jalan di kawasan KIHT Terban adalah suatu preseden buruk yang dilakukan dinas dan bisa dijadikan yurisprudensi bagi masyarakat untuk melanggar hukum, DPRD telah beberapa kali memperingatkan hal ini namun tidak ada respon yang baik	Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi sebagai berikut : Undangan Nomor : 005 / 1387 / 16.04 / 2023 Tanggal 17 Mei 2023. Pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilaksanakan	Persiapan pelaksanaan pembangunan SIHT dilaksanakan pengukuran tanah di lokasi SIHT berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pengukuran Tanah terkait Rencana Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Balai Desa Klaling Kecamatan Jekulo	
		• Surat Pemberitahuan Nomor : 530 / 1632 / 16.04 / 2023 Tanggal Juni 2023 Perihal Rencana Sosialisasi kepada masyarakat Desa Klaling Terkait rencana pembangunan SIHT Kepada Kepala Desa Klaling Kecamatan Jekulo.	Persiapan rencana pembangunan SIHT akan dilaksanakan sosialisasi kepada warga desa klaling
		• Undangan Nomor : 005/1670/16.04/ 2023 Tanggal 20 Juni 2023. Pada tanggal 22 Juni 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Rencana Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Balai Desa Klaling Kecamatan Jekulo. Kepada BPPKAD Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kudus, Kantor Pertanahan Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling, Perangkat Desa Pengelola Aset Tanah Desa, Warga Penyewa Aset.	Persiapan rencana pembangunan SIHT maka dilaksanakan sosialisasi kepada warga Desa Klaling Kecamatan Jekulo agar warga desa klaling sekitar lokasi SIHT mengetahui adanya rencana pembangunan SIHT
		• Undangan Nomor : 005 / 1700 / 16.04 / 2023 Tanggal 22 Juni 2023. Pada	Bertujuan untuk memastikan Batas Tanah Hak Pakai No. 11 milik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tanggal 23 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penentuan Batas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Hak Pakai No. 11 Desa Klaling unuk Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada BPPKAD Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Kantor Pertanahan Kab. Kudus, Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kab. Kudus.	pemerintah Kabupaten Kudus
		Undangan Nomor : 005/1727/16.04/2023 Tanggal 26 Juni 2023. Pada tanggal 27 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengosongan/Pembongkaran Warung/Kios yang masih menempati Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hak Pakai Nomor 11/Desa Klaling untuk Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada BPPKAD Kab. Kudus, DPMPSTSP Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan	Bertujuan untuk mengantisipasi warung atau kios yang masih menempati Tanah Hak Pakai No. 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang rencana akan dibangun SIHT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kab. Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus.	
		Undangan Nomor : 005 / 1571 / 16.00 / 2023 Tanggal 06 Juli 2023. Pada tanggal 07 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Paparan Awal Master Plan Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus. Kepada Sekretaris Daerah Kab. Kudus, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pertanian Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kudus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kudus, Konsultan Perencana.	Bertujuan untuk memaparkan laporan awal master plane pembangunan SIHT
		Surat Pemberitahuan Nomor : 530 / 1845 / 16.04 / 2023 Tanggal 10 Juli 2023. (Pemberitahuan Kepada Pedagang Mariyam/Sri Mulyani, Wakimin, Sholeh, Teguh, Fafa Kurniawan, Hartono, Wisni, H. Sulkan Zaini, Nur Hadi, Sauji, Wage, Kelompok Tani Untuk mengosongkan lahan/bangunan secara mandiri yang saat ini masih menempati lahan milik	Bertujuan agar pada pedagang yang masih menempati lahan SIHT dihimbau untuk segera mengosongkan karena akan segera dimulai pekerjaan pembangunan SIHT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pemerintah Kabupaten Hak Pakai No. 11/Desa Klaling. Kami berikan batas waktu pengosongan lahan sampai dengan tanggal 17 Juli 2023)	
		Undangan Nomor : 005 / 1917 / 16.04 / 2023 Tanggal 17 Juli 2023. Pada tanggal 18 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Relokasi bagi Warga yang Masih Menempati Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hak Pakai No. 11/Desa Klaling bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada Polres Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Hukum Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling.	Bertujuan agar pada pedagang yang masih menempati lahan SIHT dihimbau untuk segera mengosongkan karena akan segera dimulai pekerjaan pembangunan SIHT
		Undangan Nomor : 005 / 1931 / 16.04 / 2023 Tanggal 18 Juli 2023. Pada tanggal 20 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Relokasi bagi Warga yang masih menempati Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hak Pakai No. 11 / Desa Klaling bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada Polres Kudus, BPPKAD Kab.	Bertujuan agar pada pedagang yang masih menempati lahan SIHT dihimbau untuk segera mengosongkan karena akan segera dimulai pekerjaan pembangunan SIHT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Hukum Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling, Warga Desa Klaling yang menempati Tanah Milik Pemerinah Kabupaten.	
		Pada tanggal 25 Juli 2023 telah disepakati yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pihak Kedua Para PKL yang menyetujui relokasi.	Telah disepakati Berita Acara kesepakatan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dengan para PKL yang menyetujui relokasi
		Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 530 / 2008 / 16.04 / 2023 Tanggal 26 Juli 2023. (Surat Peringatan ke – 1 Kepada PKL Sdr/Sdri Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang saudari tempati dari kegiatan apapun, karena akan segera diadakan Pembangunan yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 3 Agustus 2023)	Memberikan surat peringatan Ke-1 kepada PKL Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang ditempati (Hak Pakai No. 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus)
		Undangan Nomor : 005 / 2066 / 16.04 / 2023 Tanggal 02 Agustus 2023. Pada tanggal 03 Agustus 2023 telah dilaksanakan Paparan Laporan Akhir	Bertujuan untuk memaparkan laporan akhir master plane pembangunan SIHT

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Masterplan Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada Inspektur Kab. Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, BAPPEDA Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kudus, Bagian Hukum Setda Kab. Kudus, Pendamping LKPP Kab. Kudus (Bapak Anwar), CV. Rekayasa Jati Mandiri (Konsultan Perencana)	
		Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 530 / 3000 / 16.04 / 2023 Tanggal 07 Agustus 2023. (Surat Peringatan ke - 2 Kepada PKL Sdr/Sdri Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang saudara tempati dari kegiatan apapun, karena akan segera diadakan Pembangunan yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari yaitu tanggal 10 Agustus 2023)	Memberikan surat peringatan Ke-2 kepada PKL Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang ditempati (Hak Pakai No. 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 530/3074/16.04/2023 Tanggal 15 Agustus 2023. (Surat Peringatan ke – 3 Kepada PKL Sdr/Sdri Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang saudari tempati dari kegiatan apapun, karena akan segera diadakan Pembangunan yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari yaitu tanggal 18 Agustus 2023)	Memberikan surat peringatan Ke-3 kepada PKL Ibu Mariyam agar segera mengosongkan tanah yang ditempati (Hak Pakai No. 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus)
		Undangan Nomor : 005 /4406/16.04/2023 Tanggal 09 Oktober 2023. Pada tanggal 11 Oktober 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengosongan/Eksekusi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hak Pakai Nomor 11 Desa Klaling untuk Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada Polres Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Hukum Setda Kab. Kudus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling.	Rencana eksekusi para PKL yang menempati lahan SIHT tanah Hak Pakai Nomor 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus sampai batas waktu yang ditentukan belum dibongkar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Surat Pemberitahuan Nomor : 530/4445/16.04/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 (Surat Pemberitahuan Kepada Wisni, Sriyati Suyono, Teguh Prasetyo, Mariyam, Siti Holifah, Wakimin agar segera mengosongkan/membongkar bangunan kios/toko/warung secara mandiri paling lambat tanggal 17 Oktober 2023 dari kegiatan apapun karena akan segera diadakan pekerjaan Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)	Pemberitahuan kepada para PKL yang masih menempati lahan SIHT agar segera membongkar dan mengosongkan secara mandiri
		Surat Permohonan Bantuan Personel Pengamanan Nomor : 530/4446/16.04/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 (Surat Pemberitahuan Kepada Polres Kudus, Polsek Jekulo, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Hukum Setda Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling	Persiapan rencana pembogkaran warung atau kios di lingkungan SIHT
		Undangan Nomor : 005 /4462/16.04/2023 Tanggal 16 Oktober 2023. Pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilaksanakan Penerimaan Audiensi dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kudus terkait Rencana Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) bertempat di Aula BLK	Bertujuan untuk memberikan informasi yang benar terkait keberadaan warung atau kios yang menyalahi aturan karena menempati lahan SIHT Tanah Hak Pakai Nomor 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Lantai II Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada Polres Kudus, Polsek Jekulo, Danramil 04/Jekulo, Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kab. Kudus, BPPKAD Kab. Kudus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus, Dinas PKPLH Kab. Kudus, Dinas Perhubungan Kab. Kudus, Satpol PP Kab. Kudus, Bagian Hukum Setda Kab. Kudus, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kudus, Camat Jekulo, Kepala Desa Klaling.	
		Surat Permohonan Pengamanan Jaringan Listrik di Area Lokasi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Nomor: 500.9.1/4628/2023 Tanggal 02 November 2023 (Diberitahukan bahwa tanggal 03 November 2023 akan dilaksanakan penertiban/pembersihan terhadap warung/kios/toko yang berada di area Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) untuk pengamanan jaringan listrik yang berada di lokasi dimaksud)	Mengantisipasi kerusakan jaringan listrik di area lokasi SIHT karena akan dilaksanakan penertiban/pembersihan warung atau kios yang masih menempati Tanah Hak Pakai Nomor 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus
		Pada tanggal 01 Desember 2023 dilaksanakan Pengukuran ulang pembagian relokasi bersama Dinas PUPR Kab. Kudus disaksikan oleh Para	Pengukuran ulang dilanjutkan Pembagian relokasi dihadiri oleh para PKL, Kepala Desa Klaling Kecamatan Jekulo dan Pihak Dinas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		PKL dilanjutkan pembagian Nomor Kios relokasi Bagi Para PKL.	
		Undangan Nomor : 500.9 / 0139 / 2024 Tanggal 18 Januari 2024. Pada tanggal 19 Januari 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Membahas Kesepakatan Perjanjian Sewa Tanah bagi PKL yang menempati Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hak Pakai Nomor 11 Desa Klaling bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Selatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepada BPPKAD Kab. Kudus, Dinas PUPR Kab. Kudus, DPMPTSP Kab. Kudus, Bagian Hukum Setda Kab. Kudus, Sri Mulyani “Bu Mariyam”, Akhmad Shobirin, Wakimin, Ngadi, Agus Lahir Tulas, Ema Windiasuti “Bumdes Klaling”, Heru Nugroho, Sriyati, Wesni Rahayu, Suyono, Teguh Prasetyo.	Setelah pengukuran ulang dan pembagian nomor kios dilanjutkan membahas kesepakatan perjanjian sewa tanah Hak Pakai Nomor 11 milik Pemerintah Kabupaten Kudus
2	Lalainya dinas atas pengawasan Hubungan Industrial terhadap sebagian besar perusahaan yang menerapkan jam kerja diatas batas kewajaran, sehingga menimbulkan efek peningkatan stunting, gangguan psikologi keluarga yang menimbulkan perpecahan keluarga	Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, telah kami laksanakan pembinaan hubungan industrial di perusahaan rokok bersama Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM SPSI) Kudus dan Asosiasi Pengusaha (APINDO) untuk pembinaan	Pada awal Januari 2024, menjelang Idul Fitri 2024 permintaan rokok kretek meningkat, banyak perusahaan rokok kekurangan tenaga kerja, sehingga jam kerja di sektor industri rokok bertambah, yang diimbangi dengan produksi dari karyawan sesuai satuan hasil dan apabila hasilnya melebihi target

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pelaksanaan waktu kerja dan pengupahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.	4.000 batang per hari kelebihanannya dibayar 1,5 kali upah per seribunya sehingga pada saat itu jam kerja sampai dengan pukul 16.30 WIB dan hari Minggu masuk kerja dan upahnya 2(dua) kali dari hari biasa.Tujuan Masalah yang diselesaikan :1. Saat ini kondisi jam kerja di sektor padat karya insdustri rokok sudah baik, tidak ada lembur sehingga jam pulang karyawan pukul 13.00 dan hari Minggu dan hari libur nasional tidak masuk kerja (libur)2. Kondisi tersebut didukung adanya pembukaan cabang beberapa perusahaan rokok di Kabupaten di Jawa Tengah di Luar Kabupaten Kudus yang sudah beroperasi.
3	Adanya beberapa koperasi hanya tinggal nama yang merugikan anggota dan tidak sesuai dengan semangat koperasi, mengabaikan hak-hak anggota menunjukkan pembinaan kepada koperasi kurang efektif	- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pergerakan Koperasi agar dijalankan sesuai regulasi yang berlaku - Monitoring kepada pergerakan koperasi serta pendampingan kepada Koperasi binaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Agar pergerakan koperasi dalam menjalankan usahanya sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pergerakan koperasi dapat maksimal, memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada anggotanya. Dan utk koperasi yang tidak aktif dan sepanjang tidak mempunyai permasalahan keuangan maka koperasi tersebut akan ditindak lanjut dg proses pembubaran koperasi

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih proaktif berkonsultasi dalam rangka pembuatan KIA terhadap kendala pemesanan blanko dari pemerintah pusat sehingga pelayanan tidak terhambat	1. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait dengan peningkatan capaian rekam KTP dan KIA; 2. Membuka pelayanan pembuatan KIA selain di Dinas, yaitu di 9 Kecamatan dan MPP (Mall Pelayanan Publik) serta cetak mandiri dengan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri); 3. Melakukan pelayanan kolektif jemput bola dan delivery order pembuatan KIA untuk anak usia sekolah (TK/PAUD, SD, SMP); 4. Menambah jam layanan administrasi kependudukan pada hari kerja : Senin s.d Kamis semula pukul 08.00 s.d 14.00 WIB menjadi pukul 07.30 s.d 14.30 WIB; Jum'at semula pukul 08.00 s.d 10.00 menjadi pukul 07.30 s.d 10.30 WIB; 5. Pelayanan Three in One pengajuan Akta Kelahiran bayi baru lahir mendapatkan 3 (tiga) dokumen kependudukan sekaligus yaitu KK, Akta Lahir dan KIA.	1. Capaian kepemilikan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus per 31Desember 2024 sebesar 80,82% telah melampaui target nasional sebesar 67%. 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan per Triwulan IV Tahun 2024 di Kab. Kudus dengan nilai IKM 99,48.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar lebih meningkatkan dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir	1. Penambahan sarpras berbasis teknologi informasi guna peningkatan pelayanan administrasi kependudukan; 2. Melakukan pengembangan aplikasi online pelayanan administrasi kependudukan; 3. Optimalisasi inovasi “KIOS PAKDE” (Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa) guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan melalui petugas registrasi desa/kelurahan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang terkoneksi langsung dgn Kemendagri.	1. Capaian kepemilikan dokumen administrasikependudukan per 31 Desember 2024 sejumlah 87,99% telah meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sejumlah 84,44%; 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan per Triwulan IV Tahun 2024 di Kab. Kudus dengan nilai IKM 99,48.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan seleksi pengisian perangkat desa dan lolos sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan bagi yang belum	terkait dengan pelantikan perangkat desa sampai dengan saat ini jumlah perangkat desa yang sudah dilantik 223 orang, dan yg belum 4 orang yakni di desa jepang 3 dan gamong 1	Pengisian Perangkat Desa sudah dilaksanakan 98%
2	Pembinaan kepada Desa-desa agar lebih diintensifkan terkait dengan administrasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa	pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara rutin kami laksanakan setiap tahun melalui kegiatan rapat koordinasi, bintek, maupun sosialisasi, selain terdapat subkegiatan yg secara khusus bertujuan meningkatkan kapasitas/kemampuan baik aparatur pemerintahan desa mau anggota BPD	Pembinaan kepada desa terkait dengan administrasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Desa dilaksanakan bertahap sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Perhubungan		
1	Truck-truck yang mengangkut barang di tepi jalan sepanjang Jalan Tanjung untuk ditertibkan, karena menyebabkan kemacetan	Bidang LLAJ siap menindak lanjuti	Melakukan operasi penertiban dan tindakan tegas serta memasang rambu – rambu peringatan bila diperlukan.
2	Marka-marka jalan agar dicat ulang karena menyebabkan problem seperti kecelakaan lalu lintas dan kemacetan	Diusulkan pada APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
3	Pengadaan CCTV jalan agar dianggarkan di tahun 2025 sebagai program prioritas, terutama titik-titik rawan kecelakaan jalan	Saat ini tersedia 26 titik CCTV dan TA. 2025 diusulkan penggantian beberapa kamera dan penambahan NVR	Kemudahan pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan
4	Warning lamp perlu diperhatikan, khususnya di dekat pabrik, karena Perusahaan-perusahaan besar sering mengabaikan fasilitas-fasilitas umum jalan sehingga menyebabkan kemacetan	Diusulkan pada APBD TA. 2025	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
5	Semua program dan pekerjaan fisik yang ada di sektor perhubungan, agar segera dilaksanakan	Percepatan pelaksanaan pekerjaan	Selesai tepat waktu sebelum perubahan TA. 2024
6	Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Kemacetan yang terjadi karena traffic light, contohnya di traffic light depan SMP 2 Kudus dan Rendeng ada perubahan dari sisi waktu durasi traffic light, dan hal tersebut justru menambah masalah kemacetan. Oleh karena itu, perlu memikirkan konsep smart traffic light, seperti di Kota Bandung, dengan cara memasang ATCS (Area Traffic Central System) sehingga jadi durasi lampu merah dan lampu hijau akan terpola secara system	TA. 2024 akan dipasang ATCS di Simpang Penthol, selanjutnya APBD TA. 2025 diusulkan ATCS Simpang DPRD	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7	Terkait keselamatan jalan, perlu diadakan marka kejut, diantaranya jalan Kencing arah Pasuruhan diberikan sehingga dari arah barat pengendara bisa mengurangi kecepatan	Penyusunan kajian teknis dan dampak sosial	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
8	Kawasan perempatan Kedungdowo, apabila pagi hari situasinya ramai dari arah timur, sehingga sebaiknya dari arah timur dan barat diberikan marka kejut, namun pembuatan marka kejut juga tidak mudah, dan banyak keluhan dari Masyarakat bahwa marka kejut membuat ketidaknyamanan berkendara, untuk itu Apabila tidak dimungkinkan diberikan marka kejut, maka alternative agar diberikan lampu hati-hati (warning light)	Penetapan titik lokasi penanganan dan penyusunan kajian teknis penanganan serta dampak sosial	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
9	Aspal Kawasan jalan Jepang-Berayung telah diperbaiki tetapi belum terdapat marka jalan, mohon untuk ditindaklanjuti segera diberikan rambu-rambu jalan supaya tidak terjadi kecelakaan	Diusulkan pada APBD Perubahan TA. 2024	Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
	Bidang Komunikasi dan Informatika		
1	Sosialisasi Cukai merupakan anggaran terbesar di Dinas Kominfo, dengan anggaran 14.250.000.000,- dan realisasi 13.732.669.702,- atau 96,37%. Hal ini di sebabkan adanya selisih harga dengan Satuan Standard Harga (SSH), dan sisa dari selisih harga di kembalikan ke kas Daerah	Penyusunan rencana kegiatan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, termasuk di dalamnya pengusulan SSH sehingga anggaran dapat terserap secara optimal.	Pelaksanaan subkegiatan sosialisasi cukai dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan sesuai rencana bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara lebih efektif dan efisien sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Untuk inovasi-inonasi dari Dinas Kominfo sudah banyak mengajukan tapi masih belum di setujui oleh TIM Ahli dari Provinsi dan Pusat, untuk itu Dinas Kominfo agar lebih meningkatkan komunikasi	Dinas Kominfo telah mengajukan usulan pembangunan jaringan FO	Pada tahun 2024 tahap I yang mendapat internet desa yaitu Desa Menawan
		Dinas Kominfo pada tahun 2023 mengikuti proses pemetaan kegiatan peningkatan kompetensi masyarakat / pegawai ASN melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Kominfo.	Meningkatkan literasi digital masyarakat dan ASN di Kabupaten Kudus
3	Sebagai bahan pembanding penciptaan inovasi, Dinas Kominfo menimba ilmu terkait ATM SPBE dari Jogjakarta sehingga SPBE di Kabupaten Kudus meningkat, dalam peningkatan nilai SPBE Dinas Kominfo di dampingi oleh pihak ketiga	Pada tahun 2022 nilai indeks SPBE mencapai 3,38 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 4,23. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 lebih banyak difokuskan kepada penyusunan dokumen manajemen SPBE diantaranya manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi sebagai dasar implementasi ISO 27001. Yang masih belum dilakukan yaitu pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	Meningkatkan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
4	Dengan adanya CSR anggaran CCTV tidak di bebaskan dari APBD tetapi di bebaskan pada Perusahaan-perusahaan	Berdasarkan Perbup SPBE Kabupaten Kudus dalam pasal 13 terkait Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memanfaatkan infrastruktur tiang komunikasi dan tiang listrik, tiang PJU serta CCTV yang mengarah ke area publik yang berbasis IP untuk kebutuhan Pemerintah Daerah.	Meningkatkan kinerja jaringan komunikasi data antar unit kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5	Untuk Komisi A agar lebih dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai Narasumber pada Dinas Kominfo	Anggota Komisi A DPRD telah dijadwalkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang melibatkan para narasumber dari pejabat pemerintah sipil maupun TNI/Polri, anggota DPRD, serta pejabat Bea dan Cukai bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya dari peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Para narasumber memberikan paparan dari sudut pandang sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing.
6	DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar Dinas Kominfo lebih proaktif dalam mencari terobosan-terobosan demi kemajuan Kudus tercinta	Dinas Kominfo merencanakan pembuatan program podcast untuk turut menyebarkan informasi, kebijakan, dan diskusi berbagai bidang permasalahan yang uptodate, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan narasumber yang kompeten di bidangnya.	Dengan adanya program talkshow / podcast tersebut diharapkan sebagai sarana diskusi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas melalui media online menyesuaikan dengan trend milenial saat ini dan diharapkan dengan program ini penyampaian informasi dapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat.
	Bidang Koperasi		
1	Adanya beberapa koperasi hanya tinggal nama yang merugikan anggota dan tidak sesuai dengan semangat koperasi, mengabaikan hak-hak anggota menunjukkan pembinaan kepada koperasi kurang efektif	- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pergerakan Koperasi agar dijalankan sesuai regulasi yang berlaku - Monitoring kepada pergerakan	Agar pergerakan koperasi dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pergerakan koperasi dapat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		koperasi serta pendampingan kepada Koperasi binaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM	maksimal, memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada anggotanya. Dan untuk koperasi yang tidak aktif dan sepanjang tidak mempunyai permasalahan keuangan maka koperasi tersebut akan ditindak lanjut dengan proses pembubaran koperasi.
	Bidang Penanaman Modal		
1	Terkait realisasi pendapatan sebesar 161,75% terutama dari retribusi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kami apresiasi, meskipun ada prediksi untuk Tahun 2024 retribusi pemberian IMB tidak tercapai, agar dicarikan solusi terbaik	- Sejak 5 Januari 2024 perizinan bangunan menggunakan SIMBO yaitu aplikasi dari Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021. Semua ketentuan diatur dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya menjalankan saja. - Proses verifikasi dilakukan oleh OPD teknis yaitu Dinas PUPR. Apabila proses sudah terverifikasi baru masuk ke DPMPSTSP untuk penerbitan SKRD dan penagihan. Setelah dibayar lunas maka DPMPSTSP menerbitkan SK PBG. - Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dengan melaksanakan FGD dengan mengundang masyarakat dan narasumber yang kompeten	Kendala-kendala teknis dari Dinas PUPR dalam pemrosesan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat terselesaikan sehingga proses penerbitan PBG berjalan lancar dan target pendapatan Retribusi PBG dapat tercapai

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Untuk optimaslisasi pelayanan lebih optimal, agar berkoordinasi secara intensif dengan dinas/instansi vertikal untuk membuka gerai pelayanan di MPP dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat	- Melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelayanan di gerai MPP yang dihadiri oleh perwakilan gerai baik dari OPD teknis maupun instansi vertikal dan dilaksanakan setia triwulan. -Dinas PMPTSP telah berkoordinasi dengan dinas/instansi vertikal untuk membuka gerai layanan di MPP. Instansi vertikal yang bergabung antara lain Kantor Imigrasi, BBPOM Semarang, Kementerian Agama, Kantor ATR BPN, Polres, Bea Cukai, PT. Taspen, PLN, PDAM, KPP Pratama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, Samsat dan BPD Jateng. Dengan berjalannya waktu karena keterbatasan personil Imigrasi sudah tidak dapat membuka layanan pengurusan paspor di MPP Kudus. Polres untuk SIM Keliling sudah tidak membuka layanan di MPP	Mendekatkan pelayanan dari Dinas/Instansi vertikal kepada Masyarakat
3	Dengan telah adanya perizinan online OSS, begitu mudahnya izin keluar bagi usaha klasifikasi beresiko rendah yang terkadang mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar, oleh karena itu perizinan agar juga memperhatikan aspek sosial/lingkungan kemasyarakatan	Berdasarkan PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, Pengawasan dituj ukan untuk memastikan proses pemenuhan standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana	Dengan adanya kegiatan pengawasan baik rutin maupun insidental diharapkan tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga seluruh ketentuan standar pengajuan perizinan berusaha termasuk komitmen pengelolaan lingkungan dari pelaku usaha dapat dipenuhi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pernyataan pemenuhan standar usaha yang telah dibuat pelaku usaha pada saat proses pengajuan permohonan perizinan berusaha. Dinas PMPTSP telah melakukan pengawasan yang terdiri dari : 1. Pengawasan Rutin Dilakukan secara berkala dan terjadwal secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilaksanakan dalam bentuk inspeksi lapangan dan pemantauan laporan pelaku usaha. Usaha yang dilakukan pengawasan terdiri dari kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Pengawasan rutin juga mengikutsertakan instansi terkait. 2. Pengawasan Insidental Merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu dan dapat ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan atau secara virtual. Pengawasan insidental ini dilaksanakan berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat dan pelaku usaha yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Persandian		
1	Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak, maka DPRD merekomendasikan agar koordinasi lebih dapat ditingkatkan baik secara fisik maupun secara online	Aplikasi Srikandi telah dilaunching Bupati Kudus dan telah dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dan surat menyurat. Leading sector pemanfaatan aplikasi srikandi merupakan wewenang dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sedangkan Dinas Kominfo bertugas dalam memfasilitasi pendaftaran sertifikat elektronik.	Meningkatkan kecepatan dalam proses pengiriman surat menyurat.
2	Kedepannya untuk koordinasi dan surat menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI dengan memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut merupakan aplikasi umum yang di tetapkan oleh MENPAN RB, untuk itu Pemerintah Daerah agar segera menyesuaikan	Sejak dilaunchingnya aplikasi Srikandi pada tahun 2023, perangkat daerah telah memanfaatkan aplikasi Srikandi guna pengelolaan surat menyurat dan kearsipan. Tugas Dinas Kominfo adalah memfasilitasi pendaftaran sertifikat elektronik kepala perangkat daerah untuk keperluan penandatanganan surat di Srikandi. Tercatat sampai dengan Januari 2024, semua kepala perangkat daerah sampai kelurahan telah memiliki sertifikat elektronik. Rencana ke depan tiap pegawai akan memiliki sertifikat elektronik untuk keperluan urusan kepegawaian.	Meningkatkan pengelolaan surat menyurat perangkat daerah dan pemanfaatan sertifikat elektronik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Kebudayaan		
1	Untuk kegiatan Seni Budaya pada Dinas Kominfo, ada 8 kali kegiatan (kesenian ketoprak) tapi sampai saat ini belum diselenggarakan	8 (delapan) kegiatan kesenian ketoprak tersebut tidak dapat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus karena kegiatan tersebut merupakan anggaran Dinas Kominfo	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus melakukan pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan (peningkatan kapasitas tata kelola)
	URUSAN PILIHAN		
	Bidang Pariwisata		
1	Terkait realisasi pendapatan sebesar 124,15% kami apresiasi, dan agar dipertahankan dan ditingkatkan dengan meningkatkan pelayanan dan perawatan sarana prasarana obyek retribusi	Meningkatkan perawatan sarana dan prasarana obyek retribusi dan melakukan promosi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, termasuk pada destinasi wisata yang menjadi obyek retribusi	Melakukan pemeliharaan rutin dan meningkatkan sarana prasarana pada obyek retribusi
2	Pengembangan suatu kawasan pariwisata harus ada sinergitas segenap OPD sesuai dengan tugas pokok fungsinya, butuh langkah inovasi untuk bisa menjadi program prioritas daerah	Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan wisata	Kelancaran akses menuju destinasi wisata dan sarana prasarana penunjangnya (perbaikan jalan menuju destinasi wisata, pemeliharaan lampu penerangan jalan, pengelolaan sampah)
	Bidang Pertanian		
1	Seiring rendahnya minat pemuda menjadi petani, diperlukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan minat milenial menjadi petani	Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan masyarakat milenial untuk berminat disektor pertanian, antara lain : a. Sosialisasi tentang penerapan teknologi pertanian modern b. Penguatan kelembagaan petani	a. Wadah petani milenial dalam berkoordinasi, berkolaborasi dan konsolidasi dalam kegiatan agrointerpreneur b. Menumbuhkan dan memberikan motivasi kepada generasi milenial dalam pembangunan pertanian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		milennial dalam wadah himpunan petani milennial andalan kabupaten Kudus	c. Sebagai agri training camp bagi generasi petani milennial d. Mendidik pelajar sebagai kader petani milennial dalam kegiatan Saka Taruna Bumi
2	Dibutuhkan pengawalan dan pembinaan terhadap alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan	Penggunaan Dana Desa 20% untuk ketahanan pangan sudah diatur dalam Peraturan Bupati. Namun demikian masih banyak alokasi dana ketahanan pangan yang belum sesuai dengan prioritas daerah maupun program nasional.	OPD yang mempunyai kewenangan intervensi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk itu kami akan melakukan koordinasi secara intersif agar pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Nasional maupun prioritas Daerah.
	Bidang Perdagangan		
1	Rendahnya realisasi pendapatan daerah sebesar 68% yang disebabkan adanya kebijakan keringanan pembayaran retribusi PKD pedagang Pasar Kliwon dari pemerintah Daerah agar lebih dicermati supaya tidak merugikan pemerintah daerah	Memberikan surat tagihan pembayaran sewa PKD kepada pedagang yang menunggak pembayaran di tahun sebelumnya	Meningkatkan capaian PAD sektor perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
1	Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2018-2023, bahwa bantuan untuk takmir masjid diberikan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya bantuan diberikan setahun satu kali	Visi Misi Bupati Kudus Periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam salah satu program yaitu bantuan social per bulan untuk khotib dan imam masjid/musholla serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.	Bantuan kesejahteraan bagi imam, Khotib dan Marbot Masjid dan Musholla telah diberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 tahun

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bantuan social harus memenuhi syarat resiko social bagi penerimanya. Sedangkan penerima bantuan imam, marbot dan khotibtidak semuanya memenuhi syarat resiko social. Sehingga dalam realisasi pelaksanaannya tidak diberikan dalam bentuk bantuan social namun diberikan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam bentuk Hibah. Berdasarkan kemampuan anggaran, diberikan bantuan kesejahteraan bagi imam, Khotib dan Marbot Masjid dan Musholla sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rp) untuk 1 tahun.	
2	Bantuan kesejahteraan untuk Khotib dan Imam Masjid/Mushola yang telah dilaksanakan di tahun 2023, agar dapat dilanjutkan pada tahun 2024	Bantuan kesejahteraan bagi imam, Khotib dan Marbot Masjid dan Musholla pada Tahun 2024 diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.439.000.000,00	Bantuan kesejahteraan bagi Imam, Khotib dan Marbot Masjid dan Musholla tetap dilanjutkan pada Tahun 2024
	Bagian Perekonomian		
1	Peningkatan kinerja sumber daya manusia jajaran BUMD dengan membangun mindset pengembangan bisnis	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja BUMD secara berkala setiap triwulan	Meningkatnya kinerja sumber daya manusia BUMD/ perlunya membangun mindset pengembangan bisnis pada sumber daya manusia BUMD
2	Perlunya rumusan kebijakan dan terobosan/inovasi untuk mengembangkan usaha BUMD, peningkatan peran dan komunikasi	Menyampaikan kepada Direksi dan Manajemen BUMD pentingnya membangun mindset pengembangan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	BUMD dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	bisnis yang selanjutnya perlu disosialisasikan dan dicontohkan kepada semua pegawai BUMD	
		Menyampaikan kepada Direksi dan Manajemen BUMD pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia BUMD, salah satunya dengan mengikutsertakan sumber daya manusia BUMD dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi	
	Sekretariat DPRD		
1	Pada Sekretariat DPRD Kab. Kudus agar lebih cermat dalam penganggaran APBD dengan Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kudus dan selalu berkoordinasi terkait proses atau tahapan penganggaran APBD baik di Komisi maupun di Banggar bersama TAPD	Sependapat dilakukan	Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang diberikan dalam pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dengan Pimpinan DPRD dan Komisi A DPRD Kab Kudus
	BKPSDM		
1	Proses penerimaan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mohon di laksanakan secara transparan dan akuntabel	Proses penerimaan seleksi PPPK dan CPNS Tahun 2024 secara transparan . dan akuntabel - Inforrnasi pengadaan CPNS disampaikan melalui pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 800.1.2.2 I 1961 I 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024	Penerimaan ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Informasi pengadaan PPPK disampaikan melalui pengumuman Sekretaris Daerah Nomor : 00.1.2.2/2468/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 - Proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	
	BPPKAD		
1	Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 adalah sebesar 103,03°/o dan pada tahun 2023 adalah sebesar 106,05°/o hal ini ada kemungkinan target pendapatan yang terlalu rendah, sehingga perlu menaikkan target pendapatan	Penetapan target dilakukan berdasarkan kajian potensi yang disusun akademisi, dievaluasi pemerintah provinsi dan disepakati dengan DPRD. Selain itu, target perubahan yang ditetapkan pada bulan September tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif di lapangan (realisasi, pertumbuhan dan prognosis tahun 2024)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Terkait PAD dari sektor pajak daerah dari pajak penerangan jalan umum (PPJU) agar dapat dirinci penerimaan PPJU dari sektor perusahaan dan rumah tangga	BPPKAD sudah berkoordinasi dengan PT PLN Cabang Kudus terkait PPJU agar dapat dirinci dari sektor Perusahaan dan Rumah Tangga.	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 tidak menerima alokasi Tugas Pembantuan APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah (NIHIL) .

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSAAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- NIHIL -											

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Mengingat tidak adanya Tugas Pembantuan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pemerintah Pusat (Lembaga dan Kementerian) maupun dari Pemerintah Provinsi maka permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak dapat dilaporkan secara spesifik.

Namun demikian secara umum kendala yang dihadapi oleh penerima Tugas Pembantuan, diantaranya adalah :

1. Keterlambatan informasi adanya anggaran/DIPA tugas pembantuan dari kementerian teknis, yang seringkali diperoleh pada saat tahun anggaran telah berjalan sehingga dalam pelaksanaannya sering tidak disertai anggaran untuk kegiatan pendampingan dari APBD.
2. Selama ini kegiatan yang dilaksanakan pada Tugas Pembantuan belum sinkron dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. Adanya program-program baru Pemerintah, menjadikan program dan kegiatan oleh Kementerian lebih difokuskan pada Program Strategis Nasional serta upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sehingga Tugas Pembantuan yang didelegasikan ke daerah berkurang, termasuk untuk Kabupaten Kudus tidak diberikan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024 lalu.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen LKPJ adalah upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 menjadi cerminan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun. Laporan hasil pembangunan daerah tersebut dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan.

Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah.

Sebagai penutup, penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini menjadi laporan pelaksanaan tahun kedua dalam rentang waktu periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus, selanjutnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus akan mengacu pada RPJMD yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kudus Periode 2025 - 2030. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi menuju Kabupaten Kudus Sejahtera, Harmoni dan Takwa.